

**IDENTIFIKASI SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGULAN
UNTUK KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

HENDRO PRASETYO
NPM : 0706 305 942



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009**

**IDENTIFIKASI SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGULAN
UNTUK KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

HENDRO PRASETYO
NPM : 0706 305 942



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : HENDRO PRASETYO

NPM : 0706 305 942

Tanda tangan :



Tanggal : 7 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro Prasetyo
NPM : 0706 305 942
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Identifikasi Sektor/Sub Sektor Unggulan Untuk Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah,

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan,



HENDRO PRASETYO

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Hendro Prasetyo
NPM : 0706 305 942
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Identifikasi Sektor / Sub Sektor Unggulan Untuk
Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kudus Provinsi
Jawa Tengah.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Hera Susanti, SE.,M.Sc ()

Penguji : Ayudha D. Prayoga, SE.,M.Sc ()

Penguji : R.H.Achmadi, SE.,M.Soc.Sc ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Hera Susanti, SE.,M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tesis ini;
2. pihak Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
4. sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Januari 2009

Penulis,



HENDRO PRASETYO

ABSTRAK

Nama : Hendro Prasetyo
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Identifikasi Sektor/Sub Sektor Unggulan Untuk Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Perekonomian Kabupaten Kudus memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap industri rokok/pengolahan tembakau. Perkembangan industri ini kedepan kurang bagus, karena meningkatnya kesadaran hidup sehat tanpa rokok, dan campur tangan pemerintah dalam menentukan harga jual eceran, penetapan cukai yang tinggi bahkan cukai ganda, dan perkiraan rencana stagnasi produksi tahun 2015-2020.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Kudus selain industri pengolahan tembakau, sebagai langkah antisipasi untuk menentukan strategi pembangunan ekonomi dimasa datang. Analisis dilakukan terhadap PDRB riil Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2006, tanpa komponen industri pengolahan tembakau. Dengan menggunakan metode *Klassen Typology*, *Shift-Share* dan *Location Quotient (LQ)*, dihasilkan enam (6) klasifikasi yang berbeda yaitu unggulan, potensial, berkembang, tumbuh, tertekan dan tertinggal. Terbukti sebagai unggulan adalah (i) sektor perdagangan, hotel dan restoran (sub sektor perdagangan besar dan eceran), (ii) sektor industri pengolahan (sub sektor industri tanpa migas khususnya industri makanan dan minuman; kertas dan barang cetakan; alat angkutan, mesin, dan peralatan; barang lainnya), dan sub-sub sektor jasa swasta sosial kemasyarakatan.

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan strategi kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan sektor/sub sektor unggulan.

Kata kunci :
tembakau, unggulan, kebijakan.

ABSTRACT

Name : Hendro Prasetyo
Study Program : Planning and Public Policy Master's Degree
Title : Identification Base Sector/Sub Sector for Economic Policy
in Kudus District, Central Java Province

Kudus economy was highly dependens on tobacco industry. But white the increase of awareness for healthy life and government interference on retail selling price, through high and double tax, make the growt of tobacco industry seems have no prospect in the future. Production stagnancy forecast in 2015-2020 also contribute to its slower growth.

This research aims to identify base sector/sub sector other than tobacco industry, as an anticipation to determine Kudus district strategy on economic development in the future. The analysis use on real GRDP 2000-2006 of Kudus and Central Java, excluding tobacco industry component. By using *Klassen Typology*, Shift-Share and Location Quotient (LQ) methods, give six different classification of sectors as follows : excel, potent, develop, growth, depress, and undeveloped. Trading, hotel & restaurant sector (wholesale and retail sub sector), manufactur (non oil & gas industry, especially food and beverages; printing and paper; transportation, apparatus and machinery; others product), and social & community service is proven to be the exceled sector in Kudus.

The result of this research could be use for Kudus government in determine strategic economic policy.

Key words:
tobacco, economic base, policy.

DAFTAR ISI

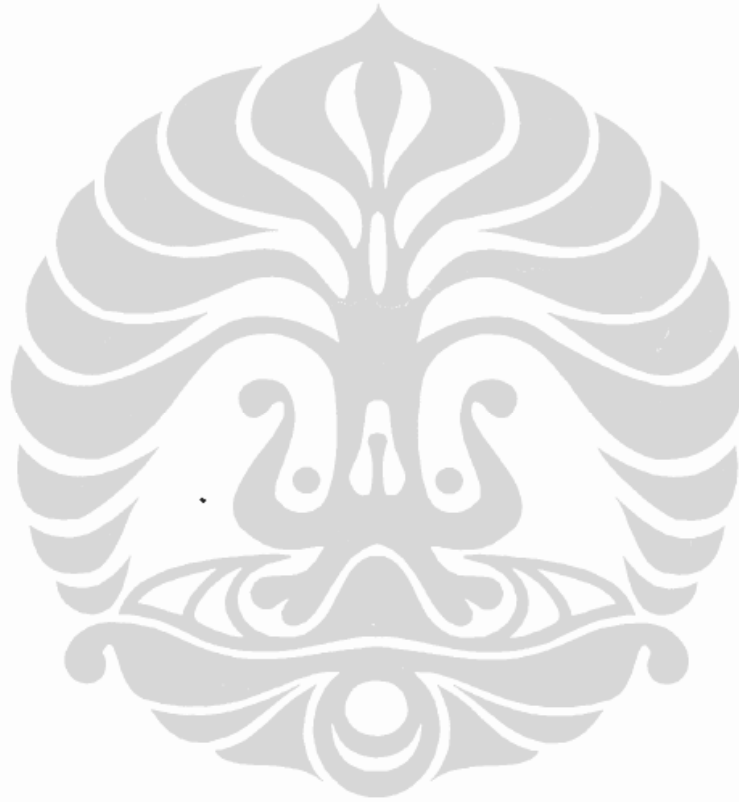
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Hipotesis	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.7 Metodologi Penelitian	9
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	10
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
2.3 Teori Perubahan Struktural	15
2.4 Analisis Basis Ekonomi	18
2.5 Kebijakan Pembangunan Daerah	21
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS	25
3.1 Geografi	25
3.2 Sumber Daya Alam	26
3.3 Sumber Daya Manusia	28
3.3.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	30
3.3.2 Pendidikan	31
3.3.3 Produktivitas Tenaga Kerja	32
3.3.4 Struktur dan Upah Tenaga Kerja	34
3.4 Kondisi Umum Ekonomi Kabupaten Kudus	36
3.5 Kondisi Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau	43
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Industri Rokok /Pengolahan Tembakau	43

3.5.2	Struktur Ekonomi Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau	47
3.6	Infrastruktur	50
3.6.1	Transportasi	50
3.6.2	Infrastruktur lainnya	51
3.7	Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008	53
BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN	55
4.1	Jenis dan Metode Pengumpulan Data	55
4.2	Metodologi Penelitian	56
4.2.1	Analisis Tipologi Daerah (<i>Klassen Typology</i>)	57
4.2.2	Analisis <i>Shift-Share</i>	58
4.2.3	Analisis Basis Ekonomi	59
4.2.4	Teknik <i>Overlay</i>	60
BAB V	IDENTIFIKASI SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGULAN	62
5.1	Hasil Analisis Tipologi Daerah (<i>Klassen Typology</i>)	62
5.2	Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	67
5.3	Hasil Analisis Basis Ekonomi	76
5.4	Penentuan Sektor/Sub Sektor Unggulan	80
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	88
6.1	Kesimpulan	88
6.2	Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006	4
2.1 Matrik Tipologi Daerah	14
2.2 Matrik Tipologi Daerah	14
2.3 Peran Pemerintah	23
3.1 Tata Guna Lahan Kabupaten Kudus Tahun 2000 dan 2006	27
3.2 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2005	29
3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Perkapita (ADHK 2000=100) Kabupaten Kudus Tahun 2005	30
3.4 Penduduk Kabupaten Kudus (10 tahun ke atas) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2000 dan 2005	31
3.5 Produktivitas Tenaga Kerja (Umur 10 Tahun ke atas) Kab. Kudus (ADHK 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2000 dan 2005	32
3.6 Perkembangan Upah Tenaga Kerja Industri Besar/Sedang Kab. Kudus Tahun 2000-2005	35
3.7 Struktur PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2006	37
3.8 PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000 dan 2006	38
3.9 Perkembangan Industri dan Investasi di Kabupaten Kudus 2000-2006	38
3.10 PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kudus (ADHK :2000=100) Tahun 2000 dan 2006	39
3.11 Data Produksi Rokok Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006	40
3.12 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006	40
3.13 Realisasi Ekspor Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006	41
3.14 Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kab. Kudus dan Prov. Jateng (ADHK 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)	44
4.1 Matrik Tipologi Daerah	57
5.1 Matrik Tipologi Daerah (<i>Klassen Typology</i>), Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor / Sub Sektor PDRB Kabupaten Kudus terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2006	67
5.2 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> atas PDRB Tanpa Industri Rokok/ Pengolahan Tembakau Kab. Kudus 2000-2006	70
5.3 Hasil Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> atas PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kab. Kudus (ADHK : 2000 =100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006	77

5.4	Rasio Nilai Ekspor PDRB Sektor/Sub Sektor Basis Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006	79
5.5	Rasio Konsumsi Domestik PDRB Sektor / Sub Sektor Basis Kab.Kudus Tahun 2000-2006	80
5.6	<i>Overlay</i> Analisis Tipologi Daerah, <i>Shift-Share (SS)</i> dan <i>LQ</i> Kabupaten Kudus, 2000-2006	82
5.7	Klasifikasi Sektor/Sub Sektor PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006 (Hasil Rangkuman Teknik <i>Overlay</i>)	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Kudus Berdasarkan Total PDRB dengan PDRB Tanpa Rokok (ADHK 2000=100)	7
3.1 Peta Provinsi Jawa Tengah	26
3.2 Distribusi Penduduk Kabupaten Kudus (umur 10 tahun ke atas) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 2000 dan 2005	32
3.3 Perbandingan Struktur Tenaga Kerja Kab. Kudus Distribusi Total (termasuk Industri Rokok) vs Distribusi Tanpa Industri Rokok Tahun 2000 dan 2005	35
3.4 Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kab.Kudus dan Prov.Jawa Tengah (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2006	48
3.5 Persentase Distribusi PDRB Industri Non Migas,Tanpa Industri Rokok Kab. Kudus dan Prov. Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2006	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000 - 2006 (Juta Rupiah).
2. PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah).
3. PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah).
4. PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah).
5. PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kab./Kota se Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah).
6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.
7. Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.
8. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.
9. Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.
10. Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006.
11. Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006.
12. Persentase Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006.
13. Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Provinsi Jawa Tengah (ADHK:2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006.
14. Tipologi Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006 (Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau) Menurut Lapangan Usaha.
15. Hasil Analisis *Shift-Share* atas PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006.
16. Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)* atas PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.
17. *Overlay* Analisis Tipologi Daerah, *Shift-Share* dan *LQ* atas PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 2000-2006.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi yang dimulai tahun 2001 menempatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada suatu posisi penting dalam mengatur dan mengurus wilayah serta masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Menyadari posisi strategis pemerintah daerah otonom, khususnya kabupaten/kota, maka kewenangannya telah diperluas sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian kesempatan membuat perencanaan dan kebijakan daerah sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat semakin besar.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2005 – 2009, salah satunya adalah terwujudnya percepatan pengembangan wilayah serta peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah yang semakin kompetitif di pasar bebas, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Pengembangan produk unggulan diutamakan yang menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri, memiliki potensi pengembangan ekspor, dan mengolah sumber daya alam dalam negeri.

Suahasil Nazara (1994) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus melihat ke arah dua buah sasaran pokok, yaitu ; *Pertama*, sasaran umum yang mirip dengan kebijakan nasional berupa pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. *Kedua*, memperhitungkan aspek spasial perekonomian, seperti efisiensi lokasi, masalah migrasi, perkembangan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah dan lain sebagainya.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Meniru pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada daerah lain belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah sendiri. Jika menginginkan pembangunan daerah lebih berhasil, maka kebijakan

yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah sendiri. Oleh karenanya diperlukan penelitian yang mendalam tentang potensi daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor unggulan menjadi sangat penting, terutama di era otonomi daerah. Namun demikian belum semua daerah memahami secara benar potensi unggulan yang dimiliki, karena belum semuanya melakukan kajian ilmiah sesuai dengan teori ekonomi. Mengingat perekonomian tumbuh dan berkembang dinamis, terbuka kemungkinan terjadi perubahan struktur ekonomi. Oleh karenanya kajian ilmiah mengenai sektor-sektor unggulan di daerah senantiasa perlu diperbaharui, agar kebijakan pembangunan ekonomi daerah tetap aktual mampu mengikuti perkembangan.

Kabupaten Kudus, sebagai salah satu daerah otonom dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, memiliki posisi geografi yang strategis di jalur pantura pulau Jawa. Dengan luas wilayah 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2006 mencapai 742.040 jiwa atau sekitar 2,24% jumlah penduduk Jawa Tengah dengan PDRB perkapita sebesar Rp.2.415.010,63 per bulan, merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Menurut laporan BPS Jawa Tengah tahun 2007, Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai kota krektek, merupakan salah satu daerah industri andalan di provinsi Jawa Tengah. PDRB Kabupaten Kudus memberikan kontribusi yang cukup besar ke Provinsi Jawa Tengah, menempati urutan ketiga setelah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap. Dilihat dari nilai PDRB antara tahun 2001 hingga 2005, rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 6%, merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Total PDRB Kabupaten Kudus tahun 2005 mencapai Rp.19,823 trilyun, dimana sektor ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar diperoleh dari sektor industri Rp.12,844 trilyun (64,79%), sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp.5,123 trilyun (25,84%) dan sektor pertanian sebesar Rp.0,447 trilyun (2,25%). Data tersebut memberikan gambaran bahwa sektor Industri Manufaktur

mendominasi perekonomian Kabupaten Kudus, sehingga dapat dipastikan sebagai sektor unggulan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kudus terbilang unik, dimana dengan keterbatasan sumber daya yang ada telah mampu berkembang lebih unggul dari daerah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Terbentuknya aglomerasi industri di Kabupaten Kudus berkembang secara alamiah, dengan rentang waktu sangat panjang, yang diawali dari industri rokok kretek. Sejarah panjang itu berawal dari penemuan "rokok cengkeh" oleh Djamari, penduduk Kudus yang menderita sakit dibagian dadanya. Ia menggunakan minyak cengkeh untuk mengobati penyakitnya. Setelah sembuh, maka tersebar kabar bahwa kebiasaan merokok dengan cengkeh (yang mengandung cengkeh) dapat menyembuhkan sesak nafas. Dengan naluri bisnisnya, pada sekitar tahun 1870 Djamari mulai membuat "rokok obat" atau dikenal dengan nama "rokok cengkeh" yang diproduksi dalam skala industri rumah tangga dan laku dipasaran. Kemudian sebutan itu berganti dengan nama "rokok kretek" karena bila rokok ini dibakar menimbulkan bunyi kemeretek, (Budiman & Onghokham, 1987).

Rokok kretek ini, tercatat mulai berkembang pesat di Kudus pada masa Nitisemito yang mengawali usaha membuat rokok pada tahun 1906. Melihat perkembangan yang pesat dan permintaan pasar makin besar, maka pada tahun 1914 Nitisemito mendirikan perusahaan rokok dengan merek Bal Tiga. Berawal dari sini, Kudus memasuki industrialisasi rokok kretek, yang terbuat dari rajangan tembakau, cengkeh dan pembungkus dari daun jagung/klobot, (Kompas, 2003). Hasil penelitian mengenai daerah penghasil rokok di Indonesia yang dilakukan oleh Kuncoro tahun 2001, menyimpulkan bahwa Kudus merupakan salah satu dari empat Kabupaten/Kota industri klaster rokok di Indonesia, dan merupakan satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan tiga daerah lainnya berada di Jawa Timur. Adapun jenis rokok yang diproduksi dan beredar saat ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu Rokok Klobot/Klembak, Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), yang diproduksi oleh industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga.

Tabel 1.1 : PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

Lapangan Usaha	(dalam jutaan rupiah)							
	2000 2	2001 3	2002 4	2003 5	2004 6	2005 7	2006 8	
1. Pertanian	324.047,17	346.975,49	366.181,10	347.627,24	352.662,27	340.618,20	356.087,48	
2. Pertambangan & Penggalian	2.377,70	2.662,81	2.865,06	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31	
3. Industri Pengolahan	4.814.669,27	5.112.626,10	5.407.457,41	5.715.468,09	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12	
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	
b. Industri Tanpa Migas	4.814.669,27	5.112.626,10	5.407.457,41	5.715.468,09	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12	
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	4.114.868,80	4.379.082,82	4.645.617,70	4.907.346,13	5.387.459,41	5.694.400,12	5.761.927,48	
(i) Makanan & Minuman	906.506,47	1.007.989,82	1.199.243,86	1.304.540,58	1.492.506,49	1.682.358,29	1.827.791,75	
(ii) Tembakau	3.208.362,33	3.371.093,00	3.446.373,84	3.602.805,55	3.894.952,92	4.012.041,83	3.934.135,73	
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	117.837,47	117.358,43	121.882,38	127.660,63	130.709,25	134.274,91	147.595,32	
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	29.133,11	29.474,17	31.295,45	32.834,06	33.761,36	34.534,93	37.910,85	
4. Kertas & Brg. Cetakan	348.765,96	349.312,76	356.330,38	375.562,46	394.348,21	406.905,41	433.652,77	
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	37.479,88	42.265,34	43.017,30	46.649,67	48.048,97	49.467,74	53.119,16	
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	15.267,51	16.128,15	17.740,65	18.919,65	19.305,56	19.645,37	21.141,77	
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-	
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	117.639,70	135.967,64	145.913,84	156.132,30	161.426,57	165.878,46	178.172,16	
9. Barang lainnya	33.676,84	43.036,79	45.659,71	50.363,19	51.298,02	52.514,31	56.390,61	
4. Listrik, Gas & Air Bersih	23.800,75	26.390,50	29.496,36	30.273,01	33.388,12	33.134,30	34.548,41	
5. Bangunan	63.947,58	77.983,15	87.305,41	114.267,74	141.554,12	162.748,06	167.298,67	
6. Perdagangan, hotel & restoran	2.229.427,46	2.347.324,40	2.451.666,83	2.591.709,92	2.831.449,55	2.915.874,16	2.987.781,04	
7. Pengangkutan & Komunikasi	133.362,88	144.234,01	155.129,91	168.385,79	180.687,10	191.001,05	201.682,93	
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	173.880,20	184.503,35	196.726,71	205.575,67	218.158,10	229.463,82	238.231,77	
9. Jasa-Jasa	182.224,17	186.743,43	191.034,58	205.596,48	210.370,04	212.781,25	223.751,62	
JUMLAH	7.947.737,18	8.429.443,24	8.887.863,37	9.382.289,17	10.198.527,39	10.647.408,00	10.903.735,35	

Sumber : BPS diolah

Sejarah perkembangan industri yang cukup panjang, menjadikan perekonomian Kabupaten Kudus didominasi oleh sektor industri manufaktur. Sumbangan terbesar berasal dari sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau, dalam hal ini lebih spesifik adalah industri rokok/pengolahan tembakau sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Dilihat dari sisi ekonomi, merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kudus karena industri yang ada merupakan industri padat karya. Sebagian besar produksi rokok dibuat dengan tangan, dengan demikian mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Pada tahun 2005, misalnya, jumlah pekerja industri rokok mencapai 71.634 orang (18,2%) dari seluruh pekerja sebanyak 393.626 orang. Hal ini menyebabkan industri rokok memiliki andil yang besar terhadap penerimaan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kudus, keberadaan industri rokok patut dibanggakan. Selain mempunyai nilai tambah yang sangat besar, dimana pada tahun 2006 mencapai Rp.3,97 trilyun (58,81% lebih) dari PDRB sub sektor industri manufaktur sebesar Rp.6,69 trilyun, juga mampu menyerap tenaga kerja 46% dari total pekerja industri manufaktur. Namun demikian harus diakui bahwa rokok tidak baik bagi kesehatan. Badan kesehatan dunia (WHO) bahkan telah menyerukan tentang larangan merokok, pembatasan produksi dan pembatasan kadar maksimum nikotin dan tar dalam rokok. Indonesia sebagai salah satu negara produsen rokok mendapat tekanan dari dunia internasional untuk segera meratifikasi kesepakatan tersebut. Namun, sampai saat ini Indonesia belum menandatangani, karena industri rokok masih menjadi andalan penerimaan negara (cukai) dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, mengingat pemerintah juga berkepentingan melindungi kesehatan masyarakat, maka konsumsi rokok perlu dikendalikan. Beberapa langkah kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok diantaranya; menaikkan Harga Jual Eceran (HJE), menaikkan pajak (cukai), penerapan cukai ganda (perbungkus dan perbatang), bahkan mengeluarkan larangan merokok di tempat umum sebagaimana pernah dilakukan oleh Pemda DKI tahun 2005/2006.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan secara simultan pada tahun 2005/2006, diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

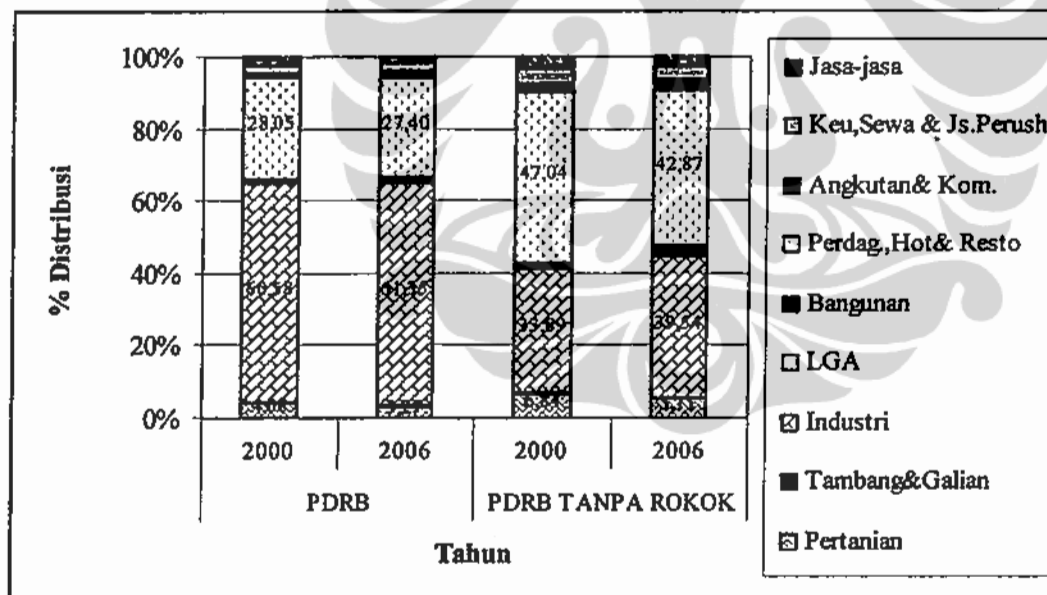
43/PMK.04/2005 yang menaikkan HJE rokok rata-rata 15% berlaku mulai 1 Juli 2005. Belum genap satu tahun, HJE rokok dinaikkan lagi sebesar 10% per 1 April 2006 berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.04/2006. Berdasarkan perhitungan Badan Analis Fiskal Departemen Keuangan (Tjahjaprijadi dan Indarto, 2003), kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 7% akan menurunkan konsumsi semua jenis rokok sebesar 3,62%. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan konsumsi rokok, dan pada gilirannya diharapkan pelaku industri rokok akan menyesuaikan permintaan pasar dengan menurunkan produksi. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Kudus. Sebagai gambaran, pada tahun 2005 produksi rokok mencapai 55.882.200.320 batang, sedangkan tahun 2006 produksinya turun 2,4% menjadi 54.295.472.900 batang. Akibatnya sektor industri manufaktur Kabupaten Kudus tumbuh melambat dan pertumbuhan PDRB yang biasanya di atas 5%, pada tahun 2006 hanya tumbuh 2,02%. Hal lain yang diduga turut mempengaruhi perkembangan industri rokok dan perekonomian Kabupaten Kudus adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang dan jasa, sebagai akibat kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005.

1.2. Perumusan Masalah

Tekanan terhadap industri rokok kedepan akan semakin berat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, dan semakin banyaknya kampanye anti rokok. Pada saat ini peranan industri rokok masih dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun dalam jangka panjang diperkirakan terjadi perubahan, mengingat trend produksi rokok yang selalu meningkat hanya Sigaret Kretek Mesin (SKM), sedangkan untuk jenis produk buatan tangan (SKT) terus menurun. Kondisi ini kemudian direspon oleh pemerintah, meskipun masih sebatas wacana, disampaikan bahwa pada 2015-2020 pemerintah menargetkan stagnasi produk rokok nasional sebanyak 260 miliar batang per tahun, dan akan diterapkan sistim kuota produksi (Tempo : 2008). Saat ini produksi nasional masih di bawah 240 miliar batang per tahun. Dengan demikian, meskipun industri rokok di Kabupaten Kudus masih dominan, namun tidak bisa meningkat. Diperkirakan di masa yang akan datang, daya serap tenaga kerja akan menurun. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan

masyarakat Kabupaten Kudus untuk memulai mengidentifikasi sektor-sektor unggulan selain industri rokok, guna menerapkan strategi perencanaan kebijakan pembangunan yang tepat dimasa datang.

Gambaran sekilas struktur ekonomi Kabupaten Kudus berdasarkan PDRB dengan rokok dan tanpa rokok menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan, sebagaimana Gambar 1.1. Berdasarkan keseluruhan PDRB termasuk industri rokok, pada tahun 2006 perekonomian Kabupaten Kudus didominasi oleh sektor industri 61,35%, diikuti sektor perdagangan 27,40%. Sedangkan berdasarkan PDRB tanpa industri rokok/pengolahan tembakau struktur ekonominya didominasi oleh perdagangan dan industri dengan komposisi cukup seimbang, yaitu 42,87% perdagangan dan 39,54% industri. Kondisi ini memberikan harapan yang baik dan tetap optimis, bahwa di masa yang akan datang Kabupaten Kudus secara ekonomi masih memiliki keunggulan-keunggulan untuk bisa berkembang lebih baik.



Gambar 1.1 : Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Kudus Berdasarkan Total PDRB dengan PDRB Tanpa Rokok (ADHK 2000=100)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu, "Selain industri rokok/pengolahan tembakau, sektor/sub sektor ekonomi apakah yang menjadi unggulan Kabupaten Kudus di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah?"

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengenal sektor/sub sektor unggulan Kabupaten Kudus diluar industri rokok/pengolahan tembakau, dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, yang didasarkan atas suatu analisa ekonomi.

Disamping itu diharapkan dapat memberikan rekomendasi alternatif penyusunan strategi perencanaan pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi berdasarkan sektor/sub sektor ekonomi unggulan Kabupaten Kudus, dimasa yang akan datang.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan pengamatan data awal, struktur ekonomi, dan kondisi lapangan yang ada, diduga bahwa selain industri rokok/pengolahan tembakau, sektor/sub sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Kudus adalah :

- a. Sektor industri pengolahan meliputi sub sektor industri tanpa migas, khususnya industri makanan dan minuman, serta industri kertas dan barang cetakan.
- b. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama Bappeda atau instansi terkait lainnya di dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Bagi penulis merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat berarti, untuk lebih mengenal potensi ekonomi unggulan di daerah tempat bertugas, dan berguna menambah bekal dalam menjalankan tugas.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan atas permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka kajian penelitian difokuskan/terbatas pada daerah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan daerah Provinsi Jawa Tengah. Observasi penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam jangka waktu 2000-2006. Identifikasi dan analisis yang dilakukan bersifat makro dan tidak terfokus pada

hal-hal yang bersifat teknis/mikro dari setiap sektor usaha. Pengertian sektor dalam penelitian ini adalah sektor-sektor usaha dalam PDRB.

1.7. Metodologi Penelitian

Tesis ini menggunakan metode eksploratif dalam menjawab permasalahan dengan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif dalam analisis, untuk mengungkap potensi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB, sehingga dapat teridentifikasi sektor unggulan Kabupaten Kudus. Beberapa alat analisis yang dipakai adalah ; analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*), *Shift-Share*, *Location Quotient (LQ)*, dan untuk merangkumnya dilakukan dengan menggunakan *Teknik Overlay*. Adapun penjabaran operasional dari metodologi penelitian diuraikan dalam Bab IV.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini, disusun dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka, landasan teori yang membahas dasar-dasar teori dan konsep yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, dan teori basis ekonomi.

Bab III menguraikan gambaran umum wilayah Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian, dengan mencantumkan profil daerah ditinjau dari keadaan ekonominya.

Bab IV menjelaskan mengenai metodologi penelitian, terdiri dari metode pengumpulan data dan penjelasan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab V merupakan pembahasan utama dari isi tesis yang mendiskripsikan hasil identifikasi sektor/sub sektor unggulan, dari penggunaan model Tipologi Daerah, *Shift-Share*, *Location Quotient (LQ)*, *Teknik Overlay*.

Bab VI sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely (1989) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya, mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta, untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dan Kuncoro, 2004). Proses yang dimaksud di dalamnya mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Para ahli ekonomi regional mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan industri yaitu lokasi. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan menentukan lokasi yang tepat maka biaya transportasi akan dapat diminimumkan baik untuk mengumpulkan faktor produksi (*input*) maupun untuk memasarkan hasil-hasil produksi (*output*).

Dalam persaingan global yang semakin tajam, industri di suatu negara dituntut untuk mampu menghasilkan *output* secara efisien jika ingin tetap dapat bertahan. Efisiensi dalam produksi dapat dicapai jika sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dikembangkan dengan adanya peran pemerintah ikut campur dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kapabilitas nasional (Porter, 1990). Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Keunggulan komparatif lebih menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah, seperti ; kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain. Sementara itu, keunggulan kompetitif menurut Porter (1990) lebih menekankan efisiensi pengelolaan (manajemen ; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-

sumber tersebut dalam produksi, konsumsi maupun distribusi (Rahardja, 2002). Secara umum, keunggulan komparatif akan menuju keunggulan kompetitif, artinya kepemilikan faktor produksi yang melimpah memungkinkan untuk mencapai kondisi skala ekonomis/efisiensi (*economic of scale*) yang merupakan landasan keunggulan kompetitif. Tetapi keunggulan kompetitif juga dapat diraih tanpa harus memiliki keunggulan komparatif, yaitu ketika suatu daerah berhasil mengelola sumber daya yang sedikit tersebut secara efisien. Di sini peran pengelolaan sangat penting, dan pembangunan yang didasarkan pada keunggulan kompetitif akan lebih berkelanjutan (*sustainable*).

Era baru kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya diterapkan mulai tahun 2001, menempatkan pemerintah daerah pada suatu posisi yang strategis dalam membangun daerah masing-masing. Pembangunan daerah mempunyai sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad, 1999). Untuk menjawab persoalan tersebut, kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, dilakukan dengan memberikan perhatian pada perspektif dan pendekatan konsentrasi spasial, untuk mendorong spesialisasi produk serta meningkatkan efisiensi produktivitas.

Pembangunan regional sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik khusus setiap daerah (Kuncoro 2002). Pembangunan juga harus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat lokal, sehingga akan meningkatkan daya tarik daerah tersebut untuk menarik investor-investor baru menanamkan modalnya, yang pada akhirnya mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dikatakan sebagai persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang diukur menurut harga tetap tahun tertentu (Nopirin, 1996). Besaran ini dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu kriteria untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu negara atau daerah lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode sebelumnya, yang ditunjukkan oleh kenaikan output (PDB atau PDRB) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

Perekonomian yang baik adalah suatu perekonomian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di wilayah yang bersangkutan. Dalam setiap kebijakan ekonomi makro, maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang hendak dicapai dalam suatu perekonomian. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang ditandai adanya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Djojohadikusumo (1994) mengemukakan bahwa disamping itu, pertumbuhan ekonomi juga ditandai dengan adanya laju pertumbuhan pendapatan perkapita dalam arti nyata, persebaran angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya, serta pola persebaran penduduk dalam masyarakat.

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, sebagaimana dikutip oleh (Sukirno, 1985 dan Boediono, 1985) bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, adalah jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Oleh Jhinghan (1999), faktor di atas disebut sebagai faktor ekonomi, sedangkan faktor lain yang cukup berpengaruh dikatakannya sebagai faktor non ekonomi meliputi kondisi sosial budaya, politik dan nilai-nilai moral suatu bangsa.

Pada dasarnya, untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Syafrizal, 1997). Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah pengusahaan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah

yang bersangkutan. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah sangat beragam. Apabila prioritas pembangunan kurang sesuai dengan potensi daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yang selanjutnya mengakibatkan kepincangan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Hill (1989), Kuncoro (1996), dan beberapa ekonom menyatakan, untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dapat digunakan alat analisis tipologi daerah (*klassen typology*). Tipologi Daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama misalnya, pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relative tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan oleh Kuncoro (1996) untuk membagi daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebagai berikut : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (2) daerah maju tetapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (3) daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih

rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Klasifikasi daerah tersebut dapat dilihat dalam bentuk matrik tipologi daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Matrik Tipologi Daerah

PDRB per kapita (Y) Laju Pertumbuhan (Γ)	($Y_i \geq Y$)	($Y_i < Y$)
($\Gamma_i \geq \Gamma$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
($\Gamma_i < \Gamma$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber : Kuncoro, (1996).

Keterangan :

Y = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)

Γ = rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

Γ_i = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i)

Model *klassen typology* dapat pula digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah (Widodo, 2006). Berdasarkan *klassen typology*, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah, sehingga suatu sektor dapat dikelompokkan dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Matrik Tipologi Daerah

Rerata Kontribusi Sektoral thd PDRB Rerata Laju Pertumbuhan Sektoral	$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$
$\Gamma_{SEKTOR} \geq \Gamma_{PDRB}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$\Gamma_{SEKTOR} < \Gamma_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber : Widodo, (2006).

Keterangan :

- Y_{SEKTOR} = PDRB sektor ke i

- Y_{PDRB} = rata-rata PDRB
- Γ_{SEKTOR} = laju pertumbuhan PDRB sektor ke i
- Γ_{PDRB} = laju pertumbuhan PDRB

Hasil klasifikasi dari matrik tersebut dapat diartikan :

- Sektor Prima adalah sektor yang kontribusinya besar dan tumbuh cepat.
- Sektor Potensial adalah sektor yang kontribusinya besar tetapi tumbuh lambat.
- Sektor Berkembang yakni sektor yang kontribusinya kecil tetapi tumbuh cepat
- Sektor Terbelakang yakni sektor yang kontribusinya kecil dan tumbuh lambat.

Hasil pemetaan tipologi daerah di atas sangat tepat digunakan untuk menentukan skala prioritas perencanaan pembangunan menurut periode waktu ; jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Widodo, 2006).

Dalam penelitian lain model tipologi daerah dapat pula digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan indikator pembangunan manusia (HDI) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada prinsipnya analisis tipologi daerah membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, bisa berupa pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dengan HDI, dapat pula pendapatan perkapita dengan HDI, atau pertumbuhan sektor ekonomi dengan kontribusi sektor ekonomi, atau kombinasi dari variabel lainnya. Dengan demikian model tipologi daerah sangat fleksibel, mudah dilakukan penyesuaian dan memungkinkan untuk dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun model ini sangat sensitif terhadap periode waktu.

2.3. Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural (*structural-change theory*) menurut Todaro (2004) memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh.

Sukirno (1985) menyatakan bahwa perubahan struktural ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan

ekonomi, yang disebabkan adanya intensitas kegiatan manusia dan perubahan teknologi. Secara umum Sumodiningrat (1996) menjelaskan bahwa hasil yang mendasar dalam rangka perubahan struktur ekonomi adalah berawal dari langkah-langkah yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Salah satu pendekatan yang sering dipakai untuk mendeteksi perubahan struktur ekonomi adalah analisis *shift-share*. Pada awalnya teknik ini digunakan untuk mengamati perubahan total kesempatan kerja regional dengan kesempatan kerja nasional (Soepono, 1993 ; Hanham dan Shawn, 2000). Perkembangan selanjutnya analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi (kriteria pertumbuhan). Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah studi dengan membandingkannya dengan perekonomian yang lebih luas sebagai referensi (Arsyad, 1999).

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu ; (1) pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan (*national growth effect*); (2) Pergeseran proporsional (*proporsional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan ; (3) Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah/lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh Arsyad (1999) analisis *shift-share* disajikan sebagai berikut :

(Perubahan employment industri daerah = pertumbuhan ekonomi + pergeseran proporsi + pergeseran diferensial).

Keterangan :

Pertumbuhan ekonomi = pertumbuhan *employment* secara nasional

Pergeseran proporsional = rasio pertumbuhan *employment* sektor tertentu - rasio pertumbuhan *employment* nasional. Jika hasilnya positif berarti sektor tersebut tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian nasional, demikian sebaliknya.

Pergeseran diferensial = rasio pertumbuhan *employment* daerah - rasio pertumbuhan *employment* sektor tertentu. Jika hasilnya positif berarti daerah mempunyai daya saing yang kuat.

Soepono (1993), membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau *output*, selama kurun waktu tertentu menjadi tiga pengaruh komponen yang mengukur pertumbuhan yang berbeda di antara wilayah-wilayah. Pengaruh / komponen pertumbuhan itu : (1) laju pertumbuhan nasional (N); (2) bauran industri atau *industri mix* (M); dan (3) pengaruh keunggulan kompetitif (C). Tujuan analisis *shift-share* adalah untuk mengetahui besarnya kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah studi yang didasarkan pada keunggulan kompetitif sektoral. Adapun formulasi yang digunakan untuk analisis *Shift-Share* ini oleh Soepono (1993), sebagai berikut :

Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad \text{atau} \quad D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana :

- $N_{ij} = Y_{ij} \cdot \Gamma_n$ (pengaruh pertumbuhan nasional terhadap sektor i di wilayah j)

- $M_{ij} = Y_{ij} (\Gamma_{in} - \Gamma_n)$ (bauran industri sektor i di wilayah j)

- $C_{ij} = Y_{ij} (\Gamma_{ij} - \Gamma_{in})$ (keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j)

Keterangan :

Y_{ij} = nilai tambah sektor i di wilayah j tahun awal

Y_{in} = nilai tambah sektor i nasional/referensi tahun awal

Y^*_{ij} = nilai tambah sektor i di wilayah j tahun terakhir

Γ_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j

Γ_{in} = laju pertumbuhan sektor i nasional

Γ_n = laju pertumbuhan ekonomi nasional

Kelebihan model *shift share* adalah sederhana dan mudah diaplikasikan, data relatif mudah diperoleh, tetapi relatif cukup mampu menggambarkan perubahan struktur ekonomi yang terjadi, sampai pada sub sektor/sub-sub sektor. *Shift share* juga dapat memisahkan antara kontribusi nasional dengan dampak internal daerah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat berfungsi sebagai alat prediksi, mengingat *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya. Ada data periode waktu tertentu di tengah periode pengamatan yang tidak terungkap. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.

2.4. Analisis Basis Ekonomi

Struktur perekonomian daerah secara sederhana dapat dibedakan atas dua sektor yaitu basis dan non basis (Glasson, 1990). Sektor basis (*basic activities*) adalah kegiatan sektor ekonomi yang mengekspor barang dan jasa ke tempat lain di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bahwa sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri (pasar domestik) dan daerah lain bahkan luar negeri. Sektor tersebut di atas dikatakan sebagai sektor unggulan (Rex, 1997). Sedangkan sektor non basis (*non basic activities*) yaitu kegiatan sektor ekonomi yang hanya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau dikenal dengan sektor non unggulan.

Analisis basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*) (Arsyad, 1999). Untuk mengukur kegiatan sektor basis dan non basis bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral menurut struktur tenaga kerja, struktur produksi dan struktur pendapatan. Metode untuk memilah aktivitas sektor

basis dan non basis dapat dilakukan dengan survei langsung (namun membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit), atau mengasumsikan bahwa beberapa sektor menjadi sektor utama, sedangkan sektor lain hanya bertindak sebagai pendukung (Tarigan, 2005 ; Widodo, 2006). Setelah mengetahui sektor utama daerah, maka *base multiplier* sektor basis kepada perekonomian daerah secara keseluruhan dapat dihitung. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan *base multiplier* yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Base Multiplier} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Pendapatan sektor utama}} \dots\dots\dots(2.2)$$

Studi basis ekonomi regional umumnya berupaya untuk menemukenali aktivitas-aktivitas ekspor wilayah, untuk meramalkan pertumbuhan di aktivitas itu dan untuk mengevaluasi dampak dan kenaikan aktivitas ekspor atas aktivitas lain (Soepono, 2000). Alat analisis yang dapat digunakan untuk mengakomodir hal tersebut antara lain adalah *Location Quotient (LQ)*. Sebagaimana dinyatakan Blakely (1994), bahwa *LQ* membantu untuk mengetahui kapasitas ekspor perekonomian daerah dan tingkat kemampuan dari sektor ekonomi dalam mencukupi kebutuhan sendiri.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan yaitu : (i) Kegiatan industri atau ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan, yang disebut *industry basis*. (ii) Kegiatan industri atau ekonomi yang melayani pasar di daerah studi, yang disebut *industry non basis* atau industri lokal.

Teknik analisis *LQ* merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu, dengan menggunakan pendekatan secara tak langsung atau pemisahan antara kegiatan sektor basis dan non basis. Kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan perlu dikaji ulang, untuk membuktikan kebenaran jawaban tersebut dengan teknik yang lain. Namun demikian, sudah dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam sektor yang diamati.

Logika dasar *LQ* adalah teori basis ekonomi yang intinya, karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar

daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya masuknya arus pendapatan dari luar daerah mendorong kenaikan konsumsi, investasi dan kesempatan kerja di daerah studi, dan seterusnya terjadi efek *multiplier* yang meningkatkan pertumbuhan baik sektor basis maupun non basis. Dengan alasan tersebut, maka sudah semestinya industri basis dikembangkan terlebih dahulu.

Formulasi model *Location Quotient (LQ)* mengacu pada (Bendavid-Val, 1991; Kuncoro 2004), sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Y_{ik} / Y_k}{Y_{ip} / Y_p} \text{ atau } LQ = \frac{Y_{ik} / Y_{ip}}{Y_k / Y_p} \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

LQ = Koefisien *location quotient* Kabupaten Kudus

Y_{ik} = PDRB sektor i pada Kabupaten Kudus

Y_{ip} = PDRB sektor i pada Provinsi Jawa Tengah

Y_k = PDRB Total Kabupaten Kudus

Y_p = PDRB Total Provinsi Jawa Tengah

Kelebihan analisis LQ dalam mengidentifikasi sektor/sub sektor unggulan adalah aplikasinya sederhana, mudah dan tidak memerlukan pengelolaan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan *spread sheet* dari *excel*. Interpretasi analisis LQ tidak rumit, misalnya ; LQ suatu industri di daerah studi adalah 1 (satu), berarti penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari industri sendiri. Atau dapat pula dikatakan peran relatif industri yang bersangkutan dalam daerah sama dengan peran relatif industri yang sejenis dalam perekonomian nasional. Kalau LQ lebih besar dari 1 (satu) berarti daerah tersebut dapat "mengekspor". Sebagai contoh, LQ sektor industri 1,73, artinya $(0,73/1,73) = 42,20\%$ secara teoritis hasil industri dapat "diekspor", sedangkan sisanya 57,80% dikonsumsi daerah sendiri. Kelebihan lainnya, dapat dipakai untuk menganalisis tentang "ekspor–impor" (perdagangan) suatu daerah.

Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat daerah referensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama).

Produktivitas tenaga kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogen) pada setiap sektor (Arsyad, 1999).

Kelemahan analisis *LQ* yaitu : (i) selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah, (ii) tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah berbeda, (iii) bahan keperluan industri berbeda antar daerah, (iv) model menggunakan perekonomian tertutup, dan (v) sensitif terhadap *based aggregate*, artinya meskipun *LQ* suatu sektor tinggi, tetapi jika dilihat pada sub sektor tidak semuanya mempunyai nilai *LQ* tinggi.

Namun demikian pendekatan analisis ini, sangat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, bahwa suatu sektor tertentu menjadi unggulan atau tidak di daerah. Secara umum, teknik ini memberikan suatu hasil perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor daerah yang diteliti, dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah referensi.

2.5. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Dye, 1981; Subarsono, 2006). Konsep tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Berarti pula bahwa kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dilakukan atau tidak dilakukan.

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi menuntut adanya perencanaan yang terpadu antara sektor yang satu dengan sektor yang lain (Widodo, 2006). Pengambil keputusan tidak hanya melihat pengaruh kebijakan sektor tertentu pada perkembangan sektor tersebut, tetapi juga harus melihat pengaruhnya terhadap sektor-sektor yang lain. Pengaruh perkembangan sektor terhadap sektor yang lain bisa positif atau negatif. Pengaruh positif berarti

peningkatan *output* sektor tertentu menyebabkan peningkatan sektor yang lain, dengan kata lain memiliki hubungan komplementar. Sebaliknya pengaruh negatif berarti peningkatan *output* sektor tertentu menyebabkan penurunan *output* sektor yang lain, dikatakan memiliki hubungan substitusi. Adanya hubungan negatif antar sektor harus disikapi dengan bijaksana oleh para pengambil keputusan, untuk mampu memperhitungkan bagaimana kebijakan yang diterapkan pada suatu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya, dan perekonomian makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan penyerapan tenaga kerja.

Paradigma pembangunan tradisional mengedepankan peningkatan yang terus-menerus pada Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita suatu negara. Untuk daerah, berarti difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatan per kapita suatu provinsi, kabupaten/kota. Pandangan tradisional tersebut mulai bergeser sejak 1960, setelah disadari bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tidak mampu mencerminkan manfaat pembangunan secara nyata bagi seluruh masyarakat, karena didapatinya permasalahan kesenjangan sosial, ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan.

Paradigma pembangunan modern yang diserukan oleh beberapa ahli ekonomi mulai menyoroti pembangunan sebagai suatu proses yang multi dimensional. Pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, namun harus pula memperhatikan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa kebijakan pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2004; Todaro, 2004) : *Pertama*, Ketahanan (*sustenance*), yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, Harga diri (*self esteem*), pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. *Ketiga*, *Freedom from servitude* yaitu kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Beberapa strategi pembangunan yang dikemukakan oleh para tokoh ekonomi (Kuncoro, 2004) diantaranya :

- Strategi pertumbuhan dengan distribusi, pada hakekatnya menganjurkan agar pembangunan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan), namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.
- Strategi pemenuhan kebutuhan pokok, dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.
- Strategi *ecodevelopment*, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.
- Strategi pembangunan mandiri, dengan memperluas kerja sama dalam percaturan global.
- Strategi *ethnodevelopment*, agar menjamin hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua warga negara secara adil, tanpa memandang etnis, suku dan ras.

Tabel 2.3 : Peran Pemerintah

Peran	Menanggulangi Kegagalan Pasar			Meningkatkan Pemerataan
Minimal	<i>Menyediakan barang-barang publik murni</i> Pertahanan, Keamanan, Manajemen ekonomi makro, dan Penyediaan fasilitas kesehatan publik.			<i>Melindungi si miskin</i> Program pengentasan kemiskinan, Bantuan bencana.
Antara	<i>Menanggulangi Eksternalitas:</i> Pendidikan dasar Perlindungan lingkungan	<i>Mengatur Monopoli:</i> Peraturan jasa umum Kebijakan anti monopoli	<i>Mengatasi Asimetri Informasi:</i> -Asuransi (jiwa kesehatan, pensiun) -Peraturan keuangan -Perlindungan konsumen	<i>Menyediakan Asuransi Sosial :</i> -Pemerataan pensiun -Dana pensiun -Tunjangan pengangguran
Aktif	<i>Mengkoordinasikan Kegiatan Swasta:</i> Mendukung fungsi pasar Memberikan inisiatif			<i>Redistribusi Asset</i>

Sumber: WB (1997), Kuncoro (2004).

Dalam melaksanakan strategi pembangunan ekonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat berperan sebagai wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989; Kuncoro 2004). Menurut Bank Dunia, peran pemerintah secara umum tertera dalam Tabel 2.3 :

Dalam konteks Indonesia, peran pemerintah setidaknya mencakup “peran minimal” yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap si miskin. Namun bisa saja mengambil peran aktif, seperti mendorong kegiatan swasta dan redistribusi asset.



BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Kabupaten Kudus merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi, keunggulan dan daya saing apabila dapat dikelola dengan baik, efisien, terencana dan konsisten serta berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran secara garis besar, berikut disampaikan uraian tentang kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Kudus.

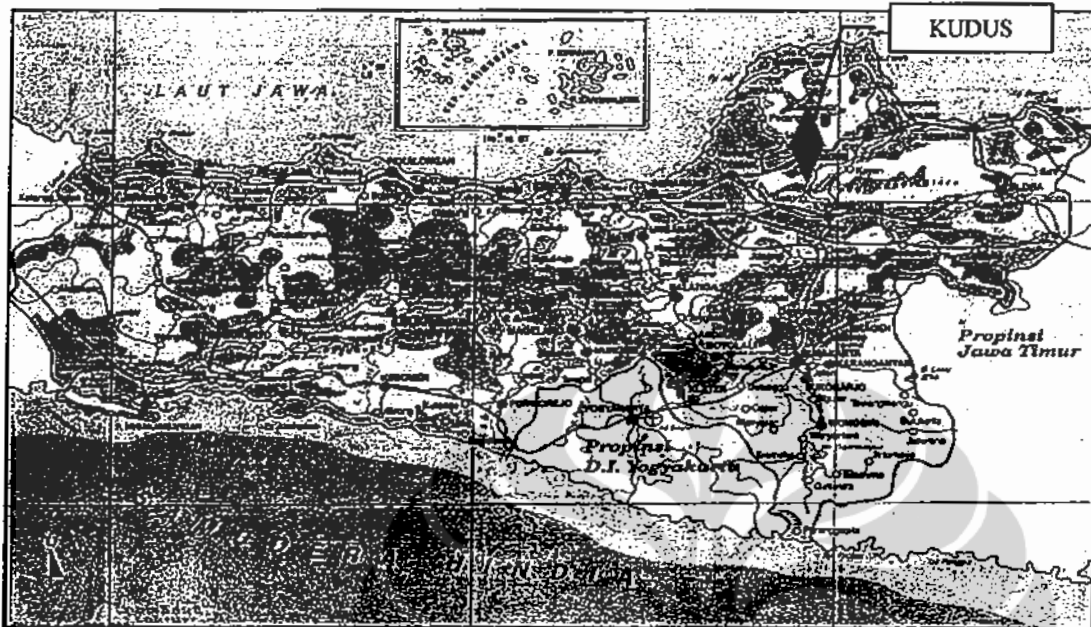
3.1. Geografi

Kabupaten Kudus memiliki letak geografis yang strategis, berada di perlintasan jalur lalu-lintas ekonomi Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) dan di tengah-tengah antara Kabupaten Jepara, Pati, Grobogan, dan Demak. Batas wilayah di sebelah utara Kabupaten Jepara dan Pati, di sebelah selatan Kabupaten Pati dan Grobogan, di sebelah timur Kabupaten Pati dan di sebelah barat Kabupaten Demak. Seluruh wilayah Kabupaten Kudus berupa daratan, di bagian Utara merupakan dataran tinggi gunung Muria, dan bagian Selatan berupa dataran rendah. Ketinggian rata-rata 55m dari permukaan air laut, dengan posisi antara 110°36' dan 110°50' bujur Timur serta 6°51' dan 7°16' lintang Selatan.

Letak strategis Kabupaten Kudus yang berada pada jalur persimpangan antara Semarang-Kudus-Pati; Jepara-Kudus-Grobogan; dan Semarang-Surabaya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan adanya aglomerasi pengembangan ekonomi. Selain itu, Kabupaten Kudus merupakan pusat pertumbuhan bagi pengembangan Kawasan Strategis Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati). Dari lokasi strategis dan fungsi tersebut, maka perekonomian Kabupaten Kudus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tetapi juga dapat memunculkan kesenjangan pembangunan di dalam wilayah Kabupaten Kudus apabila tidak dikelola dengan baik. Adapun posisi Kabupaten Kudus dilihat dalam Peta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Gambar 3.1.

Wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebagai Kabupaten dengan luas terkecil di Provinsi Jawa Tengah, secara administratif dibagi menjadi 9 kecamatan

antara lain Kecamatan Dawe, Gebog, Bae, Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo dan Jekulo.



Gambar 3.1 : Peta Provinsi Jawa Tengah

3.2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kudus secara umum, dapat dikatakan relatif kurang memadai. Luas Kabupaten Kudus tercatat 42.515,64 ha, atau lebih kurang 1,31% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2000 lahan sawah 21.704 ha (51,05%) dan bukan sawah 20.812 ha (48,95%) untuk pemukiman, bangunan, tegalan, fasilitas publik dan hutan rakyat seluas 18.816 ha (44,26%), hutan negara 1.882 ha (4,43%) dan perkebunan nasional/swasta 112 ha (0,26%).

Kondisi sampai dengan tahun 2006 lahan sawah berkurang menjadi 20.580 ha atau menurun rata-rata 0,48% per tahun, karena alih fungsi lahan baik untuk pemukiman, perusahaan, fasilitas publik jalan dan lainnya. Lahan sawah di Kabupaten Kudus dibagi menurut kriteria beririgasi teknis 3.887 ha atau hanya 18,89% dari luas lahan sawah yang ada, dan selanjutnya sawah irigasi setengah teknis 5.920 ha (28,77%), irigasi sederhana 2.874 ha (13,97%), tadah hujan 7.037 ha (34,19). Kondisi ini menggambarkan bahwa lahan sawah yang dapat ditanami sepanjang tahun dan dapat diusahakan secara penuh \pm 47,66%, dan sisanya sangat tergantung dengan musim. Areal sawah berpengairan teknis terluas berada di

wilayah Kecamatan Undaan, kemudian sebagian kecil di Kecamatan Jekulo, Jati dan Gebog dengan komoditas utama tanaman padi dan palawija. Sedangkan untuk lahan yang lain tersebar hampir disemua wilayah kecamatan dengan komoditas utama bervariasi diantaranya padi, tebu, jagung, singkong, palawija dan lain-lain tergantung musim. Di sisi lain, dengan banyaknya lahan sawah tadah hujan, justru menjadi peluang yang bagus bagi para pengusaha untuk memilih lokasi industri, sehingga lahan untuk bangunan / pemukiman persentasenya cukup besar \pm 23% dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun 1,02%.

Tabel 3.1 : Tata Guna Lahan Kabupaten Kudus Tahun 2000 dan 2006

Jenis Lahan	2000		2006		Rtata-rata Perubahan (%)
	Luas Lahan (Ha)	Distribusi (%)	Luas Lahan (Ha)	Distribusi (%)	
1	2	3	4	5	6
1. Sawah	21.704	51,05	20.580	48,41	(0,86)
a. Irigasi Teknis	4.203	9,89	3.887	9,14	(1,25)
b. Irigasi 1/2 Teknis	5.956	14,01	5.920	13,92	(0,10)
c. Irigasi Sederhana	3.536	8,32	2.874	6,76	(3,12)
d. Tadah hujan	7.191	16,91	7.037	16,55	(0,36)
e. lainnya	818	1,92	862	2,03	0,90
2. Bukan Sawah	20.812	48,95	21.936	51,59	0,90
a. Bangunan/Pekarangan	9.594	22,57	10.181	23,95	1,02
b. Tegalan	6.168	14,51	6.172	14,52	0,01
c. Hutan Rakyat	132	0,31	123	0,29	(1,14)
d. Hutan Negara	1.882	4,43	1.882	4,43	-
e. Perkebunan	112	0,26	112	0,26	-
f. lainnya	2.924	6,88	3.466	8,15	3,09
Jumlah	42.516	100,00	42.516	100,00	-

Sumber : BPS dioiah

Suhu udara rata-rata antara 19,1°C - 30,7°C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 69,3% - 87,9%, dan curah hujan rata-rata sebanyak 1.897mm/tahun. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, selama ini Kabupaten Kudus pada musim penghujan senantiasa dihadapkan pada kerawanan bencana banjir, terutama wilayah selatan meliputi Kecamatan Undaan, Mejobo, sebagian dari Kecamatan Jekulo, Jati dan Kaliwungu.

Kabupaten Kudus memiliki potensi wisata alam pegunungan berupa air terjun dan hutan pinus di kawasan gunung Muria. Daya tarik obyek wisata ini cenderung menurun, dimana hutan pinus yang ada kondisinya rusak parah akibat

penjarahan hutan pada tahun 1998/1999. Upaya penanaman kembali sudah dilakukan, tetapi untuk bisa pulih seperti semula masih butuh waktu. Sedangkan wisata alam air terjun, menjadi kurang menarik, diduga akibat debit air yang semakin menurun. Kawasan hutan sebagai sumber mata airnya juga rusak akibat penjarahan. Disamping itu pohon-pohon pelindung dilemang bukit yang sebagian besar pohon kopi, kondisinya cukup memprihatinkan, jumlahnya berkurang karena ditebang dan tidak ada upaya peremajaan. Obyek wisata di Kabupaten Kudus sampai saat ini belum mampu berkembang, kemungkinan karena minimnya investasi, pengelolaan yang belum profesional, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta.

Potensi pertambangan di Kabupaten Kudus relatif terbatas, dan semakin menurun. Jenis pertambangan berupa Tambang Galian C (tanah, batu dan pasir), terdapat di wilayah Gebog, Dawe dan Jekulo. Beberapa lokasi sudah ditutup karena diperkirakan kondisinya membahayakan dan kerusakan lingkungan cukup parah. Pertambangan galian C yang masih aktif sampai dengan sekarang, hanya yang berlokasi di Kecamatan Jekulo.

3.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek dan obyek pembangunan merupakan faktor penting yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan dan kebijakan pemerintah. SDM berkualitas merupakan modal yang dapat menggerakkan pembangunan, sementara yang tidak berkualitas dapat menjadi beban dan menghambat percepatan pembangunan. Potensi SDM dapat dilihat dari kuantitas, tingkat pendidikan, kesehatan dan produktifitasnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2005 berdasarkan laporan BPS Kudus, tercatat sebanyak 736.239 jiwa, terdiri dari 364.074 jiwa laki-laki (49,45%), dan 372.165 jiwa perempuan (50,55%). Rasio perbandingan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan adalah 97,86, artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk setiap satu kilometer persegi mencapai 1.745 jiwa, dengan persebaran tidak merata. Tercatat kecamatan paling padat adalah kecamatan Kota 8.762 jiwa/km², dan yang paling jarang penduduknya kecamatan Undaan 935 jiwa/km².

Jumlah rumah tangga sebanyak 181.169, dan diperoleh rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,10. Angka kelahiran kasar mencapai 12 bayi per 1000 penduduk. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dari tahun 2000-2005 kurang dari 1%.

Tabel 3.2 : Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2005

Tahun	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2005	00-04	31.987	4,34	33.424	4,54	65.411	8,88
	05-09	37.430	5,08	33.463	4,55	70.894	9,63
	10-14	36.546	4,96	32.980	4,48	69.526	9,44
	14-19	37.516	5,10	39.573	5,37	77.088	10,47
	20-24	35.021	4,76	38.111	5,18	73.132	9,93
	25-29	32.164	4,37	34.854	4,73	67.018	9,10
	30-34	30.177	4,10	31.059	4,22	61.236	8,32
	35-39	25.643	3,48	27.368	3,72	53.011	7,20
	40-44	26.640	3,62	25.833	3,51	52.474	7,13
	45-49	20.576	2,79	17.606	2,39	38.181	5,19
	50-54	15.158	2,06	14.664	1,99	29.823	4,05
	55-59	10.685	1,45	12.409	1,69	23.094	3,14
	60-64	9.437	1,28	12.054	1,64	21.491	2,92
	65-69	6.910	0,94	9.022	1,23	15.932	2,16
	70-74	5.470	0,74	5.873	0,80	11.343	1,54
75+	2.714	0,37	3.873	0,53	6.587	0,89	
2005		364.074	49,45	372.165	50,55	736.239	
2004		361.282	49,44	369.472	50,56	730.754	
2003		358.255	49,42	366.714	50,58	724.969	
2002		354.899	49,35	364.294	50,65	719.193	
2001		352.491	49,34	361.953	50,66	714.444	
2000		348.938	49,33	358.391	50,67	707.329	

Sumber : Kudus dalam angka 2006

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 sebagaimana Tabel 3.2 adalah berstruktur penduduk muda dimana kelompok umur antara (00-44 tahun) jumlahnya lebih banyak. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling menonjol adalah umur 15-19 tahun, mencapai 77.088 jiwa atau sama dengan 10,47% dari seluruh penduduk Kabupaten Kudus. Data tersebut juga memberikan gambaran bahwa penduduk usia produktif cukup dominan.

3.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembentuk modal manusia dapat dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diprakarsai *United Nations Development Programme* (UNDP). IPM dapat menjadi alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena dalam IPM terkandung tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita dengan paritas daya beli sebagai representasi standar hidup layak. Berdasarkan laporan BPS Kudus (Agustus 2006), sampai dengan akhir tahun 2005, IPM Kabupaten Kudus menduduki peringkat ke-14 dalam IPM se-Jawa Tengah, dengan nilai 71,35 dari sebelumnya 70,09 pada 2004. Tiga kecamatan dengan nilai IPM tertinggi yaitu Gebog (73,83), Kota (73,56), dan Jati (73,47). Di tingkat paling bawah terdapat Kecamatan Undaan (69,39), Jekulo (69,44), dan Mejobo (69,56).

Tabel 3.3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2005

No	Kecamatan	IPM	PDRB/kapita
1	2	3	4
1.	Kaliwungu	71,29	47.041.135,95
2.	Kota	73,56	66.532.051,64
3.	Jati	73,47	37.808.421,19
4.	Undaan	69,39	7.822.978,16
5.	Mejobo	69,56	9.361.382,54
6.	Jekulo	69,44	13.944.697,56
7.	Bae	71,17	18.288.717,18
8.	Gebog	73,83	23.171.866,66
9.	Dawe	70,07	7.179.828,09
	Kabupaten Kudus	71,35	27.001.528,76

Sumber : BPS Kudus

Tabel 3.3 memberikan gambaran bahwa PDRB perkapita yang tinggi tidak selamanya memiliki hubungan searah dengan nilai IPM, misalnya Kecamatan Gebog yang nilai IPM nya tertinggi, ternyata PDRB perkapitanya hanya Rp.23,17 juta menduduki peringkat ke empat. Sedangkan peraih PDRB perkapita terendah yaitu Kecamatan Dawe sebesar Rp.7,18 juta, terbukti tidak memiliki kualitas manusia yang juga paling rendah dengan peringkat IPM keenam. Dengan demikian Kabupaten Kudus yang memiliki PDRB perkapita tertinggi di Jawa Tengah Rp.27,00 juta, sementara peringkat IPM masih ke .14, menunjukkan

bahwa kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang membutuhkan prioritas penanganan.

3.3.2. Pendidikan

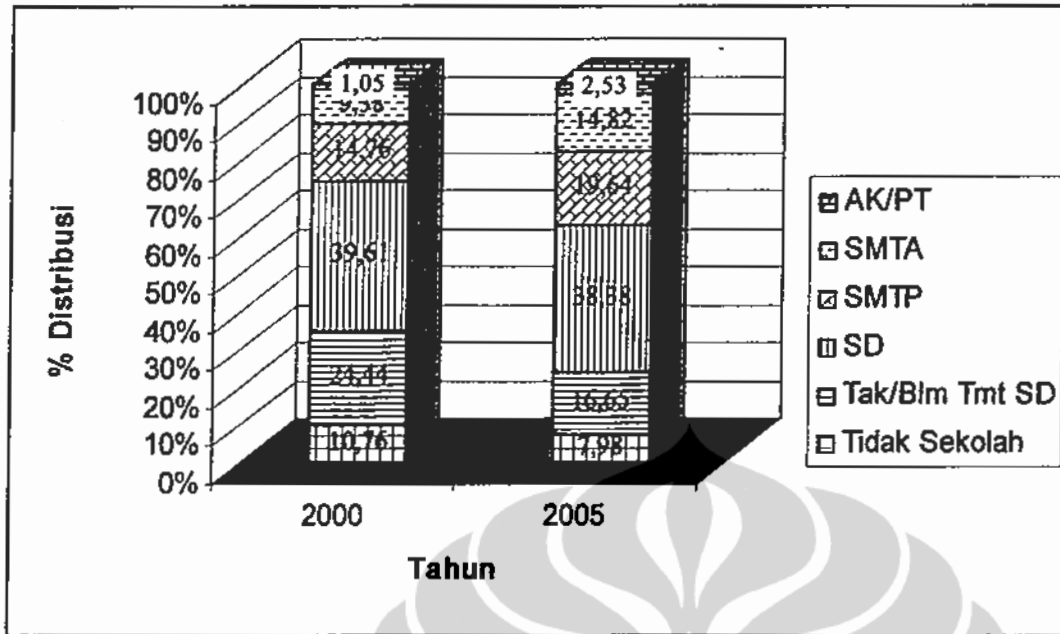
Dilihat dari tingkat pendidikan, Tabel 3.4 menunjukkan terjadi peningkatan kualitas. Berdasarkan data sensus penduduk 2000 dan supas 2005, penduduk umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi) mengalami peningkatan cukup signifikan yakni sebesar 8.310 orang, atau rata-rata pertahun 24,28%, dari 6.845 menjadi 15.155. Disusul kemudian pendidikan SMTA meningkat 28.016 orang (rata-rata 9,20% per tahun) dan SMTP meningkat rata-rata 4,62%. Sedangkan pendidikan SD dan tidak sekolah mengalami penurunan rata-rata -2,08% dan -6,28%.

Meskipun distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan pada tahun 2005 yang paling besar adalah SD yakni 38,38%, dan yang terkecil adalah Akademi/Perguruan Tinggi (AK/PT) 2,53% sebagaimana Gambar 3.2, dapat dipahami bahwa masyarakat Kabupaten Kudus mulai menyadari arti pentingnya pendidikan. Meningkatnya kualitas pendidikan, selain karena meningkatnya kesadaran masyarakat, juga berkat dukungan sarana dan parasarana pendidikan yang tersedia, diantaranya 8 perguruan tinggi dengan 213 dosen, 28 SMTA negeri/swasta, 44 SMTP negeri/swasta, dan 475 SD negeri/swasta yang didukung oleh 6.339 tenaga guru.

Tabel 3.4 : Penduduk Kabupaten Kudus (10 tahun ke atas)
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2000 dan 2005

Tingkat Pendidikan	2000		2005		Perubahan	Rata-rata Pertumb/Thn (%)
	Jumlah	Distribusi (%)	Jumlah	Distribusi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
AK/PT	6.845	1,05	15.155	2,53	8.310	24,28
SMTA	60.891	9,38	88.907	14,82	28.016	9,20
SMTP	95.740	14,76	117.841	19,64	22.101	4,62
SD	257.005	39,61	230.280	38,38	(26.725)	(2,08)
Tak/Blm Tmt SD	158.562	24,44	99.873	16,65	(52.689)	(7,40)
Tidak Sekolah	69.805	10,76	47.895	7,98	(21.910)	(6,28)
Jumlah	648.848	100,00	599.951	100,00	(48.897)	(1,51)

Sumber : BPS Kudus



Gambar 3.2 : Distribusi Penduduk Kabupaten Kudus (umur 10 tahun ke atas) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 2000 dan 2005

3.3.3. Produktivitas Tenaga Kerja

PDRB perkapita (ADHK 2000) Kabupaten Kudus tahun 2005 mencapai Rp.14,48 juta, jauh lebih baik dari tahun 2000 sebesar Rp.11,24 juta. Sedangkan angka ketergantungan penduduk terhadap pekerja pada tahun 2005 tercatat 2,06 artinya diantara 206 penduduk terdapat 100 orang yang bekerja dan 106 orang tidak bekerja. Kondisi ini sedikit lebih buruk dari tahun 2000, dengan angka ketergantungan sebesar 1,93 yang berarti diantara 193 penduduk, terdapat 100 orang yang bekerja dan yang tidak bekerja 93 orang. Angka pengangguran pada tahun 2000 tercatat 13.050 orang dari 377.364 orang angkatan kerja umur 10 tahun ke atas, atau sebesar 3,46%. Pada tahun 2005 angka tersebut meningkat menjadi 21.821 orang dari 415.447 orang angkatan kerja, atau sebesar 5,25%. Dengan demikian selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2005 terjadi peningkatan angka pengangguran.

Kwalitas penduduk juga dapat dilihat dari produktivitasnya, yaitu peranannya dalam menghasilkan *output* di suatu perekonomian. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan penduduk menurut pekerjaan dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam PDRB menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun. Karena ada kendala dalam mendapatkan data penduduk menurut lapangan usaha,

maka yang digunakan adalah data tahun 2000 dan 2005. Data penduduk menurut lapangan usaha yang tersedia dibagi dalam 9 sektor, oleh karena itu digunakan PDRB menurut pendekatan produksi (ADHK 2000=100) tahun 2000 dan 2005, sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5 : Produktivitas Tenaga Kerja (Umur 10 Tahun ke atas) Kabupaten Kudus (ADHK 2000=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2005

Lapangan Usaha	2000			2005			Rata-rata Perubahan /Tahun (%)
	PDRB (juta)	Tenaga Kerja	Produktivitas (juta)	PDRB (juta)	Tenaga Kerja	Produktivitas (juta)	
I	2	3	4=(2/3)	5	6	7=(5/6)	8
1. Pertanian	324.047,17	67.382	4,81	340.618,20	55.303	6,16	5,07
2. Pertambangan & Penggalian	2.377,70	5.853	0,41	4.165,91	1.314	3,17	50,82
3. Industri Pengolahan	4.814.669,27	120.238	40,04	6.557.621,25	155.203	42,25	1,08
a. Rokok/Pengolahan Tembakau	3.208.362,33	59.136	54,25	4.082.041,83	71.634	56,98	0,99
b. Bukan Rokok	1.606.306,94	61.102	26,29	2.475.579,42	83.565	29,62	2,42
4. Listrik, Gas & Air Bersih	23.800,75	466	51,12	33.134,30	635	52,17	0,41
5. Bangunan	63.947,58	35.702	1,79	162.748,06	45.778	3,56	14,70
6. Perdagangan, hotel & restoran	2.229.427,46	74.958	29,74	2.915.874,16	76.026	38,35	5,22
7. Pengangkutan & Komunikasi	133.362,88	18.100	7,37	191.001,05	12.283	15,55	16,11
8. Keuangan, Persewaan & Js Perush	173.880,20	5.049	34,44	229.463,82	2.890	79,40	18,18
9. Jasa-Jasa	182.224,17	36.566	4,98	212.781,25	44.194	4,81	(0,69)
JUMLAH	7.947.737,18	364.314	21,82	10.647.408,00	393.626	27,05	4,39

Sumber : BPS Kudus diolah

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa struktur PDRB dan Tenaga Kerja sektoral tahun 2000 dan 2005 tidak mengalami perubahan, dengan kontribusi terbesar sektor industri pengolahan disusul sektor perdagangan hotel dan restoran, lalu sektor pertanian. Sedangkan yang menyumbang nilai PDRB terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Jumlah tenaga kerja paling sedikit disumbangkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih.

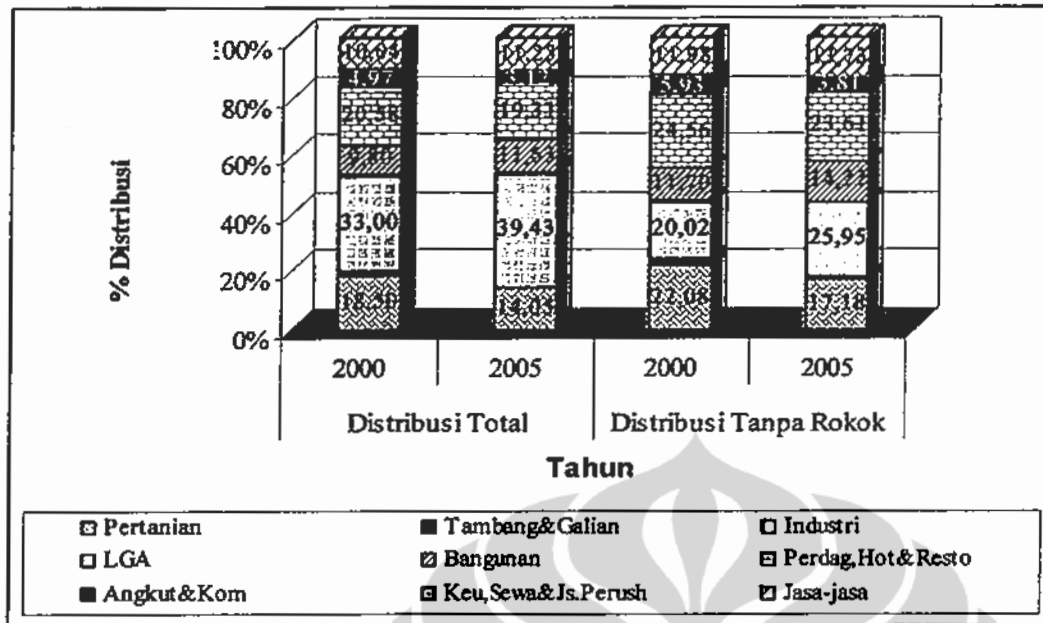
Berdasarkan data PDRB dan tenaga kerja tersebut dapat diketahui seberapa besar produktivitas atau kemampuan dari setiap tenaga kerja menghasilkan nilai tambah (PDRB) menurut sektor masing-masing. Angka produktivitas tenaga kerja sektoral di Kabupaten Kudus pada tahun 2000 dan 2005 didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; dan sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan yang lainnya relatif kecil dan tidak sebanding. Artinya di Kabupaten Kudus secara riil terjadi kesenjangan ekonomi antar sektor yang cukup lebar, akibat selanjutnya dapat diduga bahwa distribusi pendapatan

masyarakat tidak merata. Namun demikian perkembangan dari tahun 2000 sampai dengan 2005 menunjukkan bahwa sektor-sektor yang produktivitasnya rendah mengalami peningkatan cukup berarti. Sektor pertanian dari tahun 2000-2005 rata-rata meningkat 5,07% per tahun, sektor pertambangan dan penggalian meningkat rata-rata 50,82% per tahun, sektor bangunan meningkat rata-rata 14,7% pertahun, dan sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat rata-rata 16,11% per tahun. Secara keseluruhan, sektor-sektor tersebut telah mengalami peningkatan produktivitas relatif cukup signifikan rata-rata 4,39% per tahun. Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, lebih dipengaruhi oleh menurunnya jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut. Produktivitas tenaga kerja yang rendah juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja juga rendah.

Perekonomian Kabupaten Kudus tahun 2000–2005 baik dilihat dari angka PDRB maupun tenaga kerja, didominasi oleh sektor industri pengolahan. Jenis industri rokok/pengolahan tembakau sangat dominan, tercatat menyumbang PDRB dan tenaga kerja terbesar. Sedangkan produktivitas tenaga kerja dalam mencetak nilai tambah (PDRB) jauh melebihi jenis industri pengolahan lainnya, tercatat tahun 2000 mencapai Rp.54,25 juta/tenaga kerja, dan 2005 mencapai Rp.56,98 juta/tenaga kerja.

3.3.4. Struktur dan Upah Tenaga Kerja

Struktur tenaga kerja Kabupaten Kudus tahun 2000 dan 2005, berdasarkan kontribusi sektoral tenaga kerja secara keseluruhan termasuk industri pengolahan tembakau sebagaimana Grafik 3.3 adalah berstruktur industri, perdagangan dan pertanian. Sedangkan dilihat dari kontribusi sektoral tenaga kerja tanpa industri pengolahan tembakau, struktur tenaga kerja Kabupaten Kudus antara tahun 2000 dan 2005 tidak sama. Struktur tenaga kerja tahun 2000 adalah perdagangan 24,56%, pertanian 22,08% dan industri pengolahan 20,02%. Sedangkan tahun 2005 struktur tenaga kerja Kabupaten Kudus didominasi oleh industri pengolahan 25,95%, diikuti sektor perdagangan 23,61% dan pertanian 17,18%.



Gambar 3.3 : Perbandingan Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Distribusi Total (termasuk Industri Rokok) vs Distribusi Tanpa Industri Rokok Tahun 2000 dan 2005

Dari sisi perkembangan penerimaan upah tenaga kerja formal yang bekerja di industri besar/ sedang dari tahun 2000-2005 (Tabel 3.6), terlihat bahwa upah yang diterima tenaga kerja dari tahun 2000-2003 meningkat, namun dari 2003-2005 menurun. Upah tertinggi yang diterima oleh seorang tenaga kerja dalam satu tahun terjadi pada tahun 2003 yaitu mencapai Rp.8,33 juta, atau dalam satu bulan rata-rata mencapai Rp.694.167,-. Namun pada tahun 2004 dan 2005 menurun sehingga upah yang diterima oleh satu orang tenaga kerja pada tahun 2005 hanya mencapai Rp.6,01 juta, atau rata-rata satu bulan Rp.500.833,-.

Tabel 3.6 : Perkembangan Upah Tenaga Kerja Industri Besar/Sedang Kabupaten Kudus Tahun 2000-2005

Tahun	Tenaga Kerja (Orang)	Upah (Juta)	Upah/Naker (Juta)	Pertumbuhan Upah/Naker (%)
1	2	3	4	5
2000	62.970	128.457	2,04	
2001	68.892	230.845	3,35	64,26
2002	71.619	374.446	5,23	56,03
2003	70.308	585.897	8,33	59,39
2004	66.293	495.230	7,47	(10,36)
2005	74.450	447.762	6,01	(19,49)

Sumber : BPS diolah

Penyebab menurunnya penerimaan upah tenaga kerja, kemungkinan dipengaruhi oleh sistem upah Kabupaten Kudus dan menurunnya produksi rokok buatan tangan, baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Klobot/Klembak. Di Kabupaten Kudus, menerapkan sistem upah tenaga kerja untuk industri bukan rokok, disebut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus, dan Upah Minimum Sektor Rokok (UMSR). Misalnya, tahun 2005 UMK Kudus ditetapkan Rp.561.700,-/bulan, yang diperhitungkan menurut jumlah hari kerja. Kemudian UMSR, perhitungannya menggunakan dua model, yaitu; *pertama* UMSR bulanan ditetapkan Rp.590.000,-/bulan yang dihitung menurut jumlah hari kerja. *Kedua* UMSR yang diperhitungkan berdasarkan jumlah rokok yang diproduksi disebut Upah Borongan. Upah borongan ini diperhitungkan dengan ketentuan setiap 1.000 batang rokok dihargai Rp. 9.005,-. Seorang pekerja produksi SKT rata-rata mampu menghasilkan 1000 batang rokok per jam.

Produksi SKT tertinggi tahun 2001 (29.302.710.460 batang), selanjutnya terus menurun dengan rata-rata pertumbuhan minus 6,32% per tahun, sehingga tahun 2005 total produksinya hanya 21.891.303.904 batang. Produksi rokok Klobot/Klembak tertinggi dicapai pada tahun 2000 (72.796.600 batang) dan selanjutnya terus menurun dengan rata-rata pertumbuhan minus 12,73% per tahun sehingga tahun 2005 total produksinya hanya mencapai 26.460.530 batang. Akibatnya kuota produksi rokok untuk setiap tenaga kerja dikurangi sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan upah. Pada tahun 2005, menurut pengakuan pekerja produksi rokok, mereka rata-rata diberi jatah produksi hanya 2.000 batang/hari. Praktis mereka hanya bekerja 2,5 jam sehari, upah yang diterima Rp. 18.010,- maka total sebulan (25 hari kerja) upah yang diterima Rp.450.250,- masih jauh di bawah UMR maupun UMRS bulanan. Mengingat jumlah pekerja industri rokok cukup besar \pm 35% dari seluruh pekerja industri manufaktur, maka hal ini kemungkinan pengaruhnya cukup signifikan.

3.4. Kondisi Umum Ekonomi Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus selama tahun 2006, memiliki struktur ekonomi yang didominasi industri dan perdagangan. Sektor industri sangat dominan dengan

kontribusi lebih dari 61% menurut harga konstan, bahkan dilihat dari harga berlaku mencapai lebih dari 65%.

Tabel 3.7 : Struktur PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2006

Lapangan Usaha	Harga Berlaku	
	PDRB (juta)	Distribusi (%)
1	2	3
1. Pertanian	517.311,99	2,42
2. Pertambangan & Penggalian	7.347,51	0,03
3. Industri Pengolahan	13.992.851,76	65,33
4. Listrik, Gas & Air Bersih	83.444,04	0,39
5. Bangunan	270.997,53	1,27
6. Perdagangan, hotel & restoran	5.332.328,07	24,90
7. Pengangkutan & Komunikasi	323.498,78	1,51
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	419.347,63	1,96
9. Jasa-Jasa	470.201,23	2,20
JUMLAH	21.417.328,54	100,00

Sumber : BPS diolah

Sedangkan dilihat dari data PDRB Kabupaten Kudus (ADHK 2000=100) tahun 2000 dan 2006 sebagaimana Tabel 3.8, struktur ekonomi secara umum tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu berstruktur industri dan perdagangan, dengan kecenderungan bahwa sektor industri semakin menguat. Pergeseran struktur hanya terjadi antara sektor jasa-jasa dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang persentase distribusinya mengalami penurunan paling besar adalah sektor pertanian. Perubahan PDRB secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata 5,41% per tahun, dimana pada tahun 2000 mencapai Rp.7,95 trilyun dan tahun 2006 sebesar Rp. 10,90 trilyun.

Lapangan usaha industri merupakan penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi terhadap PDRB tahun 2006 sebesar 61,35%. Menurut BPS sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan atas jumlah tenaga kerja, untuk industri besar 100 orang atau lebih, industri sedang antara 20 s/d 99 orang tenaga kerja, industri kecil 5 s/d 19 orang dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Tabel 3.8 : PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000 dan 2006

Lapangan Usaha	2000		2006	
	PDRB (juta)	Distribusi (%)	PDRB (juta)	Distribusi (%)
1	2	3	4	5
1. Pertanian	324.047,17	4,08	356.087,48	3,27
2. Pertambangan & Penggalian	2.377,70	0,03	4.443,31	0,04
3. Industri Pengolahan	4.814.669,27	60,58	6.689.910,12	61,35
4. Listrik, Gas & Air Bersih	23.800,75	0,30	34.548,41	0,32
5. Bangunan	63.947,58	0,80	167.298,67	1,53
6. Perdagangan, hotel & restoran	2.229.427,46	28,05	2.987.781,04	27,40
7. Pengangkutan & Komunikasi	133.362,88	1,68	201.682,93	1,85
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	173.880,20	2,19	238.231,77	2,18
9. Jasa-Jasa	182.224,17	2,29	223.751,62	2,05
JUMLAH	7.947.737,18	100,00	10.903.735,35	100,00

Sumber : BPS diolah

Pada tahun 2006 di Kabupaten Kudus terdapat 10.230 industri, terdiri dari 72 industri besar menyerap 71.776 tenaga kerja, dan industri sedang 76 unit menyerap 2.674 tenaga kerja, sedangkan sisanya merupakan industri kecil. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, jumlah unit usaha berkurang 24,12%, namun nilai investasi meningkat 95,64%, dari Rp.2,327 trilyun menjadi Rp.4,553 trilyun, dan total produksinya mencapai Rp.70,357 rupiah lebih, serta terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 12,30%. Menurunnya jumlah unit usaha Tahun 2006, kemungkinan sebagian besar akibat jumlah industri rokok K 1000 (industri kecil dan rumah tangga) menghentikan produksinya, sebagai dampak kenaikan HJE rokok tahun 2005 dan 2006. Industri lainnya yang diperkirakan berhenti memproduksi adalah industri kecil tas, alas kaki dan konveksi/garmen.

Tabel 3.9 : Perkembangan Industri dan Investasi di Kabupaten Kudus
2000-2006

Tahun	Unit Usaha		Investasi	
	Jumlah (unit)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2001	12.865		669.238	
2002	13.063	1,54	2.260.486	237,77
2003	13.132	0,53	2.266.085	0,25
2004	13.346	1,63	2.308.569	1,87
2005	13.482	1,02	2.327.120	0,80
2006	10.230	(24,12)	4.552.694	95,64

Sumber : BPS diolah

Pertumbuhan investasi tertinggi 237,77% pada tahun 2002, sebagian besar kemungkinan berasal dari investasi industri rokok dalam hal ini PT. Djarum Kudus, yang mulai membangun fasilitas produksi di wilayah Kecamatan Bae sampai dengan sekarang. Investasi besar lainnya adalah pembangunan pembangkit listrik (PLTU batubara) di wilayah Kecamatan Jati, berlangsung sampai tahun 2005/2006. Pertumbuhan investasi terbesar kedua terjadi pada tahun 2006, kemungkinan terbesar berasal dari investasi industri rokok PT. Nodjorono Kudus dan pembangunan rumah sakit swasta.

Tabel 3.10 : PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kudus
(ADHK : 2000=100) Tahun 2000 dan 2006

Jenis Industri Pengolahan	2000		2006		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PDRB (juta)	Distribusi (%)	PDRB (juta)	Distribusi (%)	
i	2	3	4	5	7
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	4.814.669,27	100,00	6.689.910,12	100,00	5,64
1. Makanan, Minuman & Tembakau	4.114.868,80	85,47	5.761.927,48	86,13	5,77
(i) Makanan & Minuman	906.506,47	18,83	1.795.791,75	26,84	12,07
(ii) Tembakau	3.208.362,33	66,64	3.966.135,73	59,29	3,60
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	117.837,47	2,45	147.595,32	2,21	3,82
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	29.133,11	0,61	37.910,85	0,57	4,49
4. Kertas & Brg. Cetak	348.765,96	7,24	433.652,77	6,48	3,70
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	37.479,88	0,78	53.119,16	0,79	5,98
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	15.267,51	0,32	21.141,77	0,32	5,58
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	117.639,70	2,44	178.172,16	2,66	7,16
9. Barang lainnya	33.676,84	0,70	56.390,61	0,84	8,97
JUMLAH	4.814.669,27	100,00	6.689.910,12	100,00	5,64

Sumber : BPS diolah

Dilihat dari jenis komoditinya (Tabel 3.10) Kabupaten Kudus hanya mempunyai industri non migas. Industri makanan, minuman dan tembakau masih mendominasi, dengan total kontribusi sebesar 86,13% dari total PDRB sektor industri tahun 2006, disusul industri kertas dan percetakan 6,48%, alat angkut, mesin dan peralatan dengan komoditas utama produk elektronika 2,66%, dan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki dengan komoditas utama produk pakaian jadi memberikan kontribusi 2,21%.

Industri rokok/pengolahan tembakau, meskipun tahun 2000-2006 tercatat memiliki pertumbuhan rata-rata 3,60% (Tabel 3.10), namun distribusi/kontribusi terhadap PDRB sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 66,64% di tahun 2000 menjadi 59,29% di tahun 2006.

Tabel 3.11 : Data Produksi Rokok Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

Th	Sigaret Kretek Tangan		Klobot		Sigaret Kretek Mesin		Jumlah	
	Produksi (Batang)	Pertum (%)	Produksi (Batang)	Pertum (%)	Produksi (Batang)	Pertum (%)	Produksi (Batang)	Pertum (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	27.105.054.530		72.796.600		16.743.880.710		43.921.731.840	
2001	29.302.710.460	8,11	65.110.420	(10,56)	17.549.651.724	4,81	46.917.472.604	6,82
2002	28.274.156.946	(3,51)	53.811.300	(17,35)	16.798.620.652	(4,28)	45.126.588.898	(3,82)
2003	25.116.151.386	(11,17)	48.503.990	(9,86)	21.418.958.760	27,50	46.583.614.136	3,23
2004	24.238.122.006	(3,50)	34.243.060	(29,40)	28.583.179.778	33,45	52.855.544.844	13,46
2005	21.891.303.904	(9,68)	26.460.530	(22,73)	33.964.435.886	18,83	55.882.200.320	5,73
2006	19.918.002.506	(9,01)	17.125.450	(35,28)	34.360.344.944	1,17	54.295.472.900	(2,84)
Rata-rata pertumbuhan		(5,01)		(21,43)		12,73		3,60

Sumber : BPS diolah

Menurunnya konsumsi rokok, menghambat pertumbuhan produksi rokok. Beberapa hal yang diduga mempengaruhi adalah kesadaran masyarakat akan arti penting hidup sehat tanpa rokok, meningkatnya kegiatan kampanye anti rokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal lain yang ikut mempengaruhi diantaranya kebijakan kenaikan harga jual eceran rokok, dan pengenaan cukai ganda, serta adanya kebijakan mengenai larangan merokok di tempat umum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta tahun 2005 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Larangan Merokok di Tempat Umum. Akibatnya pengusaha rokok menurunkan produksinya, sehingga total produksi rokok Kabupaten Kudus pada tahun 2006 turun 2,48% (Tabel 3.11). Maka PDRB industri rokok tumbuh minus 1,94%. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang biasanya di atas 5% per tahun, pada tahun 2006 melambat hanya tumbuh 2,41%, sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus (ADHK : 2000=100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pertanian	7,08	5,54	(5,07)	1,45	(3,42)	4,54	1,58
2. Pertambangan & Penggalan	11,99	7,60	18,16	15,23	6,80	6,66	10,98
3. Industri Pengolahan	6,19	5,77	5,70	8,94	5,32	2,02	5,64
4. Listrik, Gas & Air Bersih	10,88	11,77	2,63	10,29	(0,76)	4,27	6,41
5. Bangunan	21,95	11,95	30,88	23,88	14,97	2,80	17,38
6. Perdagangan, hotel & restoran	5,29	4,45	5,71	9,25	2,98	2,47	5,00
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,15	7,55	8,55	7,31	5,71	5,59	7,14
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,11	6,63	4,50	6,12	5,18	3,82	5,39
9. Jasa-Jasa	2,48	2,30	7,62	2,32	1,15	5,16	3,48
JUMLAH	6,06	5,44	5,56	8,70	4,40	2,41	5,41

Sumber : BPS diolah

Sektor perdagangan menempati urutan kedua dalam menyumbangkan PDRB Kabupaten Kudus tahun 2000-2006, dengan kontribusi lebih dari 27,40% tahun 2006 (Tabel 3.8). Kemajuan usaha perdagangan selama ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana perdagangan yang cukup berkualitas dan dalam kondisi baik, diantaranya berupa 25 unit pasar tradisional, 2 unit mal, dan pasar grosir 1 unit. Kemajuan perdagangan ini, juga ditandai berkembangnya kompleks pertokoan yang dibangun oleh pihak swasta.

Perdagangan ekspor ditinjau dari jenis komoditi dan volume menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Nilai total ekspor tahun 2006 tercatat US\$ 53.110.513,68 dengan volume 16.791 ton. Tiga jenis komoditas ekspor yang terbesar diantaranya ; kertas dan produk kertas 39,72%, rokok kretek 31,79%, dan mebel rotan 8,38%, sedangkan nilai ekspor yang paling kecil adalah hiasan dinding sebesar US\$ 6.666,67 (0,01%). Jenis komoditas ekspor lainnya adalah barang elektronik, *zigarette roller*, dan garmen. Dilihat dari volume ekspor, setelah tahun 2002 perkembangannya cenderung menurun, sedangkan jenis komoditasnya sangat terbatas.

Tabel 3.13 : Realisasi Ekspor Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

Tahun	Volume		Nilai	
	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)	Produksi (US\$)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2000	15.399,32		36.803.280,12	
2001	15.007,54	(2,54)	32.166.736,83	(12,60)
2002	23.833,82	58,81	36.922.760,74	14,79
2003	22.369,70	(6,14)	44.233.585,39	19,80
2004	19.900,95	(11,04)	42.145.963,80	(4,72)
2005	19.211,93	(3,46)	41.264.045,81	(2,09)
2006	16.791,03	(12,60)	53.110.513,68	28,71
Rata-rata pertumbuhan		1,45		6,30

Sumber : BPS diolah

Penyumbang PDRB terbesar ketiga adalah sektor pertanian dengan nilai kontribusi 3,27% tahun 2006 (Tabel 3.8). Produk utamanya adalah tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu. Sedangkan hasil perkebunan terdiri dari tanaman kopi, tebu, dan kapuk randu. Untuk perikanan yang berkembang adalah usaha pembenihan lele dan ikan kolam

pekarangan. Sedangkan peternakan, jenis hewan ternak yang dikembangkan oleh masyarakat adalah ayam pedaging dan petelor, sapi, kerbau dan kambing.

Dengan luas lahan pertanian lebih dari 48,95% luas wilayah Kabupaten Kudus, dan menyerap tenaga kerja terbesar ketiga pada tahun 2006, setelah sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, menunjukkan bahwa kontribusinya terhitung sangat rendah. Budi daya pertanian di Kabupaten Kudus, memang memiliki tingkat ketergantungan terhadap musim dan perubahan kondisi alam yang sangat besar, sehingga pengusahaan lahan pertanian secara efektif setiap tahun rata-rata hanya 9 sampai 10 bulan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa pendapatan petani juga rendah, kehidupan petani sangat rentan dan tidak berkembang.

Nilai kontribusi PDRB sebesar 2,18% tahun 2006 berada pada peringkat ke empat, dibukukan oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sub sektor yang keberadaannya cukup menonjol adalah bank, yang jumlahnya selalu bertambah dari tahun ke tahun baik unit usahanya maupun jenis banknya. Jenis bank yang ada sampai dengan tahun 2006 sebanyak 21. Bank yang membuka unit usaha sampai ke tingkat Kecamatan sebanyak 3 bank, dan yang melakukan program kemitraan dengan desa/kelurahan 1 bank, untuk memfasilitasi pemberian kredit usaha kecil/mikro. Sedangkan kontribusi PDRB sektor ekonomi yang lain relatif kecil, dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Potensi ekonomi yang menonjol dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB di Kabupaten Kudus baik industri manufaktur maupun perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sekaligus modal cukup besar. Produk yang dihasilkan pada umumnya berupa produk barang akhir (*final goods*) yang siap dikonsumsi sehingga volume produksinya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Agar tetap mampu bersaing, dibutuhkan inovasi dan kreativitas untuk selalu dapat menyesuaikan model dan selera konsumen, serta menjaga mutu, meningkatkan kualitas dan harga yang kompetitif.

3.5. Kondisi Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau

Kinerja perekonomian suatu daerah antara lain tercermin dari tingkat pertumbuhan PDRB-nya. Kinerja perekonomian Kabupaten Kudus dapat dilihat dari PDRB yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kudus. Sedangkan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah, merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah. Nilai tambah itu dikelompokkan menurut lapangan usaha menjadi sembilan sektor, kemudian diperinci lagi dalam sub sektor dan sub-sub sektor.

Gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tanpa industri rokok/pengolahan tembakau akan diuraikan dan diperbandingkan menurut pertumbuhan dan struktur ekonomi, sebagai berikut.

3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 – 2006 berdasarkan PDRB (ADHK 2000=100) tanpa industri pengolahan tembakau, secara umum menunjukkan peningkatan di semua sektor. Tabel 3.14 menggambarkan perubahan PDRB Kudus dan Jawa Tengah dalam nilai absolut. Nilai PDRB Kabupaten Kudus tahun 2000 tercatat sebesar Rp.4,739 trilyun, yang kemudian meningkat secara signifikan dari tahun ketahun sehingga pada tahun 2006 mencapai angka Rp.6,969 trilyun, berarti mengalami perubahan sebesar Rp.2,230 trilyun atau setara dengan rata-rata pertumbuhan 6,64% per tahun. Nilai perubahan ini merupakan hasil dari kinerja semua sektor ekonomi, dimana secara riil peningkatan volume terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan yakni Rp.1,149 trilyun, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp.0,758 trilyun, dan sektor bangunan Rp.0,103 trilyun. Namun dilihat dari persentase pertumbuhannya, yang paling besar adalah sektor bangunan yang secara rata-rata tumbuh 17,38% per tahun, disusul sektor pertambangan dan penggalian rata-rata 10,98% per tahun, sektor industri pengolahan rata-rata 9,41% per tahun, dan yang terkecil adalah sektor pertanian rata-rata 1,58% per tahun.

Tabel 3.14 : Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus dan Provinsi Jateng (ADHK 2000=100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Kabupaten Kudus				Provinsi Jawa Tengah		
	2000	2006	Rata-Rata Pertumbuhan/thn (%)	2000	2006	Rata-Rata Pertumbuhan/thn (%)	
	2	3	4	5	6	7	
1. Pertanian	324.047,17	356.087,48	1,58	26.124.205,65	31.002.199,11	2,89	
2. Pertambangan & Penggalian	2.377,70	4.443,31	10,98	1.100.330,84	1.678.299,61	7,29	
3. Industri Pengolahan	1.606.306,94	2.755.774,39	9,41	28.976.446,11	40.592.618,29	5,78	
a. Industri Migas	-	-	-	6.089.596,75	9.941.006,87	8,51	
b. Industri Tanpa Migas	1.606.306,94	2.755.774,39	9,41	22.886.849,36	30.651.611,42	4,99	
1. Makanan dan Minuman	906.506,47	1.827.791,75	12,40	9.630.341,43	14.097.995,17	6,56	
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	117.837,47	147.595,32	3,82	5.381.208,54	6.587.578,14	3,43	
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	29.133,11	37.910,85	4,49	3.905.426,08	4.960.819,05	4,07	
4. Kertas & Brg. Cetakan	348.765,96	433.652,77	3,70	394.760,33	473.883,47	3,09	
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	37.479,88	53.119,16	5,98	1.612.507,83	2.008.846,86	3,73	
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	15.267,51	21.141,77	5,58	973.344,86	1.208.662,38	3,67	
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	94.334,50	120.944,26	4,23	
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	117.639,70	178.172,16	7,16	769.566,85	1.022.307,19	4,85	
9. Barang lainnya	33.676,84	56.390,61	8,97	125.358,93	170.574,90	5,27	
4. Listrik, Gas & Air Bersih	23.800,75	34.548,41	6,41	867.870,50	1.256.430,34	6,36	
5. Bangunan	63.947,58	167.298,67	17,38	5.262.490,31	8.446.566,35	8,21	
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.229.427,46	2.987.781,04	5,00	26.065.270,79	31.816.441,85	3,38	
7. Pengangkutan & Komunikasi	133.362,88	201.682,93	7,14	5.181.707,80	7.451.506,22	6,24	
8. Keuangan, Perswaan & Jasa Perusahaan	173.880,20	238.231,77	5,39	4.340.625,96	5.399.608,70	3,71	
9. Jasa-jasa	182.224,17	223.751,62	3,48	10.070.554,46	15.442.467,70	7,39	
JUMLAH	4.739.374,85	6.969.599,62	6,64	107.989.502,42	143.086.138,17	4,80	

Sumber : Lampiran 2 dan 4 diolah

PDRB tanpa industri pengolahan tembakau Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai Rp.143,086 trilyun, yang berarti dari tahun 2000 meningkat Rp.35,096 trilyun atau rata-rata tumbuh 4,80% per tahun. Perubahan absolut terbesar disumbangkan oleh sektor industri pengolahan yakni Rp.11,616 trilyun, urutan kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp.5,751 trilyun, ketiga sektor jasa-jasa Rp.5,371 trilyun dan pertumbuhan terkecil sektor listrik, gas dan air bersih mencapai Rp.0,388 trilyun. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah sedang mengalami *recovery* dan berangsur membaik setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus rata-rata mencapai 6,64% per tahun dan Provinsi Jawa Tengah 4,80% per tahun. Artinya secara keseluruhan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus lebih cepat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sektor-sektor ekonomi Kabupaten Kudus yang tumbuh lebih cepat dari pada Provinsi Jawa Tengah, tercatat sebanyak 7 sektor, diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan dua sektor lainnya yakni sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, tumbuh lebih lambat.

Pertumbuhan PDRB riil Kabupaten Kudus tanpa industri rokok/pengolahan tembakau cukup stabil, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2004 sebesar 9,07% dan terendah tahun 2006 sebesar 5,04%. Namun perlu diwaspadai karena tren pertumbuhan ekonomi setelah 2004 cenderung menurun, yang dialami oleh semua sektor ekonomi kecuali sektor jasa-jasa, akibatnya pada tahun 2005 dan 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus lebih rendah dari Jawa Tengah.

Tabel 3.14 juga memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan PDRB riil Provinsi Jawa Tengah konsisten meningkat / semakin besar dari tahun ke tahun selama periode pengamatan. Pada tahun 2001 tumbuh 3,56% dan meningkat terus sehingga pada tahun 2004, 2005 dan 2006 angka pertumbuhannya di atas 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Provinsi Jawa

Tengah (Kabupaten/Kota lain) semakin baik, berarti pula ada tantangan baru bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Kudus di masa mendatang.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus (Tabel 3.14), yang mengalami pertumbuhan absolut terbesar sekaligus rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi 12,40% adalah industri makanan dan minuman. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa semua jenis industri manufaktur yang ada di Kabupaten Kudus memiliki pertumbuhan lebih tinggi di banding Provinsi Jawa Tengah. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa kinerjanya lebih baik, dimungkinkan industri-industri tersebut memiliki keunggulan kompetitif, yang dipengaruhi oleh faktor lokasi dan aglomerasi.

Pertumbuhan sektor pertanian baik Kabupaten Kudus maupun Provinsi Jawa Tengah merupakan yang paling kecil. Untuk Kabupaten Kudus rata-rata tumbuh 1,58% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi 7,08% pada tahun 2001 dan terendah -5,07% pada tahun 2003. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah rata-rata tumbuh 2,89% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi 5,33% pada tahun 2004 dan terendah -2,05% tahun 2003. Permasalahan utama sektor pertanian adalah tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap alam dan perubahan iklim. Kegagalan panen seperti yang terjadi tahun 2003 merupakan akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Jepara dan Grobogan, sebagai wilayah aliran waduk Kedungombo, sehingga banyak tanaman pertanian puso.

Kendala pengembangan ekonomi Kabupaten Kudus secara umum meliputi hambatan pemasaran hasil produksi, permodalan, bahan baku, inovasi dan pengembangan, termasuk belum adanya standar kualitas produk dan labelisasi. Hal tersebut dialami oleh hampir semua unit usaha di semua sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan rumah tangga. Hambatan pemasaran, terutama dialami oleh unit usaha kecil dan rumah tangga, karena pemasaran hasil produksi hanya mengandalkan satu pasar grosir, dan beberapa pasar lokal yang ada. Artinya masih berorientasi pada permintaan domestik. Kondisi pasar yang jenuh, penambahan suplai hanya akan menekan harga, sementara harga bahan baku yang sebagian besar diimpor dari daerah lain cenderung naik. Dampaknya pada tahun 2006 industri kecil dan rumah tangga 20% lebih terpaksa gulung tikar. Mengingat perkembangan usaha kecil dan rumah tangga tidak stabil, maka untuk

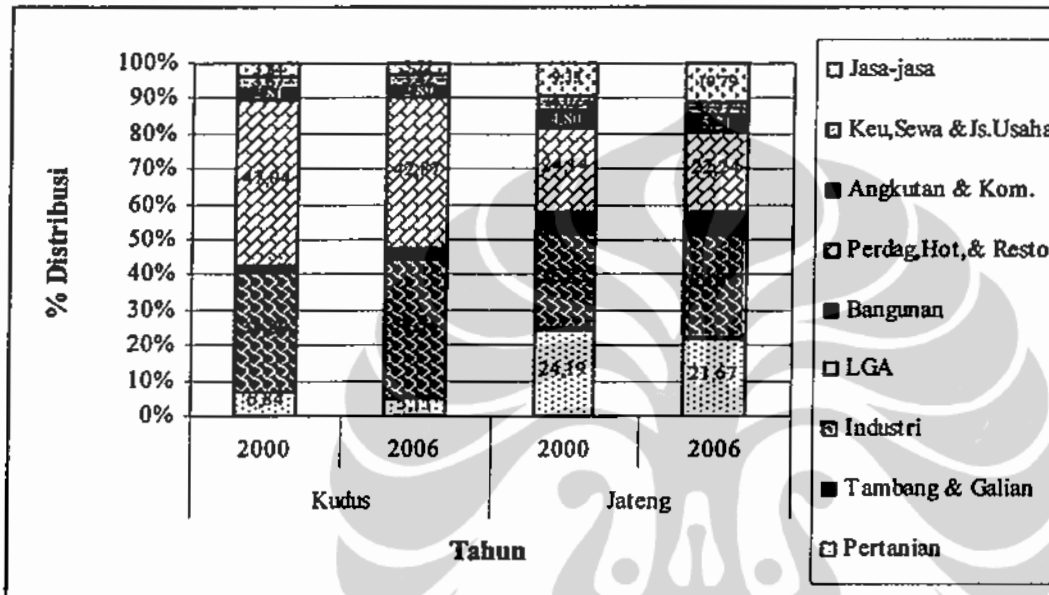
mendapatkan modal usaha tidak mudah, meskipun bank dan lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Inovasi dan pengembangan produk sangat tergantung dari kemampuan dan kreatifitas pengusaha sendiri, sementara kerja sama antar pengusaha masih terbatas pada pemenuhan bahan baku dan kerja sama produksi. Standar kualitas produk kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena sebagian besar produk yang dibuat dan dipasarkan mereknya tidak terdaftar, bahkan banyak yang tidak berlabel. Bagi unit usaha berskala besar, hal-hal tersebut sudah mampu diatasi sendiri karena pada umumnya sudah dikelola secara profesional dan mampu secara mandiri menjual hasil produknya keluar daerah.

3.5.2. Struktur Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau

Perkembangan struktur ekonomi suatu wilayah ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, disebabkan adanya intensitas kegiatan manusia, pengalokasian sumber daya dan perubahan teknologi. Hal ini terjadi dikarenakan dinamika perubahan ekonomi antara sektor yang satu dengan yang lain tidak sama, oleh sebab itu struktur ekonomi daerah menjadi berbeda-beda. Demikian pula kondisi struktur ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah (Gambar 3.4). Perbandingan struktur ekonomi daerah studi dengan daerah referensi berguna untuk mengetahui perbedaan, persamaan, kelebihan dan kekurangan setiap sektor/sub sektor PDRB, dan memperkirakan besar-kecilnya kontribusi sektoral daerah studi terhadap daerah referensi.

Perekonomian Kabupaten Kudus didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan dengan total distribusi keduanya mencapai lebih dari 80%. Sektor-sektor yang lain kontribusinya sangat kecil, bahkan sektor yang memberikan kontribusi PDRB terbesar ke tiga yaitu sektor pertanian hanya mencapai \pm 6%. Dengan demikian dilihat dari PDRB tanpa industri rokok/pengolahan tembakau, Kabupaten Kudus memiliki struktur ekonomi perdagangan dan industri. Apabila dilihat dari kelompok sektor, perekonomian Kabupaten Kudus berstruktur tersier, sekunder, dan primer. Kelompok sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ;

dan sektor jasa-jasa), dan kelompok sektor primer (sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan pengalihan) kontribusinya cenderung menurun. Sedangkan kelompok sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor bangunan; dan sektor listrik, gas dan air bersih) kontribusinya cenderung meningkat. Namun demikian perubahan kontribusi antara tahun 2000 – 2006, tidak berdampak terjadinya perubahan struktur ekonomi.



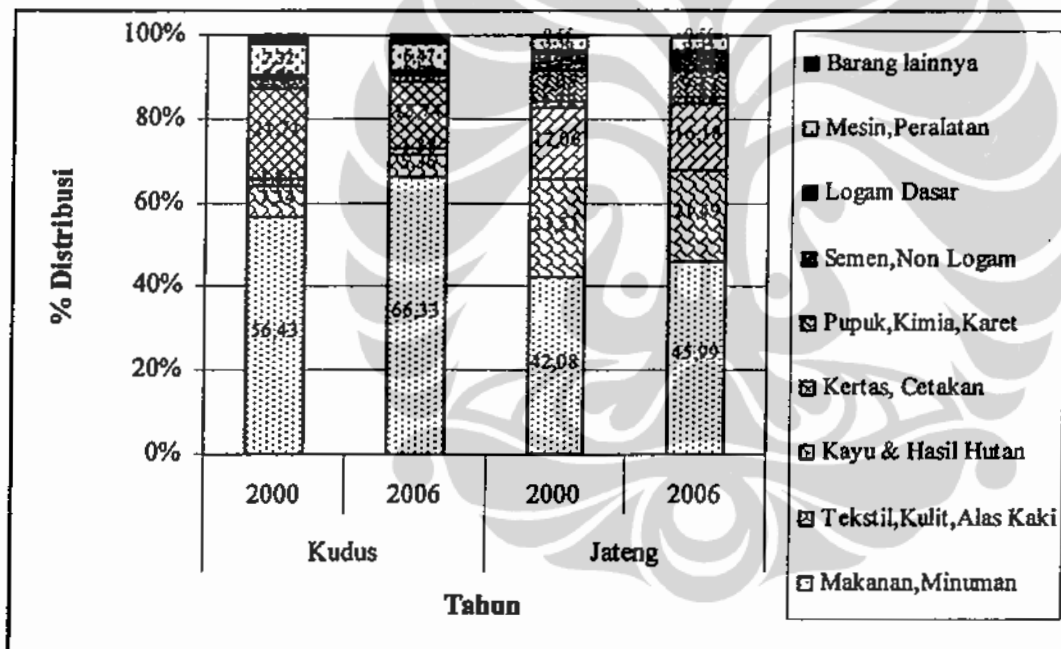
Gambar 3.4 : Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok/ Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2006

Berbeda dengan Kabupaten Kudus, struktur PDRB sembilan sektor Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2000 – 2006 mengalami pergeseran. Tahun 2000 bestruktur industri pengolahan, pertanian dan perdagangan, sedangkan tahun 2006 strukturnya berubah menjadi industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Total distribusi ke tiga sektor tersebut pada tahun 2000 lebih dari 75%, dan tahun 2006 kurang dari 73%. Sektor yang memiliki distribusi cukup signifikan urutan ke empat adalah sektor jasa-jasa \pm 10%. Distribusi tersebut juga menggambarkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah lebih seimbang.

Struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah dilihat dari perkembangan distribusi tahun 2000-2006, menurut kelompok sektor memiliki kesamaan dengan Kabupaten Kudus, namun demikian komposisinya jauh berbeda, dimana angka distribusinya lebih seimbang. Kelompok sektor tersier dan primer proporsi

distribusinya cenderung menurun, sedangkan kelompok sektor sekunder meningkat. Secara umum baik pada tahun 2000 maupun 2006 struktur ekonomi tidak mengalami perubahan.

PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran baik Kabupaten Kudus maupun Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Kondisi tahun 2006 kontribusi masing-masing 40,86% dari 42,87% dan 18,46% dari 22,24%. Sektor pertanian didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, Kabupaten Kudus kontribusinya hanya 3,57% dari 5,11%, dan Provinsi Jawa Tengah 15,46% dari 21,67%. Sektor industri pengolahan didominasi oleh sub sektor industri non migas, Kabupaten Kudus kontribusinya 39,54% dari 39,54%, dan Provinsi Jawa Tengah 21,42% dari 28,37%.



Gambar 3.5 : Persentase Distribusi PDRB Industri Non Migas, Tanpa Industri Rokok Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2006

Perbandingan distribusi sub sektor industri pengolahan tanpa migas antara Kudus dengan Jawa Tengah (Gambar 3.5), adalah sama-sama didominasi oleh sub-sub sektor makanan dan minuman. Kontribusi masing-masing tahun 2006 adalah 66,33% dan 45,99%. Namun strukturnya sangat berbeda, dimana Kabupaten Kudus berstruktur industri makanan dan minuman dengan industri kertas dan percetakan. Sementara Provinsi Jawa Tengah berstruktur industri

makanan dan minuman, dengan industri tekstil, barang kulit dan alas kaki serta industri kayu dan hasil hutan.

3.6. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Peranan pemerintah diperlukan untuk menyediakan dan menjaga agar fasilitas publik dapat berfungsi dan dimanfaatkan maksimal. Infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi Kabupaten Kudus diantaranya jaringan transportasi, listrik, komunikasi, irigasi dan air bersih. Pada saat ini jaringan komunikasi sudah tidak menjadi persoalan, dengan banyaknya pilihan yang disediakan berbagai operator baik pemerintah maupun swasta. Untuk fasilitas yang lain masih membutuhkan peranan pemerintah daerah agar dapat membentuk suatu sistem jaringan yang padu.

3.6.1. Transportasi

Jaringan transportasi jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus secara umum cukup memadai dan dalam kondisi baik. Upaya penambahan, pemeliharaan, peningkatan maupun pelebaran dilakukan secara terencana dan berkesinambungan termasuk menambah jangkauan ke wilayah terpencil yang berada di Kecamatan Undaan, Gebog, Dawe dan Jekulo. Prioritas utama adalah menjaga jalur-jalur ekonomi penting agar tetap dalam kondisi baik, sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar dan efisien. Jumlah ruas jalan pada tahun 2006 seluruhnya 186, dengan panjang total 483,4 km. Jumlah jembatan 103 buah dengan panjang seluruhnya 1.305,5 meter. Kesungguhan pemerintah daerah diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar, melanjutkan program pembangunan jalan lingkar dan pembangunan beberapa jembatan selama lima tahun terakhir. Terwujudnya penambahan ruas jalan diharapkan dapat memperluas atau membuka akses baru, sehingga menambah daya tarik investasi.

Wilayah Kabupaten Kudus yang relatif kecil, memiliki jarak tempuh terjauh dari Utara ke Selatan 23 km, dan dari Timur ke Barat 16 km. Dengan jarak yang relatif pendek, akses keluar dan masuk Kabupaten Kudus menjadi lebih mudah, diperoleh efisiensi lokasi dan skala ekonomi yang besar, sehingga bagi perekonomian sangat menguntungkan. Keuntungan lokasi ini, secara alamiah

membentuk Kabupaten Kudus sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah di sekitarnya, antara lain Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan sebagian Kabupaten Grobogan dan Demak.

Jaringan transportasi, juga didukung oleh dua terminal kargo, satu terminal induk, dua terminal wisata dan lima sub terminal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Keterlibatan pihak swasta diwujudkan dalam penyediaan bahan bakar dengan mendirikan stasiun/pom bensin yang berada di 11 lokasi.

3.6.2. Infrastruktur Lainnya

Jaringan listrik sudah tersedia dan dapat menjangkau sampai ke daerah terpencil di Kabupaten Kudus. Kebutuhan energi listrik bagi daerah industri seperti Kabupaten Kudus sangat besar dan vital. Sebagian besar industri menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang digerakkan dengan energi listrik. Selama ini pasokan listrik untuk rumah tangga dan industri di Kabupaten Kudus tidak ada masalah yang serius. Kondisi kelangkaan energi listrik nasional sekarang ini telah disiasati oleh pihak swasta yang bidang usahanya membutuhkan energi listrik sangat besar. Perusahaan kertas dan percetakan terbesar di Kudus, membangun pembangkit listrik yang diperkirakan mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik seluruh Kabupaten Kudus.

Disamping itu Kabupaten Kudus juga dilalui jaringan transmisi tegangan tinggi Jawa-Bali yang dikelola oleh PLN, termasuk jaringan transmisi PLTU yang berasal dari Kabupaten Jepara. Di Kabupaten Kudus terdapat dua stasiun distribusi listrik yang berlokasi di Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo. Pemanfaatan energi listrik oleh rumah tangga pada tahun 2006 mencapai 50,13% dari total penggunaan. Sedangkan nilai pemakaian seluruhnya baik untuk rumah tangga, industri, kantor, penerangan jalan dan lain-lain adalah sebesar 203,81 milyar rupiah, atau meningkat 10,86% dari nilai pemakaian tahun 2005.

Jaringan irigasi di seluruh Kabupaten Kudus dalam kondisi cukup baik, dimana selama 10 tahun terakhir telah dilakukan normalisasi sungai besar, sedang dan kecil termasuk perbaikan dan pemeliharaan saluran air di wilayah pemukiman dan persawahan. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2007 adalah melaksanakan program pengembangan

dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya, dengan kegiatan utama rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran air.

Berdasarkan arah aliran air, sungai di Kabupaten Kudus dapat dibedakan menjadi tiga yaitu; *pertama* sungai yang berhulu di gunung Muria, terdiri dari 15 sungai besar dan kecil, mengalir dari utara ke selatan, 5 sungai di wilayah Barat bermuara di sungai Wulan, dan 10 sungai di wilayah Timur bermuara di sungai Juwana. *Kedua*, sungai Juwana, berhulu di pegunungan Kapur Utara, mengalir dari selatan ke utara lalu ke timur (Kabupaten Pati). *Ketiga* sungai Wulan, merupakan yang terbesar di Kabupaten Kudus, dengan hulu sungai dari waduk Kedung Ombo, mengalir dari selatan ke utara lalu ke barat (Kabupaten Jepara).

Penanganan sumber daya air di Kabupaten Kudus, cukup sulit, belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Pemandangan bencana banjir yang menggenangi sawah dan pemukiman di Kecamatan Undaan, Mejobo, Kaliwungu dan Jekulo merupakan hal yang biasa terjadi disetiap musim penghujan. Sumber daya air yang berlimpah belum mampu dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana irigasi yang dapat menampung air di musim penghujan, sehingga air meluap tak terkendali. Bahkan pada empat tahun terakhir secara berturut-turut, bencana banjir dari gunung Muria telah melumpuhkan jalur pantura. Intensitas bencana banjir rata-rata kurang dari lima kali selama musim penghujan, dengan lama kemacetan antara lima sampai sepuluh jam. Sebaliknya pada musim kemarau banyak sawah yang kekurangan air dan tidak dapat ditanami.

Penyediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian besar dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, dengan membuat sumur di rumah masing-masing. Penyediaan air bersih oleh pemerintah dalam hal ini PDAM Kudus, baru dapat dilakukan bagi masyarakat kecamatan Kota, Bae, Jati dan sebagian kecil kecamatan Gebog dan Undaan. Sumber air PDAM di ambil dari air bawah tanah yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bae, Gebog dan Jati, dengan jumlah pelanggan mencapai 15.951, terdiri dari rumah tangga, instansi pemerintah, perusahaan, badan sosial dan rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2005 sebanyak 179.778, maka pelayanan air bersih oleh PDAM masih kurang dari 10%. Pada tahun 2006 jumlah pelanggan PDAM meningkat 8,95% menjadi 17.379 pelanggan.

3.7. Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008

Visi Kabupaten Kudus 2003-2008 adalah *“Terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, berkeadilan dan mandiri dalam hubungan yang kondusif, didukung industri, perdagangan dan pertanian yang berwawasan lingkungan”*.

Misi yang akan dilaksanakan terkait dengan bidang ekonomi adalah ;

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberi peluang yang lebih besar dan proporsional kepada pihak swasta.
2. Mengupayakan kemudahan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan disiplin, ketertiban umum dan stabilitas keamanan.
4. Mewujudkan tatanan kawasan modern yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Strategi pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu lima tahun (2003-2008) meliputi bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang tata ruang dan lingkungan hidup, bidang prasarana daerah, dan bidang sosial.

Strategi kebijakan pembangunan bidang ekonomi untuk mewujudkan misi di atas adalah :

1. Mengembangkan dunia usaha, kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong tumbuhnya kerjasama pemasaran, promosi serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
3. Membina dan mengembangkan kelembagaan koperasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kawasan / obyek wisata serta pengelolaannya.
5. Meningkatkan pendapatan daerah, membina dan mengembangkan investasi.
6. Membina dan mengembangkan kesempatan kerja serta meningkatkan pembinaan perlindungan kerja sesuai norma kerja.
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil-hasil tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Adapun program yang dilaksanakan meliputi (i) peningkatan kualitas SDM usaha industri kecil, perdagangan, koperasi dan pariwisata, (ii) penguatan struktur usaha industri kecil, perdagangan dan koperasi, (iii) peningkatan ekonomi kerakyatan, (iv) penanggulangan kemiskinan, (v) pengembangan dan peningkatan produk andalan dan unggulan, (vi) peningkatan kinerja BUMD, (vii) peningkatan kualitas

dan kuantitas informasi bisnis dan promosi, *(viii)* pengembangan penataan kawasan wisata, *(ix)* peningkatan pendapatan daerah, *(x)* pengembangan kerjasama investasi dan peningkatan sarana prasarana investasi, *(xi)* peningkatan kualitas pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal, *(xii)* perlindungan dan pembinaan ketenagakerjaan, *(xiii)* pembinaan, penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima, *(xiv)* peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, *(xv)* intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi pertanian, *(xvi)* peningkatan dan pengembangan agribisnis, agroindustri dan agroforestry / kehutanan.

Strategi kebijakan pembangunan Bidang Prasarana dan Sarana Daerah, yang terdiri dari Sub Bidang Perhubungan dan Sub Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan pengairan.

Adapun program yang dilaksanakan terdiri dari ; *(i)* rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan serta pembangunan jalan dan jembatan, *(ii)* pengembangan fasilitas lalu lintas, *(iii)* perencanaan bidang transportasi, *(iv)* rehabilitasi pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, *(v)* pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya, *(vi)* perencanaan bidang pengairan.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data serta analisa yang dilakukan atas kondisi perekonomian merupakan salah satu langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan teknik pengumpulan dan analisa data yang tepat menjadi penting, karena sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi riil suatu daerah baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, tata ruang wilayah, dan kondisi alam yang dimiliki. Pengetahuan atas kondisi riil ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan, menentukan siapa pelaksananya, dan menentukan usulan program yang paling *feasible*. Selain itu, berguna untuk mendeteksi hambatan yang dihadapi sekaligus mencari jalan keluarnya.

Metode penelitian untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan tanpa industri pengolahan tembakau/rokok di Kabupaten Kudus, akan menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan basis ekonomi (*economic base*). Analisis data dilakukan terhadap sembilan sektor ekonomi kemudian diperinci lagi sampai dengan sub sektor dan sub-sub sektor. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2006 (ADHK 2000=100), dengan pertimbangan data cukup baik, mudah didapat, sangat cocok untuk pendekatan pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi. Disamping itu dilihat dari distribusinya, PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan dengan PDRB harga berlaku, persentase distribusinya tidak berbeda jauh dan memiliki struktur ekonomi yang sama, sehingga masih cukup relevan.

4.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data-data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus maupun BPS Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) menurut lapangan usaha tahun 2000-2006.

2. PDRB Kabupaten Kudus (ADHK 2000=100) menurut lapangan usaha tahun 2000-2006.
3. Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2000-2006.
4. Kabupaten Kudus Dalam Angka tahun 2000-2006.
5. Statistik Industri Manufaktur Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2006.
6. Statistik Industri Manufaktur Kabupaten Kudus tahun 2000-2006.
7. Rencana Strategik Kabupaten Kudus tahun 2003-2008
8. Data lainnya yang diperlukan dan relevan dengan penelitian ini.

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pejabat yang berwenang di Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pertanian Kabupaten Kudus, dan pihak lain yang memiliki kompetensi sebagai sumber informasi penelitian ini. Data primer ini berupa informasi yang diperlukan sebagai bahan pendukung untuk lebih mempertajam analisa dan memperdalam kajian penelitian.

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni; (i) Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang dapat mendukung penelitian yang disarikan dari literatur atau buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. (ii) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendatangi obyek penelitian secara langsung dalam hal ini Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian eksploratif sebagaimana tersebut pada Bab I dipilih karena sangat fleksibel dan tidak terstruktur, sehingga memudahkan pencarian ide serta petunjuk mengenai situasi permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis.

Analisis secara kuantitatif dengan menggunakan berbagai perhitungan matematis dilakukan terhadap data PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah (ADHK : 2000=100) tahun 2000-2006, setelah dikurangi komponen industri rokok/pengolahan tembakau, bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan bukan unggulan. Adapun model pendekatan yang dipilih

adalah analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*), *Shift-Share*, *Location Quotient (LQ)*, dan untuk merangkumnya dilakukan dengan menggunakan *Teknik Overlay*. Komponen industri pengolahan tembakau dikeluarkan karena sesuai dengan penjelasan bab-bab sebelumnya, peranannya dalam perekonomian sangat dominan dan sudah pasti sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kudus. Diharapkan cara ini lebih mampu menggali dan menjelaskan sektor/sub sektor ekonomi unggulan yang lain.

4.2.1. Analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*)

Pada tesis ini, penerapan alat analisis Tipologi Daerah dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Widodo, yang dimodifikasi dengan membandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Kudus dengan Jawa Tengah selama periode penelitian, dan membandingkan kontribusi PDRB sektoral Kabupaten Kudus tahun 2006, dengan rata-rata kontribusi PDRB sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terhadap PDRB sektoral Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, sehingga diperoleh formulasi bentuk matrik Tipologi Daerah sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 : Matrik Tipologi Daerah

Kontribusi PDRB Sektoral thd PDRB Prov Jateng 2006 Rerata Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB	$Y_{ik} \geq Y_{ip}$ (Kontribusi besar)	$Y_{ik} < Y_{ip}$ (Kontribusi kecil)
	$\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip}$ (Tumbuh cepat)	Sektor Prima
$\Gamma_{ik} < \Gamma_{ip}$ (Tumbuh lambat)	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Keterangan :

- Y_{ik} = PDRB sektor i Kabupaten Kudus tahun 2006
- Y_{ip} = Rata-rata PDRB sektor i Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006
- Γ_{ik} = Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i Kabupaten Kudus tahun 2000-2006
- Γ_{ip} = Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i Provinsi Jateng tahun 2000-2006

3.5. Kondisi Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau

Kinerja perekonomian suatu daerah antara lain tercermin dari tingkat pertumbuhan PDRB-nya. Kinerja perekonomian Kabupaten Kudus dapat dilihat dari PDRB yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kudus. Sedangkan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah, merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah. Nilai tambah itu dikelompokkan menurut lapangan usaha menjadi sembilan sektor, kemudian diperinci lagi dalam sub sektor dan sub-sub sektor.

Gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tanpa industri rokok/pengolahan tembakau akan diuraikan dan diperbandingkan menurut pertumbuhan dan struktur ekonomi, sebagai berikut.

3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 – 2006 berdasarkan PDRB (ADHK 2000=100) tanpa industri pengolahan tembakau, secara umum menunjukkan peningkatan di semua sektor. Tabel 3.14 menggambarkan perubahan PDRB Kudus dan Jawa Tengah dalam nilai absolut. Nilai PDRB Kabupaten Kudus tahun 2000 tercatat sebesar Rp.4,739 trilyun, yang kemudian meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2006 mencapai angka Rp.6,969 trilyun, berarti mengalami perubahan sebesar Rp.2,230 trilyun atau setara dengan rata-rata pertumbuhan 6,64% per tahun. Nilai perubahan ini merupakan hasil dari kinerja semua sektor ekonomi, dimana secara riil peningkatan volume terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan yakni Rp.1,149 trilyun, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp.0,758 trilyun, dan sektor bangunan Rp.0,103 trilyun. Namun dilihat dari persentase pertumbuhannya, yang paling besar adalah sektor bangunan yang secara rata-rata tumbuh 17,38% per tahun, disusul sektor pertambangan dan penggalian rata-rata 10,98% per tahun, sektor industri pengolahan rata-rata 9,41% per tahun, dan yang terkecil adalah sektor pertanian rata-rata 1,58% per tahun.

4.2.2. Analisis *Shift-Share*

Perhitungan analisis *Shift-Share* ini, menggunakan notasi model yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar konsisten dengan model lainnya, maka dampak total (D_{ik}) dari ketiga komponen tersebut dapat diformulasi sebagai berikut :

$$D_{ik} = N_{ik} + M_{ik} + C_{ik} \quad \dots\dots\dots(4.1)$$

Dimana :

- D_{ik} = dampak total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.
- N_{ik} = pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
- M_{ik} = pengaruh bauran industri / pergeseran proporsional (*proportional shift*).
- C_{ik} = Pengaruh keunggulan kompetitif (*differential shift*).

Dengan menggunakan *value added* sektor ekonomi (PDRB) sebagai indikator daerah Kabupaten Kudus awal tahun yang diberi simbol Y_{ik} , dan bila *value added* pada akhir jangka waktu periode observasi diberi simbol Y^*_{ik} , maka *value added* yang berubah selama periode observasi adalah :

- Pertumbuhan Daerah (D_{ik}) : selisih antara *output* periode akhir dengan awal.

$$D_{ik} = Y^*_{ik} - Y_{ik} \quad \dots\dots\dots(4.2)$$

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (N_{ik}) :

$$N_{ik} = \left[\frac{Y^*_p}{Y_p} - 1 \right] \cdot Y_{ik} \quad \dots\dots\dots(4.3)$$

dimana :

Y^*_p = PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun akhir

Y_p = PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun awal

Y_{ik} = PDRB Kabupaten Kudus tahun awal

- Pengaruh bauran industri / pergeseran proporsional (M_{ik}) :

$$M_{ik} = \left[\frac{Y^*_{ip}}{Y_{ip}} - \frac{Y^*_p}{Y_p} \right] \cdot Y_{ik} \quad \dots\dots\dots(4.4)$$

- Pengaruh keunggulan kompetitif (C_{ik}) :

$$C_{ik} = Y^*_{ik} - \left[\frac{Y^*_{ip}}{Y_{ip}} \right] \cdot Y_{ik} \quad \dots\dots\dots(4.5)$$

Untuk menginterpretasikan hasil analisis *Shift-Share*, sehingga dapat diketahui kedudukan sektor - sektor ekonomi daerah, menggunakan kriteria yang disampaikan oleh (Amin, 1985) sebagai berikut :

- Bila $M_{ik} = C_{ik} = 0$, (pergeseran netto sama dengan nol), menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sektor i di daerah kabupaten sama besar dengan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional/provinsi.
- Bila $M_{ik} > 0$ dan $C_{ik} > 0$, (positif), artinya sektor i di daerah kabupaten memiliki kedudukan potensial dan memiliki keunggulan kompetitif.
- Bila $M_{ik} < 0$ dan $C_{ik} < 0$, (negatif), artinya sektor i di daerah tidak mampu bersaing, hanya untuk konsumsi daerah sendiri.
- Bila $M_{ik} > 0$ dan $C_{ik} < 0$, menunjukkan bahwa sektor i nasional/provinsi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara tingkat pertumbuhan sektor i daerah/kabupaten lebih rendah dari laju pertumbuhan sektor i nasional/provinsi.
- Bila $M_{ik} < 0$ dan $C_{ik} > 0$, berarti pada level nasional/provinsi sektor i tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tingkat daerah/kabupaten, pertumbuhan ekonomi sektor i lebih cepat dari laju pertumbuhan sektor i nasional/provinsi. Jadi sektor i memiliki reputasi yang baik bagi daerah/kabupaten.

Selanjutnya untuk menentukan kesimpulan umum mengenai kedudukan *share* daerah/kabupaten "*regional share*" dan *share* nasional/provinsi "*nasional share*" dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus digunakan kriteria :

- Bila $N_{ik} < M_{ik} + C_{ik}$, maka faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan *regional share*.
- Bila $N_{ik} > M_{ik} + C_{ik}$, maka faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan *nasional share*.

4.2.3. Analisis Basis Ekonomi

Untuk menentukan sektor basis, non basis digunakan analisis *Location Quotient (LQ)*. Teknik ini bermanfaat untuk membantu menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat kemandirian (*self-sufficiency*) suatu

sektor. Disamping penggunaan modelnya sangat sederhana dan mudah membuat interpretasinya, data yang digunakan cukup tersedia dan mudah didapat, serta secara teoritis dapat digunakan untuk memperhitungkan seberapa besar nilai ekspor dan konsumsi domestik dari sektor basis.

Formulasi model *Location Quotient (LQ)* mengacu pada Bendavid-Val (1991), sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Y_{ik} / Y_k}{Y_{ip} / Y_p} \text{ atau } LQ = \frac{Y_{ik} / Y_{ip}}{Y_k / Y_p} \dots\dots\dots(4.6)$$

Keterangan :

- LQ = Koefisien *Location Quotient* di Kabupaten Kudus
- Y_{ik} = PDRB sektor i pada Kabupaten Kudus
- Y_{ip} = PDRB sektor i pada Provinsi Jawa Tengah
- Y_k = PDRB Total Kabupaten Kudus
- Y_p = PDRB Total Provinsi Jawa Tengah

Kriteria pengukuran LQ sebagaimana dikemukakan oleh Bendavid-Val (1991) adalah :

- *Bila $LQ > 1$ (sektor basis)*; mengindikasikan suatu sektor mengalami surplus, dan bisa diekspor, berarti sektor tersebut lebih berspesialisasi, merupakan sektor unggulan dan prospektif untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di daerah studi.
- *Bila $LQ < 1$ (sektor non basis)*; mengindikasikan suatu sektor mengalami defisit, berarti sektor tersebut tidak berspesialisasi, bukan merupakan sektor unggulan dan kurang prospektif untuk dikembangkan di daerah studi.
- *Bila $LQ = 1$ (self sufficient)*; bahwa suatu sektor hanya mampu mencukupi kebutuhan sendiri, berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut pada daerah studi sama dengan sektor yang sama di daerah referensi.

4.2.4. Teknik Overlay

Teknik *overlay* dalam penelitian ini digunakan untuk menggabungkan semua hasil analisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sektor/sub sektor apa saja yang memenuhi kriteria sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kudus.

Pada dasarnya merupakan teknik pelengkap sebagai rangkuman, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih.

Sebagai rangkuman dari hasil analisis Tipologi Daerah, *Shift Share* dan *Location Quotient*, maka sektor/sub sektor ekonomi yang dinyatakan sebagai unggulan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor i Kabupaten Kudus lebih besar dari pada rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor i Provinsi Jawa Tengah ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip}$)
2. Kontribusi PDRB sektor i Kabupaten Kudus terhadap PDRB sektor i Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari rata-rata kontribusi PDRB sektor i Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terhadap PDRB sektor i Provinsi Jawa Tengah ($Y_{ik} \geq Y_{ip}$).
3. Pergeseran diferensial / *differential shift* sektor i Kabupaten Kudus (C_{ik}) bernilai positif, berarti suatu sektor memiliki daya saing / keunggulan kompetitif dan reputasi yang baik.
4. Koefisien *Location Quotient* PDRB suatu sektor di Kabupaten Kudus lebih besar dari satu ($LQ > 1$), yang berarti sektor tersebut merupakan sektor basis.

Hasil formulasi teknik *overlay* dari kombinasi empat jenis kriteria di atas, secara matematis akan terbentuk empat belas (14) karakteristik dengan kombinasi yang berbeda. Namun dalam penyajian hasil *overlay* agar tidak rumit akan disesuaikan dengan hasil pengolahan data. Hal ini dimaksudkan agar tidak kaku, lebih sederhana dan informasi yang disampaikan mudah dipahami.

BAB V IDENTIFIKASI SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGULAN

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan, sebagaimana umumnya tercermin dari perolehan PDRB selama periode tertentu biasanya oleh BPS ditetapkan selama satu tahun, baik berupa PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Angka-angka PDRB menurut pendekatan produksi yang terbagi dalam sektor/sub sektor ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Apabila dianalisa lebih lanjut, maka akan dapat diketahui kegiatan ekonomi yang menonjol sebagai spesialisasi / sektor basis dan bukan sektor basis. Analisis yang tepat dengan menggunakan data yang baik akan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Analisis data dalam tesis ini didasarkan atas hasil pengolahan data PDRB pendekatan produksi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah (atas dasar harga konstan tahun 2000) menurut lapangan usaha periode 2000 sampai dengan 2006. Mengingat tujuan utamanya untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Kudus di luar industri rokok/pengolahan tembakau, maka pembahasan dalam bab ini, langsung menggunakan data PDRB setelah dikurangi komponen industri rokok/pengolahan tembakau. Pokok bahasan yang akan diuraikan merupakan hasil analisis data PDRB dengan menggunakan alat analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*), *Shift-Share* dan *Location Quotient*, serta hasil rangkuman dengan menggunakan teknik *overlay*.

5.1. Hasil Analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*)

Penggunaan model analisis Tipologi Daerah, dengan mengkombinasikan dua indikator utama yaitu; (i) membandingkan indikator rata-rata pertumbuhan sektoral PDRB antara Kabupaten Kudus dengan Jawa Tengah sebagai sumbu vertikal, dan (ii) membandingkan indikator kontribusi PDRB sektoral antara Kabupaten Kudus dengan rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, terhadap PDRB Jawa Tengah. Maka sektor ekonomi Kabupaten Kudus dapat diklasifikasikan sebagai sektor/sub sektor yang prima, berkembang, potensial dan

terbelakang (Tabel 5.1). Perbandingan ini menunjukkan bahwa berdasarkan total PDRB, Kabupaten Kudus termasuk dalam klasifikasi prima sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 14. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2000-2006 rata-rata 6,64% per tahun, adalah lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah rata-rata 4,74% per tahun. Demikian pula kontribusi PDRB riil Kabupaten Kudus terhadap PDRB Jawa Tengah, secara umum terutama pada tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp.6,97 triliun, adalah lebih besar dari rata-rata kontribusi PDRB riil Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan nilai Rp. 4,09 triliun.

Sementara itu, tidak semua kegiatan ekonomi memiliki pertumbuhan, kontribusi, dan daya kompetitif yang sama. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih jauh kegiatan ekonomi apa saja yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan. Seberapa besar kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing sektor, sub sektor maupun sub-sub sektor.

Ditinjau menurut lapangan usaha, selama periode penelitian tahun 2000-2006, masing-masing sektor/sub sektor ekonomi menunjukkan posisi yang berbeda. Dengan pendekatan Tipologi Daerah yang membandingkan sektor/sub sektor yang sama antara Kabupaten Kudus dengan Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil sebagaimana Lampiran 14, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi Prima adalah sektor/sub sektor PDRB yang memiliki kontribusi lebih besar dan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor/sub sektor yang sama pada daerah referensi. Artinya sektor/sub sektor ini memiliki keunggulan komparatif dan daya kompetitif yang diperkirakan di masa mendatang akan terus dapat berkembang. Sektor PDRB Kabupaten Kudus dalam kategori ini antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Informasi selengkapnya untuk sub sektor dan sub-sub sektor dapat dilihat pada Tabel 5.1

Industri makanan dan minuman di Kabupaten Kudus rata-rata tumbuh 12,40% per tahun (Lampiran 7), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah 6,65% (Lampiran 9). Dari sisi kontribusi ke Provinsi Jawa Tengah, juga lebih besar dibanding rata-rata kontribusi kabupaten/kota di Jawa

Tengah. Tren perkembangan persentase kontribusi dari tahun 2000-2006 cenderung meningkat dari 11,41% menjadi 16,76% (Lampiran 10). Artinya industri makanan dan minuman ini memiliki reputasi yang baik dan relatif memiliki daya saing yang kuat. Jenis industri makanan dan minuman yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah industri tahu, tempe, gula (gula putih dan gula tumbu), penggilingan padi, kecap, sirup, jenang, kacang, roti, kue, kerupuk, susu, minuman ringan dan lain-lain. Dengan pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang besar, diperkirakan prospek pengembangan kedepan masih cukup terbuka.

Industri kertas dan barang cetakan, kontribusi Kabupaten Kudus terhadap Provinsi Jawa Tengah sangat dominan, lebih dari 90%. Misalnya pada tahun 2006 kontribusi Kabupaten Kudus mencapai Rp.433,65 milyar, dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.473,88 milyar. Pertumbuhan rata-rata di atas 3,70% masih lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Namun persentase distribusi industri kertas dan percetakan kepada PDRB Kabupaten Kudus cenderung menurun dari 7,36% di tahun 2000, menjadi 6,22 di tahun 2006. Pangsa pasar industri kertas dan percetakan tidak terbatas hanya di Provinsi Jawa Tengah, namun telah menembus pasar nasional dan internasional.

Industri alat angkut, mesin dan peralatan, sebagian besar keberadaannya untuk melayani kebutuhan perusahaan sendiri dan melayani kebutuhan industri lokal. Alat angkut merupakan bagian yang tidak terpisah dari kepemilikan industri. Artinya hasil produk dari suatu perusahaan sebagian besar diangkut oleh divisi angkutan milik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan industri alat angkut relatif berhubungan erat dengan perkembangan industri pengolahan. Demikian pula industri mesin dan peralatan, keberadaannya lebih didorong oleh adanya permintaan industri lokal, sehingga tetap eksis, memiliki daya saing, mampu berkembang sebagai teknologi tepat guna.

Industri barang lainnya, sebagian besar dihasilkan oleh industri kecil dan rumah tangga, berupa hasil kerajinan. Jenis hasil kerajinan yang berkembang misalnya kerajinan logam, emas dan peralatan rumah tangga, hiasan dinding, cinderamata, kerajinan besi beton dan lain-lain.

Perdagangan besar dan eceran, berkembang pesat lebih dipengaruhi oleh adanya industri besar/ sedang yang ada di Kabupaten Kudus, baik industri rokok, elektronik, kertas dan mebel. Rata-rata pertumbuhan perdagangan besar dan eceran Kabupaten Kudus, dari tahun 2000-2006 sebesar 5,11% masih jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79%. Namun demikian pada tahun 2005 dan 2006 mengalami perlambatan sehingga pertumbuhannya kurang dari 3%. Disamping itu dilihat dari sisi distribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kudus cenderung menurun. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan industri rokok di Kabupaten Kudus, yang melambat di tahun 2005 dan menurun pada tahun 2006.

Sub sektor Komunikasi, berkembang seiring dengan perkembangan industri komunikasi dewasa ini, terutama telepon selular. Pertumbuhan yang cepat lebih dipengaruhi oleh tingkat konsumsi lokal, karena kebutuhan komunikasi masyarakat Kudus cukup tinggi.

Sub sektor jasa swasta, yakni jasa sosial kemasyarakatan Kabupaten Kudus, di luar dugaan memiliki kontribusi yang besar dan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan masyarakat yang diperkirakan signifikan berpengaruh kemungkinan dari kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan/rumah sakit, dan pondok pesantren. Kegiatan pendidikan di Kabupaten Kudus, pada saat ini didukung sekurang-kurangnya delapan (8) perguruan tinggi. Kegiatan pelayanan kesehatan / rumah sakit sekurang-kurangnya didukung oleh tiga (3) rumah sakit besar, yang keberadaannya dapat melayani pasien dari Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Demak. Kegiatan pondok pesantren, tersebar disetiap kecamatan, terutama di Kecamatan Kota Kudus, Jekulo dan Dawe, dengan spesialisasi kitab kuning dan hafalan Al Qur'an.

2. Klasifikasi Potensial adalah sektor/sub sektor PDRB yang memiliki kontribusi besar tetapi pertumbuhannya lambat. Pada dasarnya sektor/sub sektor ini relatif maju, namun perkembangan selama periode pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Artinya sektor/sub sektor ini sedang menghadapi tantangan, sehingga daya saingnya menurun dan kurang kompetitif di bandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa

Tengah. Termasuk kelompok potensial adalah sub sektor listrik, sub sektor restoran, sub sektor bank dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank.

3. Klasifikasi Berkembang adalah sektor/sub sektor PDRB yang memiliki kontribusi kecil, tetapi pertumbuhannya cepat. Pada dasarnya sektor/sub sektor ini mempunyai potensi pengembangan yang relatif besar, tetapi belum sepenuhnya dikelola dengan baik, dan di masa mendatang diperkirakan cukup prospektif, akan terus berkembang. Termasuk kelompok berkembang antara lain sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Informasi mengenai sub sektor dan sub-sub sektor dapat dilihat pada Tabel 5.1.
4. Klasifikasi Tertinggal adalah sektor/sub sektor PDRB yang kontribusinya kecil dan pertumbuhannya lambat, di bawah rata-rata sektor/sub sektor yang sama di daerah referensi, atau bahkan lapangan usaha tersebut sama sekali belum ada di Kabupaten Kudus. Termasuk dalam klasifikasi terbelakang adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Selanjutnya untuk sub sektor/sub-sub sektor yang masih mempunyai kontribusi dan jenis lapangan usahanya ada di Kabupaten Kudus terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor hotel, sub sektor pengangkutan, sub sektor jasa penunjang keuangan, sub sektor jasa perusahaan, sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan. Adapun sub-sub sektor hanya satu yakni angkutan jalan raya. Sedangkan sub sektor dan sub-sub sektor yang tidak punya kontribusi dan lapangan usahanya belum/tidak ada di Kabupaten Kudus adalah sub sektor pertambangan migas, sub sektor pertambangan non migas, sub sektor industri migas, sub sektor logam dasar, besi dan baja. Adapun sub-sub sektornya terdiri dari angkutan rel, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan danau dan sungai.

Hasil klasifikasi ini, dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Artinya informasi mengenai klasifikasi dari setiap sektor/sub sektor akan bermanfaat sebagai dasar untuk menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus.

Tabel 5.1 : Matrik Tipologi Daerah (*Klassen Typology*)
Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor/Sub Sektor PDRB
Kabupaten Kudus terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2006

Kontribusi Pertumbuhan	$Y_{ik} \geq Y_{ip}$ (Kontribusi besar)	$Y_{ik} < Y_{ip}$ (Kontribusi kecil)
	$\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip}$ (Tumbuh cepat)	$\Gamma_{ik} < \Gamma_{ip}$ (Tumbuh lambat)
	Prima	Berkembang
Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Perdagangan, hotel & restoran 3. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalan 2. Listrik, gas & air bersih 3. Bangunan 4. Pengangkutan & Komunikasi
Sub Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri non migas 2. Perdagangan besar & eceran 3. Komunikasi 4. Jasa swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan 2. Penggalan 3. Air bersih 4. Sewa bangunan
Sub-Sub Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan dan minuman 2. Kertas dan barang cetakan 3. Alat angkut, mesin & peralatan 4. Barang lainnya 5. Jasa sosial kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekstil, barang kulit & alas kaki 2. Barang kayu&hasil hutan lainnya 3. Pupuk, kimia & barang dari karet 4. Semen&barang lain bukan logam 5. Jasa penunjang angkutan 6. Hiburan dan rekreasi
	Potensial	Terbelakang
Sektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Jasa-jasa
Sub Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik 2. Restoran 3. Bank 4. Lembaga keuangan tanpa bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanaman bahan makanan 2. Tanaman perkebunan 3. Peternakan 4. Kehutanan 5. Hotel 6. Pengangkutan 7. Jasa penunjang keuangan 8. Jasa perusahaan 9. Pemerintahan umum & pertahanan 10. (Pertambangan Migas) 11. (Pertambangan non Migas) 12. (Industri Migas)
Sub-Sub Sektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan jalan raya 2. (Logam dasar, besi & baja) 3. (Angkutan rel) 4. (Angkutan laut) 5. (Angkutan udara) 6. (Angkutan sungai & danau)

Sumber : Lampiran 14 diolah.

Keterangan : (...) merupakan sektor/sub sektor yang tidak ada di Kudus.

5.2. Hasil Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* ini digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kudus relatif terhadap struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebagai referensi. Perubahan relatif struktur ekonomi Kabupaten Kudus dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah terhadap perekonomian Kabupaten Kudus.
2. Pergeseran proporsional (*proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Kabupaten Kudus yang dipengaruhi oleh sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Nilai pergeseran proporsional lebih besar dari nol menunjukkan bahwa suatu sektor di Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini, mengindikasikan adanya kesamaan spesialisasi relatif suatu sektor antara Kudus dan Jawa Tengah.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*), menunjukkan tingkat kekompetitifan suatu sektor di Kabupaten Kudus dibanding sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Jika nilai pergeseran diferensialnya positif, berarti sektor tersebut di Kabupaten Kudus lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Hasil analisis *Shift-Share* PDRB riil tanpa industri rokok/pengolahan tembakau tahun 2000-2006 (Tabel 5.2), menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Kudus meningkat, mengalami penambahan nilai absolut sebesar Rp.2,23 triliun. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan total (D_t) yang positif pada semua sektor ekonomi dan sebagian besar sub sektor ekonomi, kecuali sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, dan sub sektor hotel. Kenaikan kinerja perekonomian Kabupaten Kudus tiga terbesar diantaranya disumbangkan oleh :

1. Sektor industri pengolahan, sub sektor industri tanpa migas sebesar Rp.1,149 triliun. Tiga besar diantaranya disumbangkan oleh sub-sub sektor industri makanan dan minuman Rp.0,92 triliun, industri kertas dan barang cetakan Rp.0,08 triliun, dan industri alat angkut, mesin dan peralatan Rp.0,06 triliun. Industri makanan dan minuman yang diperkirakan memiliki pangsa pasar ekspor keluar daerah meliputi industri tahu, gula (gula putih dan gula tumbu), penggilingan padi, kecap, sirup, jenang, kacang dan minuman ringan. Pasar hasil industri makanan dan minuman Kabupaten Kudus diperkirakan sebagian

besar masih ditujukan untuk pasar-pasar tradisional. Prospek pemasaran masih sangat terbuka, apabila mampu masuk dalam pasar-pasar modern seperti mol dan swalayan. Ketidakmampuan masuk dalam pasar modern diperkirakan karena sebagian besar produk tidak menggunakan label/merek, belum menerapkan standar kualitas dan standar kemasan.

Industri kertas dan barang cetakan, didominasi oleh perusahaan kertas PT. Pura Group yang memiliki pasar ekspor keluar daerah bahkan keluar negeri. Jenis produk yang dihasilkan berupa bubur kertas, produk kertas dan turunannya, termasuk kertas uang, barang cetakan untuk keperluan perusahaan lainnya, seperti kemasan untuk produk berbagai perusahaan.

Industri alat angkut, mesin dan peralatan, merupakan industri penunjang bagi perusahaan besar dan sedang. Industri alat angkut di Kabupaten Kudus, sebagian besar tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kepemilikan perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar/sedang yang ada di Kabupaten Kudus memiliki divisi angkutan. Industri mesin dan peralatan pada umumnya dimiliki perusahaan untuk melayani kebutuhan perusahaan sendiri. Ada pula bengkel-bengkel yang membuat mesin perontok padi, pengering padi, penggiling tebu, gergaji, mesin cetak untuk genting, ubin dan paving blok. Industri mesin yang ada, memiliki keterkaitan dengan jenis industri yang ada di Kabupaten Kudus, dan keberadaannya memang sangat diperlukan. Dalam perkembangannya, kemudian mampu melayani permintaan dari daerah lain. Jenis industri mesin dan peralatan yang paling menonjol adalah industri elektronika, yang memproduksi berbagai peralatan rumah tangga, seperti televisi, audio, layar monitor, kulkas, mesin cuci dan alat elektronik lainnya. Wilayah pemasaran industri elektronik ini tidak hanya untuk wilayah Kudus, dan Jawa Tengah, tetapi sudah mampu menembus pasar nasional dan internasional.

2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.0,76 trilyun, mayoritas disumbang oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran Rp.0,74 trilyun. Diperkirakan keberadaan perdagangan besar sangat dominan, kemungkinan terkait dengan keberadaan industri yang ada di Kabupaten Kudus, seperti industri rokok, elektronik, kertas dan mebel. Disamping itu, wilayah

Kabupaten Kudus saat ini, masih dijadikan sebagai tempat/domisili kantor perwakilan berbagai perusahaan untuk pemasaran di wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, sebagian Demak dan Grobogan.

3. Sektor bangunan sebesar Rp.0,10 trilyun. Perkembangan sektor bangunan yang cukup besar diperkirakan berhubungan dengan meningkatnya kegiatan perluasan industri rokok, rumah sakit, pembangunan pembangkit listrik, pertokoan, perumahan dan kegiatan pembangunan fasilitas publik jalan, jembatan, dan normalisasi daerah aliran sungai.

Tabel 5.2 : Hasil Analisis *Shift-Share* atas PDRB Tanpa Industri Rokok/
Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus 2000-2006

(dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Nik	Mik	Cik	Dik
I	2	3	4	5
1. Pertanian	105.315,47	(44.808,37)	(28.466,79)	32.040,31
a. Tanaman Bahan Makanan	70.857,23	(28.057,49)	(11.716,17)	31.083,57
b. Tanaman Perkebunan	10.086,98	(6.340,31)	(2.345,12)	1.401,55
c. Peternakan	23.622,04	(6.597,22)	(17.893,18)	(868,36)
d. Kehutanan	68,25	(69,06)	(48,43)	(49,24)
e. Perikanan	680,97	(338,45)	130,27	472,79
2. Pertambangan & Penggalian	772,75	476,18	816,68	2.065,61
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
c. Penggalian	772,75	512,64	780,21	2.065,61
3. Industri Pengolahan	522.050,46	121.891,10	505.525,89	1.149.467,45
a. Industri Migas	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	522.050,46	22.917,13	604.499,86	1.149.467,45
1. Makanan & Minuman	294.615,00	125.926,37	500.743,91	921.285,28
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	38.297,23	(11.880,20)	3.340,82	29.757,85
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	9.468,27	(1.595,41)	904,88	8.777,74
4. Kertas & Brg. Cetak	113.349,09	(43.444,76)	14.982,48	84.886,81
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	12.180,98	(2.968,78)	6.427,08	15.639,28
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	4.961,95	(1.270,85)	2.183,16	5.874,26
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	38.232,95	402,15	21.897,35	60.532,46
9. Barang lainnya	10.944,99	1.201,98	10.566,80	22.713,77
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7.735,25	2.920,73	91,67	10.747,66
a. Listrik	7.533,99	2.984,56	(547,40)	9.971,16
b. Gas	-	-	-	-
c. Air Bersih	201,26	47,58	527,66	776,50
5. Bangunan	20.782,99	17.908,57	64.659,53	103.351,09
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	724.564,90	(232.652,94)	266.441,61	758.353,58
a. Perdagangan Besar & Eceran	686.202,40	(307.610,44)	357.895,61	736.487,57
b. Hotel	501,70	(17,71)	(815,43)	(331,44)
c. Restoran	37.860,81	19.700,34	(35.363,70)	22.197,45
7. Pengangkutan & Komunikasi	43.342,99	15.075,36	9.901,69	68.320,05
a. Pengangkutan	32.250,53	4.887,11	(8.463,36)	28.674,28

1	2	3	4	5
1. Angkutan Rel	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	31.656,44	7.350,22	(10.871,32)	28.135,34
3. Angkutan Laut	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	594,09	(68,74)	13,58	538,94
b. Komunikasi	11.092,46	13.146,08	15.407,22	39.645,77
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	56.511,14	(14.089,58)	21.930,01	64.351,57
a. Bank	26.824,64	25.104,23	(12.366,76)	39.562,11
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	7.526,28	(718,83)	(1.419,98)	5.387,47
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	21.906,88	(9.666,33)	7.074,15	19.314,69
e. Jasa Perusahaan	253,34	(71,38)	(94,67)	87,30
9. Jasa-Jasa	59.222,94	37.980,49	(55.675,98)	41.527,45
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	26.511,57	23.809,30	(44.331,01)	5.989,87
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	26.511,57	23.809,30	(44.331,01)	5.989,87
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-
b. Swasta	32.711,36	(5.507,57)	8.333,79	35.537,58
1. Sosial Masyarakat	26.643,97	(6.257,23)	11.182,20	31.568,94
2. Hiburan & Rekreasi	133,10	(89,83)	58,04	101,31
3. Perorangan & Rumah tangga	5.934,29	(588,69)	(1.478,27)	3.867,33
JUMLAH	1.540.298,91	-	689.925,86	2.230.224,77

Sumber : Lampiran 2 dan 4 diolah.

Sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Kudus memiliki keunggulan kompetitif relatif dibanding sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, yang dapat dilihat dari nilai (C_k) yang positif, kecuali sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor yang kompetitif adalah :

1. Sektor pertambangan dan penggalian; sub sektor penggalian relatif kompetitif, kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya permintaan bahan galian dari sektor bangunan.
2. Sektor industri pengolahan; sub sektor industri non migas (industri makanan dan minuman; tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; barang kayu dan hasil hutan lainnya; kertas dan barang cetakan; pupuk, kimia dan barang dari karet; semen, dan barang lain bukan logam; alat angkut, mesin dan peralatan; dan barang lainnya). Sebagian besar industri di Kabupaten Kudus memiliki daya saing/kompetitif relatif cukup baik, kemungkinan dipengaruhi oleh lokasi yang efisien untuk pemasaran. Kondisi masyarakat terutama perburuhan yang menyediakan tenaga kerja trampil yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dan

secara umum kondisi keamanan relatif kondusif bagi kelangsungan investasi. Jenis komoditas hasil produksi yang kemungkinan relatif kompetitif diantaranya; industri makanan dan minuman (industri gula, beras, sirup, kecap, tahu, tempe, jenang, minuman ringan, kacang, dan roti); industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki (industri pakaian jadi, tas, sepatu dan sandal); industri barang kayu dan hasil hutan lainnya (industri mebel kayu dan rotan, dan ukiran gebyog); industri kertas dan barang cetakan (bubur kertas, kertas dan produk turunannya termasuk kertas uang, kertas berharga lainnya, percetakan kemasan untuk industri); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (industri plastik dan jamu); industri semen, dan barang lain bukan logam (industri paving blok, ubin, seni keramik, batu bata, dan genteng); industri alat angkut, mesin dan peralatan (industri alat angkut perusahaan, mesin, perlengkapan elektronik dan rumah tangga); dan barang lainnya (kerajinan logam, emas, cinderamata, besi beton, dan lain-lain). Permasalahan yang dihadapi industri di Kabupaten Kudus, terutama industri kecil dan rumah tangga adalah keterbatasan pemasaran, modal, dan ketersediaan bahan baku, akibatnya industri kecil rentan terhadap kondisi perubahan ekonomi. Belum adanya standar kualitas, penggunaan merek dan kemasan, mengakibatkan produk dari Kabupaten Kudus tidak dikenal di pasaran, dan hal ini juga diperkirakan turut mempengaruhi nilai tambah yang dihasilkan.

3. Sektor listrik, gas dan air bersih; sub sektor air bersih relatif kompetitif, kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pelanggan PDAM seiring dengan perkembangan perumahan dan pembangunan kompleks pertokoan. Disamping itu tingkat pelayanan PDAM relatif masih terbatas, baru mencapai $\pm 10\%$ dari potensi yang ada baik rumah tangga, perkantoran, fasilitas publik dan perusahaan.
4. Sektor bangunan relatif kompetitif, kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan perluasan industri rokok, rumah sakit, pembangunan pembangkit listrik, pertokoan, perumahan dan kegiatan pembangunan fasilitas publik jalan, jembatan, dan normalisasi daerah aliran sungai.
5. Sektor perdagangan, hotel dan restoran; sub sektor perdagangan besar dan eceran relatif kompetitif, diperkirakan dipengaruhi keberadaan perdagangan

besar sangat dominan, terkait dengan keberadaan industri yang ada di Kabupaten Kudus, seperti industri rokok, elektronik, kertas dan mebel. Disamping itu, wilayah Kabupaten Kudus saat ini, masih dijadikan sebagai tempat/domisili kantor perwakilan berbagai perusahaan untuk pemasaran di wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, sebagian Demak dan Grobogan. Untuk perdagangan eceran masih mengandalkan pasar tradisional yang terdiri dari 1 pasar grosir dan 25 pasar tradisional yang melayani masyarakat lokal. Sementara itu hotel di Kabupaten Kudus relatif tidak berkembang, kemungkinan karena jarak yang relatif dekat dengan Kota Semarang. Disamping itu jumlah hotel relatif sedikit, dan kurangnya dukungan fasilitas angkutan umum diperkirakan ikut menghambat perkembangan perhotelan di Kabupaten Kudus.

6. Sektor pengangkutan dan komunikasi; terutama sub sektor komunikasi relatif cukup kompetitif, kemungkinan lebih dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Perkembangan yang cukup menonjol adalah penggunaan telepon selular yang ditandai dengan banyaknya toko/kios layanan telepon.
7. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sub sektor sewa bangunan relatif kompetitif, kemungkinan dipengaruhi oleh kegiatan sektor perdagangan yang menyewa bangunan untuk mendukung pemasaran, baik untuk perkantor, penjualan maupun pergudangan.

Untuk melihat sub sektor/sub-sub sektor yang kompetitif di Kabupaten Kudus, informasi selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.2.

Sementara itu, *output* yang dihasilkan dari bauran industri (*industry mix*) dalam perekonomian Kabupaten Kudus, sebagai hasil interaksi antar kegiatan industri, dimana ada aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain yang serupa dengan aktivitas sektor di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar menunjukkan nilai positif. Nilai *proportional shift* (M_k) positif, menunjukkan bahwa dari sisi pertumbuhan, sektor/sub sektor ekonomi tersebut merupakan unggulan di Provinsi Jawa Tengah. Apabila pergeseran diferensial (C_k) juga positif berarti Kabupaten Kudus memiliki unggulan/spesialisasi relatif yang sama. Sebaliknya nilai (M_k) negatif menunjukkan bahwa kegiatan sektor/sub sektor

ekonomi tersebut dari sisi pertumbuhan bukan unggulan di Provinsi Jawa Tengah, karena pertumbuhannya lebih lambat dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Apabila pergeseran diferensial (C_k) positif maka Kabupaten Kudus memiliki keunggulan/spesialisasi relatif sektor/sub sektor yang berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah. Artinya pertumbuhan suatu sektor di Kabupaten Kudus lebih cepat dari pada pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, dan lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Adapun sektor ekonomi yang *proportional shift* nya positif di Kabupaten Kudus, adalah :

1. Sektor pertambangan dan penggalian.
2. Sektor industri pengolahan.
3. Sektor listrik, gas dan air bersih.
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi.
5. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
6. Sektor jasa-jasa.

Untuk melihat dampak bauran industri pada sub sektor/sub-sub sektor di Kabupaten Kudus, informasi selengkapnya lihat kolom tiga (M_k) Tabel 5.2.

Satu hal yang menarik dari pengaruh bauran industri (M_k) adalah sektor perdagangan, yang memiliki nilai negatif paling besar (-0,23 trilyun rupiah). Nilai ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Artinya sektor perdagangan antara tahun 2000-2006 bukan spesialisasi dari perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Nilai negatif yang besar mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Kudus lebih dipengaruhi oleh *share* kegiatan ekspor ke daerah lain baik lingkup Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), secara teoritis menunjukkan bagaimana pengaruh relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah terhadap perekonomian Kabupaten Kudus. Terlihat bahwa nilai *national growth effect* (N_k) positif pada setiap sektor/sub sektor ekonomi dengan total nilai *output* Rp.1,54 trilyun. Besarnya angka *national share* (N_k) jika dibandingkan dengan besarnya angka *regional shift* (S_k) akan dapat memberikan petunjuk mengenai faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi. *Regional shift* merupakan

hasil penjumlahan dari *proportional shift*/bauran industri (M_{ik}) dengan *differential shift* (C_{ik}). Apabila (N_{ik}) lebih besar dari (S_{ik}), maka faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah *national share*, dan sebaliknya jika (N_{ik}) lebih kecil dari (S_{ik}), maka faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah *regional share*.

Berdasarkan nilai total (Tabel 5.2), mengindikasikan bahwa secara toritis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus secara keseluruhan, relatif dipengaruhi oleh *share* Provinsi Jawa Tengah. Dalam arti, jika hubungan kegiatan ekonomi Kabupaten Kudus hanya sebatas dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam kenyataan hubungan kegiatan ekonomi Kabupaten Kudus dengan daerah lain, baik ekspor – impor bisa sampai dengan tingkat nasional bahkan luar negeri. Maka nilai (N_{ik}) sebesar Rp.1,54 trilyun dibanding nilai (S_{ik}) sebesar Rp.0,69 trilyun, memberikan petunjuk bahwa kemungkinan besar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus, lebih didorong oleh besarnya nilai ekspor keluar daerah. Semakin besar nilai ekspor, mengindikasikan bahwa *share* pertumbuhan ekonomi semakin dipengaruhi oleh daerah lain yang lingkungannya lebih luas, baik provinsi, nasional maupun internasional/luar negeri.

Namun demikian masih ada sektor/sub sektor yang pertumbuhannya lebih ditentukan oleh *share* dari Kabupaten Kudus sendiri (*regional share*) atau dengan kata lain ($N_{ik} < S_{ik}$), terdiri dari ; sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Sub sektor penggalian, sub sektor industri tanpa migas (industri makanan dan minuman, dan industri barang lainnya), sub sektor air bersih, dan sub sektor komunikasi. Sektor/sub sektor ini relatif lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat sendiri, bahkan seperti sektor bangunan dan sektor air bersih hanya untuk konsumsi lokal Kabupaten Kudus. Industri makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat Kabupaten Kudus, sebagian besar bersifat *non durable* sehingga jangkauan pemasarannya relatif terbatas untuk daerah sendiri dan Kabupaten lain yang terdekat. Industri barang lainnya sebagian besar merupakan hasil kerajinan seperti pandai besi, anyaman bambu, mainan anak-anak, merangkai besi beton dan lain-lain.

5.3. Hasil Analisis Basis Ekonomi

Analisis *Location Quotient (LQ)* yang diaplikasikan pada PDRB, pertamanya bermanfaat untuk menentukan sektor/sub sektor termasuk ke dalam kategori ekspor (basis) atau ke dalam sektor lokal (bukan basis). Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah, jika suatu daerah lebih berspesialisasi pada suatu produk, maka daerah tersebut akan mengekspor produk tersebut ke daerah lain di dalam wilayah referensi. Diasumsikan pula bahwa perekonomian merupakan sebuah perekonomian tertutup.

LQ memiliki fungsi membantu menyoroti secara relatif ketidakefisienan daerah dalam kegiatan ekonomi. Membantu dalam memfokuskan pada barang-barang pengganti atau produk-produk impor potensial dengan perluasan ekspor potensial. Menyediakan suatu indikasi dari industri yang perlu dipelajari lebih lanjut. *LQ* diketahui membantu kerangka investigasi dari model analisis lain, salah satu diantaranya adalah *Shift Share*.

Dengan menggunakan analisis *LQ*, diketahui gambaran secara kasar beberapa kegiatan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2000-2006, yang bisa dijadikan sebagai sektor/sub sektor ekonomi unggulan/ basis. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio masing-masing sektor/sub sektor ekonomi yang lebih besar dari satu, lihat Tabel 5.3. Untuk indeks *LQ* sama dengan satu atau lebih, mengandung pengertian bahwa penduduk Kabupaten Kudus dapat memenuhi kebutuhan akan suatu barang dari hasil industri sendiri. Adapun sektor basis tersebut terdiri dari :

1. Sektor industri pengolahan dengan indeks *LQ* rata-rata 1,31.
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan indeks *LQ* rata-rata 1,98.

Sedangkan sub sektor basis yang teridentifikasi adalah :

1. Sub sektor industri tanpa migas dengan indeks *LQ* rata-rata 1,70.
2. Sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan indeks *LQ* rata-rata 2,24.
3. Sub sektor bank dengan indeks *LQ* rata-rata 4,5.

Adapun sub-sub sektornya terdiri dari sub-sub sektor makanan dan minuman dengan indeks *LQ* rata-rata 2,40; kertas dan barang cetakan 18,87; alat angkut, mesin dan peralatan 3,60; barang lainnya 6,82; serta sub-sub sektor jasa sosial kemasyarakatan 2,23.

Tabel 5.3 : Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)*
 atas PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus
 (ADHK : 2000 =100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian	0,28	0,29	0,28	0,27	0,25	0,23	0,24	0,26
a. Tanaman Bahan Makanan	0,27	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,23	0,25
b. Tanaman Perkebunan	0,28	0,28	0,30	0,32	0,29	0,26	0,23	0,28
c. Peternakan	0,57	0,60	0,58	0,51	0,45	0,44	0,41	0,51
d. Kehutanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
e. Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2. Pertambangan & Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Industri Pengolahan	1,26	1,28	1,30	1,30	1,30	1,35	1,39	1,31
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	1,60	1,62	1,68	1,69	1,70	1,79	1,85	1,70
1. Makanan & Minuman	2,14	2,21	2,35	2,37	2,41	2,65	2,66	2,40
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	0,50	0,47	0,46	0,46	0,44	0,43	0,46	0,46
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
4. Kertas & Brg. Cetak	20,13	19,33	19,04	18,87	17,90	18,02	18,79	18,87
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	0,53	0,56	0,55	0,55	0,52	0,52	0,54	0,54
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	0,36	0,36	0,35	0,35	0,33	0,32	0,36	0,35
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	3,48	3,76	3,70	3,68	3,49	3,48	3,58	3,60
9. Barang lainnya	6,12	7,37	7,07	7,10	6,68	6,64	6,79	6,82
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,62	0,67	0,64	0,65	0,64	0,57	0,56	0,62
a. Listrik	0,69	0,72	0,70	0,71	0,69	0,62	0,61	0,68
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,14	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,18
5. Bangunan	0,28	0,31	0,30	0,35	0,39	0,42	0,41	0,35
6. Perdagangan Hotel & Restoran	1,95	2,01	1,99	1,98	2,03	1,98	1,93	1,98
a. Perdagangan Besar & Eceran	2,15	2,25	2,24	2,23	2,33	2,27	2,21	2,24
b. Hotel	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,06
c. Restoran	0,82	0,75	0,71	0,69	0,62	0,60	0,59	0,68
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57
a. Pengangkutan	0,54	0,52	0,50	0,52	0,49	0,47	0,46	0,50
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	0,67	0,64	0,62	0,64	0,61	0,58	0,56	0,62
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	0,18	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17
b. Komunikasi	0,79	0,79	0,81	0,79	0,84	0,87	0,90	0,83
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,91	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92
a. Bank	4,74	4,97	4,93	4,83	4,28	4,03	3,88	4,52
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,91	0,85	0,79	0,78	0,75	0,78	0,78	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	0,51	0,49	0,51
e. Jasa Perusahaan	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
9. Jasa-Jasa	0,41	0,35	0,37	0,34	0,31	0,30	0,30	0,34
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0,24	0,20	0,21	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	0,24	0,20	0,21	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Swasta	0,95	0,92	0,90	0,98	0,94	0,91	0,91	0,93
1. Sosial Kemasyarakatan	2,22	2,17	2,17	2,38	2,28	2,16	2,22	2,23
2. Hiburan & Rekreasi	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
3. Perorangan & Rumah tangga	0,28	0,27	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,26
JUMLAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Lampiran 2 dan 4 diolah.

Dalam Tabel 5.3 terlihat bahwa sektor primer sangat tertinggal di Kabupaten Kudus, sedangkan sektor tersier dan sekunder relatif memiliki potensi yang lebih baik untuk dikembangkan dimasa mendatang. Hasil analisis *LQ* selama 2000-2006 juga memperkuat dugaan Kabupaten Kudus sebagai daerah industri. Terbukti perekonomian Kabupaten Kudus tanpa industri rokok/pengolahan tembakau adalah berbasis perdagangan dan industri.

Selanjutnya dari nilai indeks *LQ* yang sama dengan satu atau lebih (sektor basis) tersebut, secara teoritis dapat digunakan untuk memperhitungkan seberapa besar nilai ekspor yang dapat dilakukan oleh perekonomian Kabupaten Kudus dari tahun 2000-2006. Besarnya rasio nilai ekspor dihitung dari $((LQ \text{ sektor basis} - 1) / LQ \text{ sektor basis})$. Misalnya, untuk sektor industri pengolahan dengan rata-rata *LQ* sebesar 1,31, artinya $(0,31/1,31) = 23,79\%$ secara teoritis hasil industri pengolahan dapat di ekspor, sedangkan sisanya 76,21% dikonsumsi oleh perekonomian sendiri. Dari perhitungan ini, maka diperoleh rasio nilai ekspor masing-masing sektor/sub sektor basis Kabupaten Kudus sebagaimana Tabel 5.4.

Indeks *LQ* sektor/sub sektor basis yang meningkat, menunjukkan bahwa kemampuan ekspor sektor/sub sektor basis tersebut juga relatif semakin besar. Tren peningkatan indeks *LQ* di Kabupaten Kudus dialami oleh sektor industri pengolahan, sub sektor industri tanpa migas, sub-sub sektor makanan dan minuman. Kecenderungan penurunan indeks *LQ* dialami oleh sub sektor bank, berarti kemampuan ekspor relatifnya cenderung menurun. Sedangkan sektor/sub sektor basis yang lain relatif stabil.

Tabel 5.4 : Rasio Nilai Ekspor PDRB Sektor/Sub Sektor Basis Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Industri Pengolahan	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,26	0,28	0,24
3.b. Industri Tanpa Migas	0,37	0,38	0,40	0,41	0,41	0,44	0,46	0,41
1. Makanan & Minuman	0,53	0,55	0,57	0,58	0,59	0,62	0,62	0,58
4. Kertas & Brg.Cetakan	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95
8. Alat Angk.,Mesin & Peralatan	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,71	0,72	0,72
9. Barang lainnya	0,84	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,49	0,50	0,50	0,49	0,51	0,49	0,48	0,50
6.a. Perdagangan Besar & Eceran	0,53	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56	0,55	0,55
8.a. Bank	0,79	0,80	0,80	0,79	0,77	0,75	0,74	0,78
9.b.1. Sosial Kemasyarakatan	0,55	0,54	0,54	0,58	0,56	0,54	0,55	0,55

Sumber : Lampiran 2 dan Tabel 5.3 diolah.

Hasil produksi sub sektor basis sampai pada unit usaha yang terkecil di Kabupaten Kudus memperlihatkan lebih dari 55% di ekspor keluar daerah, bahkan industri kertas dan barang cetakan mencapai 95%. Dengan demikian pengembangan lapangan usaha sektor unggulan/basis di Kabupaten Kudus relatif tergantung dari kemampuan ekspor. Upaya peningkatan usaha bisa dilakukan dengan memperluas wilayah pemasaran dan membuka daerah pemasaran baru yang masih dapat dijangkau. Diperlukan evaluasi terutama produk industri yang pangsa pasarnya selama ini masih terbatas di lingkup wilayah eks Pembantu Gubernur Wilayah Pati dan hanya ditujukan pada pasar tradisional, untuk ditingkatkan. Peluang industri tahu, kecap, sirup, kacang, minuman ringan dan jenis makanan minuman lainnya kemungkinan semakin terbuka apabila mampu memasuki pasar modern seperti mol dan swalayan. Wilayah pemasaran kemungkinan masih bisa diperluas, tentu dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik.

Jasa bank, perkembangannya cenderung menurun, kemungkinan terjadi karena bank yang ada di Kabupaten Kudus, mulai membuka kantor pelayanan di wilayah lain seperti di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Blora. Sementara itu jumlah bank baru yang didirikan di Kabupaten Kudus sangat terbatas, karena sarana-prasarana perkantoran yang tersedia belum memadai. Untuk merangsang investasi perbankan dan jasa keuangan lainnya, diperlukan sarana dan prasarana

pendukung seperti ruko dan fasilitas perkantoran yang strategis dalam jumlah yang memadai.

Sedangkan sisa dari rasio nilai ekspor tersebut merupakan rasio konsumsi domestik dari sektor/sub sektor basis. Rasio konsumsi domestik juga dapat diperoleh dengan cara ($1/LQ$ sektor basis). Maka dari indeks LQ diperoleh rasio konsumsi domestik sektor/sub sektor basis Kabupaten Kudus tahun 2000-2006 berdasarkan PDRB riil tanpa komponen industri rokok/pengolahan tembakau sebagaimana Tabel 5.5.

Tabel 5.5 : Rasio Konsumsi Domestik PDRB Sektor/Sub Sektor Basis Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Industri Pengolahan	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,74	0,72	0,76
3.b. Industri Tanpa Migas	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,56	0,54	0,59
1. Makanan & Minuman	0,47	0,45	0,43	0,42	0,41	0,38	0,38	0,42
4. Kertas & Brg.Cetakan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
8. Alat Angk.,Mesin & Peralatan	0,29	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29	0,28	0,28
9. Barang lainnya	0,16	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,51	0,50	0,50	0,51	0,49	0,51	0,52	0,50
6.a. Perdagangan Besar & Eceran	0,47	0,44	0,45	0,45	0,43	0,44	0,45	0,45
8.a. Bank	0,21	0,20	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,22
9.b.1. Sosial Kemasyarakatan	0,45	0,46	0,46	0,42	0,44	0,46	0,45	0,45

Sumber : Lampiran 2 dan Tabel 5.3 diolah.

5.4. Penentuan Sektor/Sub Sektor Unggulan

Perumusan hasil akhir dari penggunaan alat analisis Tipologi Daerah, *Shift-Share* dan *Location Quotient (LQ)*, agar tidak terjadi tumpang tindih dan dapat menghindari kesalahan, maka dibuat suatu cara untuk merangkumnya dengan teknik *overlay*. Tujuan dari teknik *overlay* adalah untuk membantu mempermudah identifikasi dari penggunaan beberapa model analisis yang berbeda. Dari tiga macam alat analisis di atas, diketahui adanya empat jenis kriteria unggulan yang berbeda, terdiri dari : dua kriteria berasal dari Tipologi Daerah (pertumbuhan $\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip}$, dan kontribusi $Y_{ik} \geq Y_{ip}$), satu kriteria dari *Shift-Share* (pergeseran diferensial C_k), dan satu kriteria dari *Location Quotient (LQ \geq 1)*. Penggabungan dari empat jenis kriteria yang berbeda tersebut, di dalam penelitian ini menghasilkan enam karakteristik dengan kombinasi yang berbeda (Tabel 5.6). Agar hasil identifikasi lebih informatif dan mudah dipahami, selanjutnya enam

karakteristik itu dijadikan sebagai penentuan klasifikasi sektor/sub sektor ekonomi, yang masing-masing diberi identitas sebagai Unggulan, Potensial, Berkembang, Tumbuh, Tertekan dan Terbelakang, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Unggulan, artinya sektor/sub sektor ekonomi tersebut memenuhi kriteria : pertumbuhannya lebih cepat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{positif}$), kontribusinya lebih besar ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{positif}$), pergeseran diferensial positif ($C_{ik} = \text{positif}$), dan indeks $LQ \geq 1$ juga positif.

Sektor/sub sektor unggulan tersebut di Kabupaten Kudus memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor/sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, melebihi rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota lainnya. Dari sisi pertumbuhan, sektor dimaksud di Kabupaten Kudus tumbuh lebih cepat dibanding sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Pergeseran diferensial yang positif mengindikasikan suatu sektor di Kabupaten Kudus memiliki daya kompetitif / kemampuan daya saing relatif lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula indeks LQ lebih besar dari 1 (satu), memberikan petunjuk bahwa suatu sektor di Kabupaten Kudus mengalami surplus. Artinya dapat memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Kudus, sekaligus dapat memenuhi permintaan dari daerah lain (diekspor). Dengan terpenuhinya semua kriteria di atas, secara teoritis suatu sektor merupakan spesialisasi dari Kabupaten Kudus dan sangat terbuka kemungkinan untuk dikembangkan lebih jauh dimasa yang akan datang. Perkembangan yang baik dari sektor unggulan ini, dapat menambah pendapatan yang kemudian meningkatkan konsumsi, investasi dan penyerapan tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan sektor unggulan dan bukan unggulan.

2. Klasifikasi Potensial, artinya sektor/sub sektor ekonomi yang memiliki kriteria pertumbuhan lebih lambat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{negatif}$), kontribusi lebih besar ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{positif}$), pergeseran diferensial negatif ($C_{ik} = \text{negatif}$), dan indeks $LQ \geq 1$ positif.

Kriteria klasifikasi potensial dimaksud, berarti suatu sektor di Kabupaten Kudus memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, melebihi rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah. Indeks LQ yang lebih besar dari 1 (satu) menindikasikan bahwa sektor tersebut relatif maju, mampu mencukupi kebutuhan lokal Kabupaten Kudus, dan memiliki kemampuan ekspor ke daerah lain. Namun dari sisi pertumbuhan kurang bagus, seiring dengan menurunnya daya kompetitif. Pertumbuhannya lebih lambat dibanding sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Pergeseran diferensialnya negatif, mengindikasikan bahwa sektor tersebut kalah kompetitif dengan daerah lain. Sub sektor bank merupakan satu-satunya yang masuk dalam klasifikasi potensial. Dugaan terjadinya kemunduran daya saing perbankan di Kabupaten Kudus, kemungkinan karena di Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah mulai dibuka cabang-cabang baru, untuk memperluas jaringan pelayanan.

Tabel 5.6 : *Overlay Analisis Tipologi Daerah, Shift-Share (SS) dan LQ Kabupaten Kudus, 2000-2006*

Lapangan Usaha	Tipologi Daerah		SS Cik	LQ>1	Rangkuman	Keterangan
	$\Gamma_{ik} > \Gamma_{ip}$	$Y_{ik} > Y_{ip}$				
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian	-	-	-	-	---	Terbelakang
a. Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
b. Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	---	Terbelakang
c. Peternakan	-	-	-	-	---	Terbelakang
d. Kehutanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
e. Perikanan	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
2. Pertambangan & Penggalian	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	---	Terbelakang
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	---	Terbelakang
c. Penggalian	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
3. Industri Pengolahan	+	+	+	+	++++	Unggulan
a. Industri Migas	-	-	-	-	---	Terbelakang
b. Industri Tanpa Migas	+	+	+	+	++++	Unggulan
1. Makanan & Minuman	+	+	+	+	++++	Unggulan
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
4. Kertas & Brg. Cetakan	+	+	+	+	++++	Unggulan
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	---	Terbelakang
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	+	+	+	+	++++	Unggulan
9. Barang lainnya	+	+	+	+	++++	Unggulan
4. Listrik, Gas & Air Bersih	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
a. Listrik	-	+	-	-	- +	Tertekan
b. Gas						
c. Air Bersih	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
5. Bangunan	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh

1	2	3	4	5	6	7
6. Perdagangan, Hotel & Resioran	+	+	+	+	++++	Unggulan
a. Perdagangan Besar & Ecran	+	+	+	+	++++	Unggulan
b. Hotel	-	-	-	-	---	Terbelakang
c. Restoran	-	+	-	-	-+-	Tertekan
7. Pengangkutan & Komunikasi	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
a. Pengangkutan	-	-	-	-	---	Terbelakang
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	---	Terbelakang
2. Angkutan Jalan Raya	-	-	-	-	---	Terbelakang
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	---	Terbelakang
4. Angkut Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-	-	---	Terbelakang
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	---	Terbelakang
6. Jasa penunjang Angkutan	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
b. Komunikasi	+	+	+	-	+++	Berkembang
1. Pos dan Telekomunikasi						
2. Jasa penunjang Komunikasi						
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perus	+	+	+	-	+++	Berkembang
a. Bank	-	+	-	+	-+-	Potensial
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-	+	-	-	-+-	Tertekan
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	---	Terbelakang
d. Sewa Bangunan	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
e. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	---	Terbelakang
9. Jasa-Jasa	-	-	-	-	---	Terbelakang
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
1. Admin, Pemerintah & Pertahanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
2. Jasa Pemerintahan Lainnya						
b. Swasta	+	+	+	-	+++	Berkembang
1. Sosial Masyarakat	+	+	+	+	++++	Unggulan
2. Hiburan & Rekreasi	+	-	+	-	+ +-	Tumbuh
3. Perorangan & Rumah tangga	-	-	-	-	---	Terbelakang
PDRB	+	+	+	+	++++	

Sumber : Lampiran 14, Tabel 5.2 dan 5.3 diolah.

3. Klasifikasi Berkembang, sektor/sub sektor ekonomi tersebut memiliki kriteria pertumbuhan lebih cepat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{positif}$), kontribusi lebih besar ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{positif}$), pergeseran diferensial positif ($C_{ik} = \text{positif}$), tetapi indeks LQ kurang dari satu ($LQ < 1 = \text{negatif}$).

Sektor/sub sektor ini, di Kabupaten Kudus berkembang cukup maju, dengan kontribusi cukup besar terhadap Provinsi Jawa Tengah, lebih besar dari rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota lainnya. Pertumbuhannya lebih cepat dibanding sektor/sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki daya kompetitif. Namun indeks LQ masih kurang dari 1 (satu), artinya potensi relatif sektor/sub sektor ini, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Kudus sendiri. Dengan kemampuan kompetitif yang baik, sektor /

sub sektor ini, diperkirakan memiliki peluang yang sangat terbuka untuk berkembang lebih maju.

4. Klasifikasi Tumbuh, artinya sektor/sub sektor ekonomi tersebut memiliki kriteria pertumbuhan lebih cepat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{positif}$), kontribusi lebih kecil ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{negatif}$), pergeseran diferensial positif ($C_{ik} = \text{positif}$), dan indeks $LQ \geq 1$ negatif (indeks LQ kurang dari 1).

Sektor/sub sektor ini, di Kabupaten Kudus tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya kompetitif lebih baik dibanding sektor/sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Namun belum cukup maju, mengingat kontribusinya ke Provinsi Jawa Tengah masih lebih kecil dibanding rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota lainnya. Demikian pula indeks LQ yang kurang dari 1 (satu), mengindikasikan bahwa potensi relatifnya masih kecil, tidak mampu mencukupi kebutuhan lokal Kabupaten Kudus sendiri. Pergeseran diferensiasi yang positif, memberi harapan bahwa sektor/sub sektor ini akan mampu bersaing dan berpeluang tumbuh lebih besar.

5. Klasifikasi Tertekan, adalah sektor/sub sektor ekonomi yang memiliki kriteria pertumbuhan lebih lambat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{negatif}$), kontribusi lebih besar ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{positif}$), pergeseran diferensial negatif ($C_{ik} = \text{negatif}$), dan indeks LQ kurang dari satu ($LQ \geq 1$ negatif).

Kontribusi sektor/sub sektor di Kabupaten Kudus terhadap sektor/sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah lebih besar dibanding rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota lain. Sementara kriteria yang lain kurang baik. Pertumbuhan suatu sektor lebih rendah dibanding sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Daya kompetitifnya rendah, tidak mampu bersaing dengan Kabupaten /Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisinya sedang tertekan, karena daerah lain sedang tumbuh dengan daya saing yang lebih baik. Indeks LQ kurang dari 1 (satu), mengindikasikan bahwa sektor/sub sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal sendiri atau masih impor.

6. Klasifikasi Terbelakang, adalah sektor/sub sektor ekonomi yang memiliki kriteria pertumbuhan lebih lambat ($\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip} = \text{negatif}$), kontribusi lebih kecil ($Y_{ik} \geq Y_{ip} = \text{negatif}$), pergeseran diferensial negatif ($C_{ik} = \text{negatif}$), dan indeks LQ kurang dari satu ($LQ \geq 1$ negatif).

Klasifikasi terbelakang, mengindikasikan bahwa sektor/sub sektor ekonomi di Kabupaten Kudus berada pada kondisi paling lemah. Kontribusi sektor/sub sektor terhadap Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari rata-rata kontribusi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pertumbuhannya lebih kecil dari pertumbuhan sektor yang sama Provinsi Jawa Tengah. Pergeseran diferensial negatif, mengindikasikan bahwa sektor tersebut daya saingnya lemah. Begitu pula, peluang ekspor relatif lemah, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan Kabupaten Kudus sendiri. Hal ini sesuai dengan indeks *LQ* yang lebih kecil dari 1 (satu). Dengan demikian sektor/sub sektor yang termasuk dalam klasifikasi tertinggal, secara ekonomi bukan merupakan spesialisasi dari Kabupaten Kudus.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sektor/sub sektor ekonomi (PDRB) riil Kabupaten Kudus, menurut lapangan usaha, tanpa komponen industri rokok/pengolahan tembakau tahun 2000-2006, dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat diidentifikasi seperti pada Tabel 5.7. Sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Kudus termasuk dalam klasifikasi tumbuh (sebanyak empat sektor), dua sektor termasuk dalam klasifikasi unggulan, dua sektor termasuk dalam klasifikasi terbelakang, dan satu sektor termasuk dalam klasifikasi berkembang. Klasifikasi untuk sub sektor dan sub-sub sektor ekonomi selengkapnya disajikan dalam Tabel 5.7.

Informasi yang diberikan dari hasil analisis ini, lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Klasifikasi dari suatu sektor, tidak mencerminkan bahwa semua sub sektor dan sub-sub sektor yang ada di bawahnya berada pada klasifikasi yang sama. Misalnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, termasuk dalam klasifikasi unggulan; (sub sektor perdagangan besar dan eceran masuk dalam klasifikasi unggulan; sub sektor hotel termasuk klasifikasi tertinggal; dan sub sektor restoran masuk dalam klasifikasi tertekan). Namun demikian hasil ini dapat memberikan petunjuk secara kasar bagaimana kondisi relatif dari tiap-tiap sektor, sub sektor dan sub-sub sektor ekonomi di Kabupaten Kudus. Klasifikasi ini, merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun skala prioritas, dan penentuan kebijakan perencanaan pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi.

Tabel 5.7 : Klasifikasi Sektor/Sub Sektor PDRB Kabupaten Kudus
Tahun 2000-2006
(Hasil Rangkuman Teknik *Overlay*)

Klasifikasi 1	Sektor 2	Sub Sektor 3	Sub-sub Sektor 4
1. Unggulan	1. Industri pengolahan 2. Perdagangan, hotel dan restoran	1. Industri tanpa migas 2. Perdagangan besar dan eceran	1. Makanan dan minuman 2. Kertas dan barang cetakan 3. Alat angkut, mesin dan peralatan 4. Barang lainnya 5. Jasa sosial kemasyarakatan
2. Potensial		1. Bank	
3. Berkembang	1. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1. Komunikasi 2. Jasa swasta	
4. Tumbuh	1. Pertambangan dan penggalian. 2. Listrik, gas & air bersih 3. Bangunan 4. Pengangkutan dan komunikasi	1. Perikanan 2. Penggalian 3. Air bersih 4. Sewa bangunan	1. Tekstil, barang kulit dan alas kaki. 2. Barang kayu dan hasil Hutan lainnya. 3. Pupuk, kimia dan barang dari karet. 4. Semen dan barang lain bukan logam. 5. Jasa penunjang angkutan 6. Hiburan dan rekreasi
5. Tertekan		1. Listrik 2. Restoran 3. Lembaga keuangan tanpa bank	
6. Terbelakang	1. Pertanian 2. Jasa-jasa	1. Tanaman bahan makanan 2. Tanaman perkebunan 3. Peternakan 4. Kehutanan 5. Hotel 6. Pengangkutan 7. Jasa penunjang keuangan 8. Jasa perusahaan 9. Pemerintahan umum dan pertahanan 10. (Pertambangan Migas) 11. (Pertambangan tanpa Migas) 12. (Industri Migas)	1. Angkutan jalan raya 2. Admin, pemerintahan dan pertahanan. 3. Jasa perorangan dan rumah tangga 4. (Logam dasar, besi & baja) 5. (Angkutan rel) 6. (Angkutan laut) 7. (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan). 8. (Angkutan udara)

Sumber : Tabel 5.6 diolah

Keterangan : (...) merupakan sektor/sub sektor yang tidak ada di Kudus.

Dengan demikian sesuai hipotesis, terbukti bahwa sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Kudus tanpa industri rokok/pengolahan tembakau dari tahun 2000-2006 adalah :

1. Sektor industri pengolahan meliputi sub sektor industri tanpa migas, khususnya industri makanan dan minuman, industri kertas dan barang cetakan.
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran.

Sedangkan sub-sub sektor ekonomi yang tidak diperkirakan sebagai unggulan, tetapi dari hasil analisis ternyata termasuk dalam klasifikasi unggulan adalah “sub-sub sektor industri alat angkut, mesin dan peralatan; industri barang lainnya; dan jasa sosial kemasyarakatan”.

Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah (i) sub-sub sektor jasa sosial kemasyarakatan, yang diluar dugaan ternyata masuk dalam klasifikasi unggulan. Indikasi kuat yang memungkinkan hal ini terjadi diantaranya diperoleh dari kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan formal maupun informal. (ii) Sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan, masuk klasifikasi tertinggal. Hal ini terjadi kemungkinan karena wilayah Kabupaten Kudus paling kecil di Provinsi Jawa Tengah, sehingga unit kerja yang ada maupun jumlah pegawai juga sedikit. Disamping itu sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) minimal.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus, merupakan mesin penggerak bagi sektor perdagangan dan sektor/sub sektor ekonomi lainnya. Kemajuan ini diperkirakan tidak terlepas dari posisi setrategis wilayah Kabupaten Kudus, dengan aksesibilitas yang tinggi. Lokasi yang strategis ini, menjadikan Kabupaten Kudus sebagai wilayah penghubung sekaligus pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Blora, Demak dan Grobogan. Aksesibilitas yang tinggi mendorong berkumpulnya berbagai kegiatan industri, dengan memanfaatkan keuntungan aglomerasi yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran. Hal lain yang diperkirakan cukup mendukung adalah sikap mental masyarakat yang terbiasa dengan budaya kerja industri, dan memiliki ketrampilan yang memadai. Perkembangan selama ini, kondisi perburuan di Kabupaten Kudus relatif baik, kondusif, aman, dan tidak banyak terjadi unjuk rasa, sehingga kelangsungan investasi lebih terjamin.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Kudus, menggunakan pendekatan PDRB riil Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah, tanpa komponen industri rokok/pengolahan tembakau tahun 2000-2006. Penggunaan alat analisis Tipologi Daerah (*Klassen Typology*), *Shift-Share* dan *Location Quotient (LQ)*, menghasilkan adanya sektor/sub sektor unggulan dan bukan unggulan. Informasi hasil analisis ini, lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan teknik *Overlay* diperoleh 6 (enam) klasifikasi yang berbeda yaitu unggulan, potensial, berkembang, tumbuh, tertekan dan terbelakang.

Hasil akhir dari penelitian ini, yang dinyatakan sebagai sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Kudus tanpa industri rokok/pengolahan tembakau adalah (i) Sektor perdagangan, hotel dan restoran; sub sektor perdagangan besar dan eceran. (ii) Sektor industri pengolahan; sub sektor industri tanpa migas (sub-sub sektor industri makanan dan minuman; kertas dan barang cetakan; alat angkut, mesin, dan peralatan; barang lainnya). Kemudian sub-sub sektor jasa swasta sosial kemasyarakatan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kudus relatif dipengaruhi oleh *share* wilayah perekonomian yang lebih luas, baik Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun internasional/luar negeri. Kondisi ini diduga terkait dengan pemasaran produk industri yang diekspor keluar daerah, baik domestik maupun internasional. Sektor industri berperan cukup menonjol sehingga relatif mampu menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Kudus. Sektor industri juga relatif memiliki daya saing dan prospek pengembangan cukup baik, terutama industri makan dan minuman; kertas dan barang cetakan; alat angkut, mesin, dan peralatan; barang lainnya. Kendala yang dihadapi sektor industri terutama industri kecil dan rumah tangga sebagian terkait dengan keterbatasan pemasaran, modal dan ketersediaan bahan baku. Kendala lain yang dihadapi terkait dengan persoalan teknis seperti: standar kualitas, penggunaan merek, label dan pengemasan. Sektor perdagangan

mempunyai peranan relatif cukup menonjol, namun persentase distribusinya cenderung menurun. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh industri rokok/pengolahan tembakau yang pertumbuhannya cenderung melambat, bahkan pada tahun 2006 menurun. Pemasaran hasil industri sebagian besar masih ditujukan untuk pasar-pasar tradisional, sementara pasar modern yang berkembang saat ini, seperti swalayan relatif belum dimanfaatkan.

Sub-sub sektor jasa swasta sosial kemasyarakatan yang berkembang di Kabupaten Kudus meliputi kegiatan pendidikan yang didukung sekurang-kurangnya oleh delapan perguruan tinggi. Kegiatan pendidikan lainnya yang berkembang adalah pondok pesantren terutama hafalan Al Qur'an dan kitab kuning. Pelayanan kesehatan juga cukup menonjol, didukung sekurang-kurangnya oleh tiga rumah sakit besar yang selama ini menjadi rujukan dan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Demak.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi di masa mendatang sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus, disarankan agar prioritas kebijakan ekonomi daerah lebih mengutamakan sektor/sub sektor unggulan.
2. Mengupayakan ketersediaan bahan baku, terutama bahan baku impor, mungkin dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara perusahaan yang menggunakan jenis bahan baku yang sama. Misalnya industri tahu, tempe, dan kecap, sama-sama menggunakan bahan baku kedelai. Dengan kerja sama pengadaan bahan baku, kemungkinan dapat diperoleh harga yang lebih efisien. Ketersediaan bahan baku dapat menjaga kelangsungan produksi, bahkan dapat meningkatkan produksi secara terukur.
3. Meningkatkan permintaan pasar ekspor domestik dan internasional, kemungkinan dapat dilakukan dengan memperluas wilayah pemasaran ke

daerah-daerah baru, dan melakukan kerja sama pemasaran dengan pasar-pasar modern. Dapat pula dilakukan melalui kegiatan promosi bersama melalui program kemitraan antara industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga baik di daerah sendiri maupun ke daerah lain. Untuk bisa memasuki pasar modern diperlukan pembinaan kepada pelaku industri untuk menjaga kualitas produk, tertib penggunaan label, merek, dan standar kemasan.

4. Agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh sektor/sub sektor ekonomi Kabupaten Kudus, perlu diupayakan untuk menciptakan dan meningkatkan keterkaitan antar sektor ekonomi. Misalnya industri kecap, memiliki keterkaitan dengan industri gula tumbu, dan pertanian tanaman tebu. Disamping itu industri kecap dan gula tumbu memiliki keterkaitan dengan industri mesin yang berkembang di Kabupaten Kudus.
5. Jasa sosial kemasyarakatan yang terdiri dari pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan masih berpeluang dapat ditingkatkan. Jasa pendidikan dan kesehatan memiliki reputasi dan perkembangan yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta yang berminat melakukan investasi. Untuk meningkatkan daya saing jasa pendidikan dapat dilakukan dengan menambah fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Meningkatkan kualitas guru dan dosen pengajar. Untuk pondok pesantren bisa dikembangkan menjadi pondok pesantren modern yang juga menyediakan kegiatan pendidikan formal.

Pelayanan jasa kesehatan juga memiliki reputasi yang baik, terutama di wilayah eks Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pati. Daya tampung rumah sakit masih bisa dikembangkan. Fasilitas, peralatan, sarana dan prasarana kesehatan bisa ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan modern. Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga medis dan para medis. Peluang peningkatan pelayanan jasa kesehatan masih sangat terbuka, dengan cara menambah dokter spesialis yang jumlahnya relatif masih terbatas.

6. Strategi kebijakan yang diterapkan supaya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan dari masing-masing sektor/sub sektor ekonomi. Oleh karena

informasi hasil penelitian ini masih bersifat terbatas, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah alat analisis sesuai kebutuhan. Penelitian akan lebih sempurna apabila dilengkapi dengan kajian mengenai ketenagakerjaan, dan adanya studi lebih lanjut sampai dengan komoditas tertentu. Validitas dan ketersediaan data berperan penting dalam menghasilkan penelitian yang terbaik. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kudus dan instansi terkait, perlu memberikan perhatian serius dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan penyusunan bank data.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Ali Basyah, Analisis Shift Share dalam Menelaah Perkembangan Industri antar Daerah, Jakarta : FEUI, 1985.
- Amstrong H. and Taylor J, *Regional Economics and Policy*, 3rd ed. Malden, Massachusetts, Blackwell Publishers, 2000.
- Arsyad, L., *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1999.
- Bendavid-Val, Avrom, *Regional and Local Economic Analysis for Proctitioners*, 4th ed. New York : Preager, 1991.
- Blakely, E.J., *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, 2rd ed. California : Sage Publications Inc, 1994.
- Blanchard, Olivier, *Macroeconomics*, New Jersey : Prentice-Hall, 1997.
- Budiman, A., dan Onghokham, *Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus : PT. Djarum, 1997.
- Budiono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Case, Karl E. and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall International, 1996.
- Djoyohadikusumo, S., *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1994.
- Glasson, John, *Pengantar Perencanaan Regional*, (Terjemahan oleh Paul Sihotang), Jakarta : LPFEUI, 1990.
- Hanham, R.W., and Shawn, B., *Shift-Share Analysis and Change in Japanese Manufacturing Employment*, Growth and Change, Volume 31, 2000.
- Jhinghan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Terjemahan oleh D.Guritno), Jakarta : Rajawali Pres, Jakarta 1999.
- Kuncoro, M., *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2000.
- _____, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kuncoro, M., dan Sumarno, S.B., Struktur, Kinerja dan Kluster Industri Rokok Kretek : Indonesia, 1996-1999, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2001.
- Mangkoesebroto, G., *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Mankiw, Georgy N., *Macroeconomics*, 4th ed. New York, N.Y.: Worth Pub., 1997.
- Nazara, S., *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia* : Jakarta, Prisma No.8, 1994.
- Nining, I. Susilo, *Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)*, Buku II, Jakarta : FE UI, 2002.
- Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, 4th ed. New Jersey: prentice-Hall, 1998.
- Rahardja P. dan Manurung M., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi revisi, Jakarta: FE UI, 2004.

- Rahardja P. dan Manurung, M., *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Edisi ketiga, Jakarta: FE UI, 2004.
- Rex, Tom, Key Arizona Economic Activities, Arizona Business, Arizona State University's Monthly Newsletter on the Arizona Economy, Volume 44, Number 9, 1-6.
- Soepono, P., Analisis Shift-share: Perkembangan dan Penerapan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, September 1993.
- Sukirno, S., *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta : LPFEUI, 1985.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Memberdayakan Masyarakat*, Jakarta : Penakencana Nusadwipa 1996.
- Susanti, H., Ikhsan, M., dan Widyanti, *Indikator-Indikator Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta : LPFEUI, 2000.
- Syafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat* ; Jakarta, Prisma 1997.
- Tarigan, R., *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara 2005.
- Taufiq, M. dan Syirod, S., *Potensi Relative Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan* : Palembang, FE UNSRI, 2002.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., *Economic Development in the Third World*, 8th ed. (Terjemahan oleh Hari Munandar, dan Puji A.L), Jakarta : Erlangga, 2004.
- Widodo, T., *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006.
- _____, *Kudus Dalam Angka*, Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2000-2006.
- _____, *PDRB Kabupaten Kudus*, Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2000-2006.
- _____, *Jawa Tengah Dalam Angka*, Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2000-2006.
- _____, *PDRB Provinsi Jawa Tengah*, Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2000-2006.
- _____, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009*, Publikasi Bappenas 2005.
- www.bappenas.go.id/.../&view=85/MODUL-ISIAN-SIMRENAS.pdf

Lampiran 1 : PDRB Kabupaten Kudus (ADHK:2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN		324.047,17	346.975,49	366.181,10	347.627,24	352.662,27	340.618,20	356.087,48
a.	Tanaman Bahan Makanan	218.021,96	231.240,60	239.162,97	233.511,75	243.939,91	232.816,17	249.105,53
b.	Tanaman Perkebunan	31.036,82	32.987,50	35.944,72	37.142,54	37.626,72	34.667,78	32.438,37
c.	Peternakan	72.683,10	80.370,87	88.577,06	74.371,77	68.689,62	70.519,94	71.814,74
d.	Kehutanan	210,00	222,02	222,44	207,87	191,52	184,78	160,76
e.	Perikanan	2.095,29	2.154,50	2.273,91	2.393,31	2.214,50	2.429,53	2.568,08
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN		2.377,70	2.662,81	2.865,06	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31
a.	Minyak & Gas Bumi	2.377,70	2.662,81	2.865,06	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31
b.	Pertambangan tanpa Migas	4.814.669,27	5.112.626,10	5.407.457,41	5.715.468,09	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12
c.	Penggalian	-	-	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN		4.814.669,27	5.112.626,10	5.407.457,41	5.715.468,09	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12
a.	Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-
b.	Industri Tanpa Migas	4.814.669,27	5.112.626,10	5.407.457,41	5.715.468,09	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	4.114.868,80	4.379.082,82	4.645.617,70	4.907.346,13	5.387.459,41	5.694.400,12	5.761.927,48
(i)	Makanan & Minuman	906.506,47	1.007.989,82	1.199.243,86	1.304.540,58	1.492.506,49	1.682.358,29	1.827.791,75
(ii)	Tembakau	3.208.362,33	3.371.093,00	3.446.373,84	3.602.805,55	3.894.952,92	4.012.041,83	3.934.135,73
2.	Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	117.637,47	117.338,43	121.882,38	127.660,63	130.709,25	134.274,91	147.593,32
3.	Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	29.133,11	29.474,17	31.295,45	32.834,06	33.761,36	34.334,93	37.910,85
4.	Kertas & Brg. Cetakan	348.765,96	349.312,76	356.330,38	375.562,46	394.348,21	406.905,41	433.652,77
5.	Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	37.479,88	42.265,34	43.017,30	46.649,67	48.048,97	49.467,74	53.119,16
6.	Semen & Brg. Lain Bukan Logam	15.267,51	16.128,15	17.740,65	18.919,65	19.303,56	19.645,37	21.141,77
7.	Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-
8.	Alat Angk., Mesin & Peralatan	117.039,70	135.967,64	145.913,84	156.132,30	161.426,57	165.878,46	178.172,16
9.	Barang lainnya	33.676,84	43.036,79	45.659,71	50.363,19	51.298,02	52.514,31	56.390,61
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH		23.800,75	26.390,50	29.496,36	30.273,01	33.388,12	33.134,30	34.548,41
a.	Listrik	23.181,49	25.650,81	28.638,63	29.311,53	32.348,20	31.920,91	33.152,65
b.	Gas	-	-	-	-	-	-	-
c.	Air Bersih	619,26	739,69	857,73	961,48	1.043,92	1.213,39	1.395,76
5. BANGUNAN		63.947,58	77.983,15	87.305,41	114.267,74	141.554,12	162.748,06	167.298,67

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	2.229.427,46	2.347.324,40	2.451.666,83	2.591.709,92	2.831.449,55	2.915.874,16	2.987.781,04
b. Hotel	2.111.389,14	2.225.281,27	2.326.398,57	2.465.833,48	2.703.945,37	2.781.889,18	2.847.876,71
c. Restoran	1.543,68	1.486,13	1.394,15	1.462,71	1.532,33	1.303,37	1.212,24
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	116.494,64	120.557,00	123.874,11	124.413,73	125.971,85	132.681,61	138.692,09
1. Angkutan Rel	133.362,88	144.234,01	155.129,91	168.385,79	180.687,10	191.001,05	201.682,93
2. Angkutan Jalan Raya	99.232,27	105.348,72	111.040,48	121.006,48	124.379,24	127.742,61	127.906,55
3. Angkutan Laut	97.404,30	103.510,03	109.061,47	118.989,98	122.205,68	125.485,76	125.539,64
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	1.827,97	1.838,69	1.979,01	2.016,50	2.173,56	2.256,85	2.366,91
b. Komunikasi	34.130,61	38.885,29	44.089,43	47.379,31	56.307,86	63.258,44	73.776,38
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	173.880,20	184.503,35	196.726,71	205.575,67	218.159,10	229.463,82	238.231,77
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	82.537,24	89.643,69	95.425,71	100.139,74	107.029,35	116.231,93	122.099,35
c. Jasa Penunjang Keuangan	23.157,75	22.966,84	23.180,04	23.777,19	24.806,09	26.626,42	28.545,22
d. Sewa Bangunan	67.405,69	71.593,43	77.302,98	80.835,92	85.489,11	85.761,19	86.720,38
e. Jasa Perumahan	779,52	799,39	817,98	822,82	833,55	844,28	866,82
9. JASA-JASA							
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	182.224,17	186.743,43	191.034,58	205.596,48	210.370,04	212.781,25	223.751,62
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	81.573,96	82.249,50	82.269,37	84.156,91	85.509,92	87.026,01	87.563,83
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	81.573,96	82.249,50	82.269,37	84.156,91	85.509,92	87.026,01	87.563,83
b. Swasta	100.650,21	104.493,93	108.765,21	121.439,57	124.860,12	125.755,24	136.187,79
1. Sosial Kemasyarakatan	81.281,34	85.033,33	89.404,72	101.151,54	103.412,94	103.874,77	113.550,28
2. Hiburan & Rekreasi	409,54	426,27	454,39	467,23	508,31	512,34	510,85
3. Perorangan & Rumah tangga	18.259,33	19.034,33	18.906,10	19.820,80	20.938,87	21.368,13	22.126,66
JUMLAH	7.947.737,18	8.429.443,24	8.887.863,37	9.382.289,17	10.198.527,39	10.647.408,00	10.903.735,35

Sumber : BPS diolah

Lampiran 2 : PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembaku
Kabupaten Kudus (ADHK:2000 = 100) Menurut
Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN								
a. Tanaman Bahan Makanan		324.047,17	346.975,49	366.181,10	347.627,24	352.662,27	340.618,70	356.087,48
b. Tanaman Perkebunan		218.021,96	231.240,60	239.162,97	233.511,75	243.939,91	232.816,17	249.105,53
c. Peternakan		31.036,82	32.987,50	35.944,72	37.142,54	37.626,72	34.667,78	32.438,37
d. Kehutanan		72.683,10	80.370,87	88.577,06	74.371,77	68.689,62	70.519,94	71.814,74
		210,00	222,02	222,44	207,87	191,52	184,78	160,76
e. Perikanan		2.095,29	2.154,50	2.273,91	2.393,31	2.214,50	2.429,53	2.568,08
		2.377,70	2.662,81	2.865,06	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN								
a. Minyak & Gas Bumi		-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas		-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian		2.377,70	2.662,81	2.865,06	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31
		1.606.306,94	1.741.533,10	1.961.083,57	2.112.662,54	2.331.404,43	2.545.579,42	2.755.774,39
3. INDUSTRI PENGOLAHAN								
a. Industri Migas		-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas		1.606.306,94	1.741.533,10	1.961.083,57	2.112.662,54	2.331.404,43	2.545.579,42	2.755.774,39
1. Makanan & Minuman		906.306,47	1.007.989,82	1.199.243,86	1.304.540,58	1.492.506,49	1.682.358,29	1.827.791,75
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki		117.837,47	117.358,43	121.882,38	127.660,63	130.709,25	134.274,91	147.595,32
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain		29.133,11	29.474,17	31.295,45	32.834,06	33.761,36	34.534,93	37.910,83
4. Kertas & Brg. Cetakan		348.765,96	349.312,76	356.330,38	375.562,46	394.348,21	406.905,41	433.652,77
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet		37.479,88	42.265,34	43.017,30	46.649,67	48.048,97	49.467,74	53.119,16
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam		15.267,51	16.128,15	17.740,65	18.919,65	19.305,56	19.645,37	21.141,77
7. Logam Dasar Besi & Baja		-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Perlatan		117.639,70	135.967,64	145.913,84	156.132,30	161.426,37	165.878,46	178.172,16
9. Barang lainnya		33.676,84	43.036,79	45.659,71	50.363,19	51.298,02	52.514,31	56.390,61
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH								
a. Listrik		23.800,75	26.390,50	29.496,36	30.273,01	33.388,12	33.134,30	34.548,41
b. Gas		23.181,49	25.650,81	28.638,63	29.311,53	32.344,20	31.920,91	33.152,65
c. Air Bersih		619,26	739,69	857,73	961,48	1.043,92	1.213,39	1.395,76
		63.947,58	77.983,15	87.305,41	114.267,74	141.554,12	162.748,06	167.298,67
5. BANGUNAN								

lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	2.229.427,46	2.347.324,40	2.451.666,83	2.591.709,92	2.831.449,55	2.915.874,16	2.987.781,04
b. Hotel	2.111.389,14	2.225.281,27	2.326.398,57	2.465.833,48	2.703.945,37	2.781.889,18	2.847.876,71
c. Restoran	1.543,68	1.486,13	1.394,15	1.462,71	1.532,33	1.303,37	1.212,24
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	116.494,64	120.557,00	123.874,11	124.413,73	125.971,85	132.681,61	138.692,09
1. Angkutan Rel	133.362,88	144.234,01	155.129,91	168.385,79	180.687,10	191.001,05	201.682,93
2. Angkutan Jalan Raya	99.232,27	105.348,72	111.040,48	121.006,48	124.379,24	127.742,61	127.906,55
3. Angkutan Laut	97.404,30	103.510,03	109.061,47	118.989,98	122.205,68	125.485,76	125.539,64
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	1.827,97	1.838,69	1.979,01	2.016,50	2.173,56	2.256,85	2.366,91
b. Komunikasi	34.130,61	38.885,29	44.089,43	47.379,31	56.307,86	63.258,44	73.776,38
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	173.880,20	184.503,35	196.726,71	205.575,67	218.158,10	229.463,82	238.231,77
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	82.537,24	89.643,69	95.425,71	100.139,74	107.029,35	116.231,93	122.099,35
c. Jasa Penunjang Keuangan	23.157,75	22.966,84	23.180,04	23.777,19	24.806,09	26.626,42	28.545,22
d. Sewa Bangunan	67.405,69	71.093,43	77.302,98	80.835,92	85.489,11	85.761,19	86.720,38
e. Jasa Perusahaan	779,52	799,39	817,98	822,82	833,55	844,28	866,82
9. JASA-JASA							
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	182.224,17	184.743,43	191.034,58	205.596,48	210.370,04	212.781,25	223.751,62
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	81.573,96	82.249,50	82.269,37	84.156,91	85.509,92	87.026,01	87.563,83
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	81.573,96	82.249,50	82.269,37	84.156,91	85.509,92	87.026,01	87.563,83
b. Swasta	100.650,21	104.493,93	108.765,21	121.439,57	124.860,12	125.755,24	136.187,79
1. Sosial Kemasyarakatan	81.981,34	85.033,33	89.404,72	101.151,54	103.412,94	103.874,77	113.550,28
2. Hiburan & Rekreasi	409,54	426,27	454,39	467,23	508,31	512,34	510,85
3. Perorangan & Rumah tangga	18.259,33	19.034,33	18.906,10	19.820,80	20.938,87	21.368,13	22.126,66
JUMLAH	4.739.374,85	5.058.350,24	5.441.489,53	5.779.483,62	6.303.574,47	6.635.366,17	6.969.599,62

Sumber : BPS diolah

Lampiran 3 : PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK:2000 = 100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)
1. PERTANIAN							
a. Tanaman Bahan Makanan	26.124.205,65	26.417.424,36	27.725.086,08	27.157.595,62	28.606.237,28	29.924.642,25	31.002.199,11
b. Tanaman Perkebunan	18.491.012,77	18.558.288,15	19.610.997,42	19.575.711,22	20.679.734,58	21.507.487,27	22.120.970,77
c. Peternakan	2.546.825,16	2.584.584,25	2.515.998,01	2.460.627,43	2.634.349,91	2.747.119,29	2.854.270,38
d. Kehutanan	2.919.465,77	2.967.146,50	3.249.634,00	3.055.450,68	3.076.706,09	3.292.244,97	3.603.302,51
e. Perikanan	582.559,42	563.216,42	595.594,79	352.329,24	468.457,78	693.825,67	580.320,98
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.584.342,53	1.744.189,04	1.752.861,86	1.713.477,05	1.746.988,92	1.683.965,05	1.843.334,47
a. Minyak & Gas Bumi	1.100.330,84	1.190.371,57	1.227.651,53	1.295.356,44	1.330.759,58	1.454.230,59	1.678.299,61
b. Pertambangan tanpa Migas	44.205,40	45.628,62	39.789,59	44.158,96	46.930,36	53.101,63	60.206,63
c. Penggalian	8.037,27	7.856,69	6.757,15	5.171,30	3.909,66	4.217,43	3.402,94
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.048.088,17	1.136.886,26	1.181.104,79	1.246.026,18	1.279.919,56	1.396.911,53	1.614.690,04
a. Industri Migas	35.688.249,40	37.164.563,05	39.193.652,64	41.347.172,12	43.995.611,83	46.105.706,52	48.189.134,86
b. Industri Tanpa Migas	6.089.596,75	6.426.910,01	7.235.823,40	7.850.375,59	8.530.939,31	9.420.076,63	9.941.006,87
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	29.598.651,75	30.737.651,04	31.957.829,24	33.496.796,53	35.464.672,52	36.685.629,89	38.248.127,99
(i) Makanan & Minuman	16.342.143,82	17.074.861,30	17.900.927,51	18.739.942,22	20.067.363,10	20.610.449,65	21.694.511,74
(ii) Tembakau	9.630.341,43	10.095.089,52	10.905.232,95	11.601.800,24	12.599.191,93	12.960.432,57	14.097.995,17
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	6.711.803,39	6.979.771,68	6.995.694,56	7.136.141,98	7.468.171,17	7.650.017,08	7.596.516,57
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	5.381.208,34	5.336.361,22	5.635.439,80	5.870.075,15	6.105.704,55	6.404.647,76	6.587.578,14
4. Kertas & Brg. Cetakan	5.905.426,08	4.034.942,94	4.199.081,72	4.380.341,35	4.578.326,08	4.784.525,47	4.960.819,05
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	394.760,33	399.566,47	399.019,15	420.228,63	448.359,08	460.692,70	473.883,47
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	1.612.307,83	1.664.174,67	1.659.125,10	1.790.039,87	1.872.534,01	1.934.007,62	2.008.846,86
7. Logam Dasar Besi & Baja	973.344,86	1.002.492,74	1.081.274,97	1.144.682,40	1.187.760,97	1.241.181,33	1.208.662,38
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	94.334,50	96.926,15	104.200,69	105.980,78	107.618,08	115.669,69	120.944,26
9. Barang lainnya	769.566,85	799.180,91	841.110,90	895.639,41	940.595,46	973.141,38	1.022.307,19
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	125.358,93	129.144,44	137.649,40	149.866,72	156.411,19	161.314,29	170.574,90
a. Listrik	867.870,50	872.603,67	975.868,80	980.306,54	1.065.114,58	1.179.891,98	1.256.430,34
b. Gas	767.028,04	782.588,95	867.675,62	867.041,93	948.174,61	1.050.874,25	1.115.065,61
c. Air Bersih	100.842,46	90.014,72	108.193,18	113.264,61	116.939,97	129.017,73	141.364,73
5. BANGUNAN	5.262.490,31	5.532.343,12	6.116.817,45	6.907.250,46	7.448.715,40	7.960.948,49	8.446.566,35

lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	26.065.270,79	25.813.343,84	26.289.742,59	27.666.472,01	28.343.045,24	30.056.962,75	31.816.441,85
b. Hotel	22.394.280,98	21.825.611,45	22.115.903,80	23.398.086,90	23.663.715,24	24.971.531,25	26.409.786,49
c. Restoran	433.080,14	443.517,12	465.074,95	483.284,08	514.204,83	541.222,20	568.862,71
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.237.909,67	3.544.215,27	3.708.763,84	3.785.101,03	4.165.125,17	4.544.209,30	4.837.792,65
a. Pengangkutan	5.181.707,80	5.577.204,52	5.872.915,88	6.219.922,79	6.510.447,43	6.988.425,75	7.451.506,22
1. Angkutan Rel	4.197.706,93	4.492.273,76	4.708.978,36	4.947.080,47	5.137.714,02	5.503.681,50	5.768.697,08
2. Angkutan Jalan Raya	128.364,66	108.360,20	97.964,52	97.713,91	106.031,61	98.081,89	106.811,18
3. Angkutan Laut	3.304.927,54	3.577.137,55	3.750.518,13	3.944.692,63	4.099.640,82	4.405.386,93	4.628.423,46
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	495.534,08	519.270,17	556.448,65	578.779,74	597.313,71	614.735,33	632.070,87
5. Angkutan Udara	145,48	144,07	144,70	144,83	145,55	154,56	159,39
6. Jasa penunjang Angkutan	40.114,11	46.677,65	55.027,06	67.278,72	79.997,49	99.818,46	106.903,57
b. Komunikasi	228.621,06	240.684,12	248.875,21	258.470,64	263.584,84	285.504,33	294.326,41
1. Pos dan Telekomunikasi	984.000,87	1.084.930,76	1.163.937,52	1.272.842,32	1.372.733,41	1.484.744,25	1.682.809,14
2. Jasa penunjang Komunikasi	792.848,32	885.990,47	936.075,81	1.035.728,20	1.117.084,22	1.214.047,13	1.394.652,05
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	191.152,55	198.940,29	227.861,71	237.114,12	255.649,19	270.697,12	288.157,09
a. Bank	4.340.625,96	4.420.388,39	4.524.128,37	4.650.861,80	4.826.541,38	5.067.665,70	5.399.608,70
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	396.943,52	398.567,42	413.160,55	437.541,97	509.464,41	588.482,34	646.683,24
c. Jasa Penunjang Keuangan	581.300,74	595.639,58	623.544,13	646.986,33	673.493,34	694.169,58	732.179,88
d. Sewa Bangunan	105.452,23	108.649,06	114.184,97	119.391,83	131.702,54	137.022,94	143.278,02
e. Jasa Perusahaan	3.081.465,03	3.099.635,20	3.185.337,53	3.253.378,81	3.314.259,78	3.441.219,66	3.641.044,03
9. JASA-JASA	175.464,44	217.897,13	187.901,19	193.582,86	197.621,31	206.771,18	216.423,53
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	10.070.554,46	11.828.159,77	11.112.677,79	12.941.524,67	13.663.399,59	14.312.739,85	15.442.467,70
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	7.645.950,27	9.321.685,56	8.523.867,32	10.316.786,54	10.972.181,01	11.480.098,70	12.362.540,29
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	7.645.950,27	9.321.685,56	8.523.867,32	10.316.786,54	10.972.181,01	11.480.098,70	12.362.540,29
b. Swasta	2.424.604,19	2.506.474,21	2.588.810,47	2.624.738,13	2.691.218,58	2.832.641,15	3.079.927,41
1. Sosial Kemasyarakatan	842.626,41	866.948,90	879.304,54	897.800,31	924.881,52	981.865,32	1.052.166,88
2. Hiburan & Rekreasi	92.764,29	93.203,66	93.361,01	93.764,88	95.257,54	98.648,95	102.565,31
3. Perorangan & Rumah tangga	1.489.213,49	1.546.321,65	1.616.144,92	1.633.172,94	1.671.079,52	1.752.126,88	1.925.195,22
JUMLAH	114.701.304,81	118.816.400,29	123.038.541,13	129.166.462,45	135.789.872,31	143.051.213,88	150.682.654,74

Sumber : BPS diolah

Lampiran 4 : PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau
Provinsi Jawa Tengah (ADHK:2000 = 100) Menurut
Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA (1)	2000-2006						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN							
a. Tanaman Bahan Makanan	26.124.205,65	26.417.424,36	27.725.086,08	27.157.595,62	28.606.237,28	29.924.642,25	31.002.199,11
b. Tanaman Perkebunan	18.491.012,77	18.558.288,15	19.610.997,42	19.575.711,22	20.679.734,58	21.507.487,27	22.120.970,77
c. Peternakan	2.546.825,16	2.584.584,25	2.515.998,01	2.460.627,43	2.634.349,91	2.747.119,29	2.854.270,38
d. Kehutanan	2.919.465,77	2.967.146,50	3.249.634,00	3.055.450,68	3.076.706,09	3.292.244,97	3.603.302,51
e. Perikanan	582.559,42	563.216,42	595.594,79	352.329,24	468.457,78	693.825,67	580.320,98
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN							
a. Minyak & Gas Bumi	44.205,40	45.628,62	39.789,59	44.158,96	46.930,36	53.101,63	60.206,63
b. Pertambangan tanpa Migas	8.037,27	7.856,69	6.757,15	5.171,30	3.909,66	4.217,43	3.402,94
c. Penggalian	1.048.088,17	1.136.886,26	1.181.104,79	1.246.026,18	1.279.919,56	1.396.911,53	1.614.690,04
3. INDUSTRI PENGOLAHAN							
a. Industri Migas	28.976.446,11	30.184.789,37	32.197.958,08	34.209.030,14	36.527.440,66	38.455.689,44	40.592.618,29
b. Industri Tanpa Migas	6.089.596,75	6.426.910,01	7.235.823,40	7.850.375,59	8.530.939,31	9.420.076,63	9.941.006,87
1. Makanan & Minuman	22.886.849,36	23.757.879,36	24.962.134,68	26.358.654,55	27.996.501,35	29.035.612,81	30.651.611,42
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	9.630.341,43	10.095.089,82	10.905.232,95	11.601.800,24	12.599.191,93	12.960.432,57	14.097.993,17
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	5.361.208,54	5.536.361,22	5.635.439,80	5.870.075,15	6.105.704,55	6.404.647,76	6.587.578,14
4. Kertas & Brg. Cetak	3.905.476,08	4.034.942,94	4.199.081,72	4.380.341,35	4.578.326,08	4.784.523,47	4.960.819,05
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	394.760,33	399.566,47	399.019,15	420.228,63	448.359,08	460.692,70	473.883,47
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	1.612.507,83	1.664.174,67	1.659.125,10	1.790.039,87	1.872.534,01	1.934.007,62	2.008.846,86
7. Logam Dasar Besi & Baja	973.344,86	1.002.492,74	1.081.274,97	1.144.682,40	1.187.760,97	1.241.181,33	1.208.662,38
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	94.334,50	96.926,15	104.200,69	105.980,78	107.618,08	115.669,69	120.944,26
9. Barang lainnya	769.566,85	799.180,91	841.110,90	895.639,41	940.593,46	973.141,38	1.022.307,19
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH							
a. Listrik	125.358,93	129.144,44	137.649,40	149.866,72	156.411,19	161.314,29	170.574,90
b. Gas	867.870,50	874.603,67	975.868,80	980.306,54	1.065.114,58	1.179.891,98	1.256.430,34
c. Air Bersih	767.028,04	782.588,95	867.675,62	867.041,93	948.174,61	1.050.874,25	1.115.065,61
5. BANGUNAN							
	100.842,46	90.014,72	108.193,18	113.264,61	116.939,97	129.017,73	141.364,73
	5.262.490,31	5.532.343,12	6.116.817,45	6.907.250,46	7.448.715,40	7.960.948,49	8.446.566,35

lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	26.065.270,79	25.813.343,84	26.289.742,59	27.666.472,01	28.343.045,24	30.056.962,75	31.816.441,85
b. Hotel	22.394.280,98	21.825.611,45	22.115.903,80	23.398.086,90	23.663.715,24	24.971.531,25	26.409.786,49
c. Restoran	433.080,14	443.517,12	465.074,95	483.284,08	514.204,83	541.222,20	568.862,71
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.237.909,67	3.544.215,27	3.708.763,84	3.785.101,03	4.165.125,17	4.544.209,30	4.837.792,65
a. Pengangkutan	5.181.707,80	5.577.204,52	5.872.915,88	6.219.922,79	6.510.447,43	6.988.425,75	7.451.506,22
1. Angkutan Rel	4.197.706,93	4.492.273,76	4.708.978,36	4.947.080,47	5.137.714,02	5.503.681,50	5.768.697,08
2. Angkutan Jalan Raya	128.364,66	108.360,20	97.964,52	97.713,91	106.031,61	98.081,89	106.811,18
3. Angkutan Laut	3.304.927,54	3.577.137,55	3.750.518,13	3.944.692,63	4.099.640,82	4.405.386,93	4.628.423,46
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	495.334,08	519.270,17	556.448,65	578.779,74	597.313,71	614.735,33	632.070,87
5. Angkutan Udara	145,48	144,07	144,79	144,83	145,55	154,56	159,59
6. Jasa penunjang Angkutan	40.114,11	46.677,65	55.027,06	67.278,72	79.997,49	99.818,46	106.905,37
b. Komunikasi	228.621,06	240.684,12	248.875,21	258.470,64	263.584,84	285.504,33	294.326,41
1. Pos dan Telekomunikasi	984.000,87	1.084.930,76	1.163.937,52	1.272.842,32	1.372.733,41	1.484.744,25	1.682.809,14
2. Jasa penunjang Komunikasi	792.848,32	885.990,47	936.075,81	1.035.728,20	1.117.084,22	1.214.047,13	1.394.652,05
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	191.152,55	198.940,29	227.861,71	237.114,12	255.649,19	270.697,12	288.157,09
a. Bank	4.340.625,96	4.440.388,39	4.534.128,37	4.650.861,80	4.826.541,38	5.067.665,70	5.399.608,70
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	396.943,52	398.567,42	413.160,55	437.541,97	509.464,41	588.482,34	646.683,24
c. Jasa Penunjang Keuangan	581.300,74	595.639,58	623.544,13	646.966,33	673.493,34	694.169,58	752.179,88
d. Sewa Bangunan	105.452,23	108.649,06	114.184,97	119.391,83	131.702,54	137.022,94	143.278,02
e. Jasa Perusahaan	3.081.465,03	3.099.635,20	3.185.337,53	3.253.378,81	3.314.259,78	3.441.219,66	3.641.044,03
9. JASA-JASA	175.464,44	217.897,13	187.901,19	193.582,86	197.621,31	206.771,18	216.423,53
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	10.070.554,46	11.838.159,77	11.112.677,79	12.941.524,67	13.663.399,59	14.312.739,85	15.442.467,70
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	7.645.950,27	9.321.685,56	8.523.867,32	10.316.786,54	10.972.181,01	11.480.098,70	12.362.540,29
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	7.645.930,27	9.321.685,56	8.523.867,32	10.316.786,54	10.972.181,01	11.480.098,70	12.362.540,29
b. Swasta	2.424.604,19	2.506.474,21	2.588.810,47	2.624.738,13	2.691.218,58	2.832.641,15	3.079.927,41
1. Sosial Kemasyarakatan	842.626,41	866.948,90	879.304,54	897.800,31	924.881,52	981.865,32	1.052.166,88
2. Hiburan & Rekreasi	92.764,29	93.203,66	93.361,01	93.764,88	95.237,54	98.648,95	102.565,31
3. Perorangan & Rumahtangga	1.489.213,49	1.546.321,65	1.616.144,92	1.633.172,94	1.671.079,52	1.752.126,88	1.923.193,22
JUMLAH	107.989.502,42	111.836.628,61	116.042.846,57	122.038.320,47	128.321.701,14	135.401.196,80	143.086.138,17

Sumber : BPS diolah

Lampiran 5 : PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau
Kab./Kota se Provinsi Jawa Tengah (ADHK:2000=100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)
1. PERTANIAN	746.403,98	754.783,55	792.145,32	775.931,30	817.321,07	854.989,78	885.777,12
a. Tanaman Bahan Makanan	528.314,65	530.236,80	560.314,21	559.306,03	590.849,56	614.499,64	632.027,74
b. Tanaman Perkebunan	72.766,43	73.845,26	71.885,66	70.303,64	75.267,14	78.489,12	81.550,58
c. Peternakan	83.413,31	84.775,61	92.846,69	87.298,59	87.905,89	94.064,14	102.951,50
d. Kehutanan	16.644,55	16.091,90	17.016,99	10.066,55	13.384,51	19.823,59	16.580,60
e. Perikanan	45.266,93	49.833,97	50.081,77	48.956,49	49.913,97	48.113,29	52.666,70
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	31.438,02	34.010,62	35.075,76	37.010,18	38.021,70	41.549,45	47.951,42
a. Minyak & Gas Bumi	1.263,01	1.303,67	1.136,85	1.261,68	1.340,87	1.517,19	1.720,19
b. Pertambangan tanpa Migas	229,64	224,48	193,06	147,75	111,70	120,50	97,23
c. Penggalian	29.945,38	32.482,46	33.745,85	35.600,75	36.569,13	39.911,76	46.134,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	827.898,46	862.422,55	919.941,66	977.400,56	1.043.641,16	1.098.733,98	1.159.789,09
a. Industri Migas	173.988,48	183.626,00	206.737,81	224.296,45	243.741,12	269.145,05	284.028,77
b. Industri Tanpa Migas	653.909,98	678.796,55	713.203,85	753.104,42	799.900,04	829.588,94	875.760,33
1. Makanan & Minuman	275.152,61	288.431,14	311.578,08	331.480,01	359.976,91	370.298,07	402.799,86
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	153.748,82	158.181,75	161.012,57	162.716,43	174.448,70	182.989,94	188.216,52
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	111.583,60	115.284,08	119.973,76	125.152,61	130.809,32	136.700,73	141.737,69
4. Kertas & Brg. Cetakan	11.278,87	11.416,18	11.400,55	12.006,33	12.810,26	13.162,65	13.539,53
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	46.071,65	47.547,85	47.403,57	51.144,00	53.500,97	55.257,36	57.395,62
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	27.809,85	28.642,65	30.893,57	32.705,21	33.936,03	35.462,32	34.533,21
7. Logam Dasar Besi & Baja	2.695,27	2.769,32	2.977,16	3.028,02	3.074,80	3.304,85	3.455,55
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	21.987,62	22.833,74	24.031,74	25.589,70	26.874,16	27.804,04	29.208,78
9. Barang lainnya	3.381,68	3.689,84	3.932,84	4.281,91	4.468,89	4.608,98	4.873,57
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	24.796,30	24.931,53	27.881,97	28.008,76	30.431,85	33.711,20	35.898,01
a. Listrik	21.915,09	22.359,68	24.790,73	24.772,63	27.090,70	30.024,98	31.859,02
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2.881,21	2.571,85	3.091,23	3.236,13	3.341,14	3.686,22	4.038,99
5. BANGUNAN	150.356,87	158.066,95	174.766,21	197.350,01	212.850,44	227.455,67	241.330,47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	744.722,02	737.524,11	751.135,50	790.470,63	809.801,29	858.770,36	909.041,20
b. Hotel	639.836,60	623.488,90	631.882,97	668.516,77	676.106,15	713.472,32	754.565,33
c. Restoran	12.373,72	12.671,92	13.287,86	13.808,12	14.691,57	15.463,49	16.253,22
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	92.511,70	101.263,29	105.964,68	108.145,74	119.003,58	129.834,55	138.222,65
a. Pengangkutan	148.048,79	159.348,70	167.797,60	177.712,08	186.012,78	199.669,31	212.900,18
1. Angkutan Rel	119.934,48	128.350,68	134.542,24	141.345,16	146.791,83	157.248,04	164.819,92
2. Angkutan Jalan Raya	3.667,56	3.096,01	2.798,99	2.791,83	3.029,47	2.802,34	3.051,75
3. Angkutan Laut	94.426,50	102.203,93	107.157,66	112.705,50	116.875,45	125.868,20	132.240,67
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	14.158,12	14.836,29	15.898,53	16.336,56	17.066,11	17.563,87	18.039,17
5. Angkutan Udara	4,16	4,12	4,14	4,14	4,16	4,42	4,56
6. Jasa penunjang Angkutan	4.146,12	1.333,65	1.572,20	1.922,25	2.285,64	2.851,96	3.054,44
b. Komunikasi	6.532,03	6.876,69	7.110,72	7.384,88	7.531,00	8.157,27	8.409,33
1. Pos dan Telekomunikasi	28.114,31	30.998,02	33.255,36	36.366,92	39.220,95	42.421,26	48.080,26
2. Jasa penunjang Komunikasi	22.652,81	25.314,01	26.745,02	29.592,23	31.916,69	34.687,06	39.847,20
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3.461,50	5.684,01	6.510,33	6.774,69	7.304,26	7.734,20	8.233,06
a. Bank	124.017,88	126.296,81	129.260,81	132.881,77	137.901,18	144.790,45	154.274,53
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	11.341,24	11.387,64	11.804,59	12.501,20	14.556,13	16.813,78	18.476,66
c. Jasa Penunjang Keuangan	16.608,59	17.018,27	17.815,55	18.484,75	19.242,67	19.833,42	21.490,85
d. Sewa Bangunan	3.012,92	3.104,26	3.282,43	3.411,20	3.762,93	3.914,94	4.093,66
e. Jasa Perusahaan	88.041,86	88.561,01	91.009,64	92.953,68	94.693,14	98.320,56	104.029,83
9. JASA-JASA	5.013,27	6.225,63	5.368,61	5.530,94	5.646,32	5.907,75	6.183,53
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	287.730,13	337.947,42	317.505,08	369.757,85	390.382,85	408.935,42	441.213,36
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	218.455,72	266.333,87	243.539,07	294.765,33	313.490,89	328.002,82	353.215,44
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	218.455,72	266.333,87	243.539,07	294.765,33	313.490,89	328.002,82	353.215,44
b. Swasta	69.274,41	71.613,55	73.966,01	74.992,52	76.891,96	80.932,60	87.997,93
1. Sosial Kemasyarakatan	24.075,04	24.769,97	25.122,99	25.651,44	26.425,19	28.053,29	30.061,91
2. Hiburan & Rekreasi	2.650,41	2.662,96	2.667,46	2.679,00	2.721,64	2.818,54	2.930,44
3. Perorangan & Rumah tangga	42.548,96	44.180,62	46.175,57	46.662,08	47.745,13	50.060,77	55.005,58
JUMLAH	3.085.414,35	3.195.332,25	3.315.509,90	3.486.523,44	3.666.334,32	3.868.605,62	4.088.175,38

Sumber : BPS diolah

Lampiran 6 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus (ADHK :
2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	RATA-RATA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN	7,08	5,54	(5,07)	1,45	(3,42)	4,54	1,58
a. Tanaman Bahan Makanan	6,06	3,43	(2,36)	4,47	(4,56)	7,00	2,25
b. Tanaman Perkebunan	6,29	8,96	3,33	1,30	(7,86)	(6,43)	0,74
c. Peternakan	10,58	10,21	(16,04)	(7,64)	2,66	1,84	(0,20)
d. Kehutanan	5,72	0,19	(6,55)	(7,87)	(3,52)	(13,00)	(4,36)
e. Perikanan	2,83	5,54	5,25	(7,47)	9,71	5,70	3,45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	11,99	7,60	18,16	15,23	6,80	6,66	10,98
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian	11,99	7,60	18,16	15,23	6,80	6,66	10,98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,19	5,77	5,70	8,94	5,32	2,02	5,64
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	6,19	5,77	5,70	8,94	5,32	2,02	5,64
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	6,42	6,09	5,63	9,78	5,70	1,19	5,77
(i) Makanan & Minuman	11,19	18,97	8,78	14,41	12,72	8,64	12,40
(ii) Tembakau	5,07	2,23	4,54	8,11	3,01	(1,94)	3,46
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	(0,41)	3,85	4,74	2,39	2,73	9,92	3,82
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	1,17	6,18	4,92	2,82	2,29	9,78	4,49
4. Kertas & Brg. Cetakan	0,16	2,01	5,40	5,00	3,18	6,57	3,70
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	12,77	1,78	8,44	3,00	2,95	7,38	5,98
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	5,64	10,00	6,65	2,04	1,76	7,62	5,58
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	15,58	7,32	7,00	3,39	2,76	7,41	7,16
9. Barang lainnya	27,79	6,09	10,30	1,86	2,37	7,38	8,97
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	10,88	11,77	2,63	10,29	(0,76)	4,27	6,41
a. Listrik	10,65	11,65	2,35	10,35	(1,31)	3,86	6,14
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	19,45	15,96	12,10	8,57	16,23	15,03	14,50
5. BANGUNAN	21,95	11,95	30,88	23,88	14,97	2,80	17,38

lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,29	4,45	5,71	9,25	2,98	2,47	5,00
b. Hotel	5,39	4,54	5,99	9,66	2,88	2,37	5,11
c. Restoran	(3,73)	(6,19)	4,92	4,76	(14,94)	(6,99)	(3,95)
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	3,49	2,75	0,44	1,25	5,33	4,53	2,95
1. Angkutan Rel	8,15	7,55	8,55	7,31	5,71	5,59	7,14
2. Angkutan Jalan Raya	6,16	5,40	8,98	2,79	2,70	0,13	4,32
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	6,27	5,36	9,10	2,70	2,68	0,04	4,32
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	-	-	-	-	-	-	-
b. Komunikasi	0,59	7,63	1,89	7,79	3,83	4,88	4,40
1. Pos dan Telekomunikasi	13,93	13,38	7,46	18,84	12,34	16,63	13,71
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	6,11	6,63	4,50	6,12	5,18	3,82	5,39
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	8,61	6,45	4,94	6,88	8,60	5,05	6,74
c. Jasa Penunjang Keuangan	(0,82)	0,93	2,58	4,33	7,34	7,21	3,55
d. Sewa Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
e. Jasa Perusahaan	5,47	8,73	4,57	5,76	0,32	1,12	4,29
9. JASA-JASA							
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	2,55	2,33	0,59	1,30	1,29	2,67	1,78
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	2,48	2,30	7,62	2,32	1,15	5,16	3,48
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	0,83	0,02	2,29	1,61	1,77	0,62	1,19
b. Swasta	0,83	0,02	2,29	1,61	1,77	0,62	1,19
1. Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
2. Hiburan & Rekreasi	3,82	4,09	11,65	2,82	0,72	8,30	5,17
3. Perorangan & Rumahtangga	3,72	5,14	13,14	2,24	0,45	9,31	5,58
PDRB	4,09	6,60	2,83	8,79	0,79	(0,29)	3,75
	4,24	(0,67)	4,84	5,64	2,05	3,55	3,25
Sumber : BPS diolah	6,06	5,44	5,56	8,70	4,40	2,41	5,41

Lampiran 7 : Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok/Pengolahan
Tembakau Kabupaten Kudus (ADHK:2000 = 100)
Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004 (5)	2005 (6)	2006 (7)	RATA-RATA (8)
1. PERTANIAN	7,08	5,54	(5,07)	1,45	(3,42)	4,54	1,58
a. Tanaman Bahan Makanan	6,06	3,43	(2,36)	4,47	(4,56)	7,00	2,25
b. Tanaman Perkebunan	6,29	8,96	3,33	1,30	(7,86)	(6,43)	0,74
c. Peternakan	10,58	10,21	(16,04)	(7,64)	2,66	1,84	(0,20)
d. Kehutanan	5,72	0,19	(6,55)	(7,87)	(3,52)	(13,00)	(4,36)
e. Perikanan	2,83	5,54	5,25	(7,47)	9,71	5,70	3,45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	11,99	7,60	18,16	15,23	6,80	6,66	10,98
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian	11,99	7,60	18,16	15,23	6,80	6,66	10,98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	8,42	12,61	7,73	10,35	9,19	8,26	9,41
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	8,42	12,61	7,73	10,35	9,19	8,26	9,41
1. Makanan & Minuman	11,19	18,97	8,78	14,41	12,72	8,64	12,40
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	(0,41)	3,85	4,74	2,39	2,73	9,92	3,82
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	1,17	6,18	4,92	2,82	2,29	9,78	4,49
4. Kertas & Brg. Cetakan	0,16	2,01	5,40	5,00	3,18	6,57	3,70
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	12,77	1,78	8,44	3,00	2,95	7,38	5,98
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	5,64	10,00	6,65	2,04	1,76	7,62	5,58
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	15,58	7,32	7,00	3,39	2,76	7,41	7,16
9. Barang lainnya	27,79	6,09	10,30	1,86	2,37	7,38	8,97
4. LISTRIK, GAS & AJR BERSIH	10,88	11,77	2,63	10,29	(0,76)	4,27	6,41
a. Listrik	10,65	11,65	2,35	10,35	(1,31)	3,86	6,14
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	19,45	15,96	12,10	8,57	16,23	15,03	14,50
5. BANGUNAN	21,95	11,95	30,88	23,88	14,97	2,80	17,38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,29	4,45	5,71	9,25	2,98	2,47	5,00
b. Hotel	5,39	4,54	5,99	9,66	2,88	2,37	5,11
c. Restoran	(3,73)	(6,19)	4,92	4,76	(14,94)	(6,99)	(3,95)
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	3,49	2,75	0,44	1,25	5,33	4,53	2,95
1. Angkutan Rel	8,15	7,55	8,55	7,31	5,71	5,59	7,14
2. Angkutan Jalan Raya	6,16	5,40	8,98	2,79	2,70	0,13	4,32
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	6,27	5,36	9,10	2,70	2,68	0,04	4,32
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	-	-	-	-	-	-	-
b. Komunikasi	0,59	7,63	1,89	7,79	3,83	4,88	4,40
1. Pos dan Telekomunikasi	13,93	13,38	7,46	18,84	12,34	16,63	13,71
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	6,11	6,63	4,50	6,12	5,18	3,82	5,39
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	8,61	6,45	4,94	6,88	8,60	5,05	6,74
c. Jasa Penunjang Keuangan	(0,82)	0,93	2,58	4,33	7,34	7,21	3,55
d. Sewa Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
e. Jasa Perusahaan	5,47	8,73	4,57	5,76	0,32	1,12	4,29
9. JASA-JASA							
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	2,55	2,33	0,59	1,30	1,29	2,67	1,78
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	2,48	2,30	7,62	2,32	1,15	5,16	3,48
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	0,83	0,02	2,29	1,61	1,77	0,62	1,19
b. Swasta	0,83	0,02	2,29	1,61	1,77	0,62	1,19
1. Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
2. Hiburan & Rekreasi	3,82	4,09	11,65	2,82	0,72	8,30	5,17
3. Perorangan & Rumah tangga	3,72	5,14	13,14	2,24	0,45	9,31	5,58
PDRB	4,09	6,60	2,83	8,79	0,79	(0,29)	3,75
	4,24	(0,67)	4,84	5,64	2,05	3,55	3,25
Sumber : BPS diolah	6,73	7,57	6,21	9,07	5,26	5,04	6,64

Lampiran 8 : Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK
2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	RATA-RATA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN	1,12	4,95	(2,05)	5,33	4,61	3,60	2,89
a. Tanaman Bahan Makanan	0,36	5,67	(0,18)	5,64	4,00	2,85	3,03
b. Tanaman Perkebunan	1,48	(2,65)	(2,20)	7,06	4,28	3,90	1,92
c. Peternakan	1,63	9,52	(5,98)	0,70	7,01	9,45	3,57
d. Kehutanan	(3,32)	5,75	(40,84)	32,96	48,11	(16,36)	(0,06)
e. Perikanan	10,09	0,50	(2,25)	1,96	(3,61)	9,46	2,56
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8,18	3,13	5,51	2,73	9,28	15,41	7,29
a. Minyak & Gas Bumi	3,22	(12,80)	10,98	6,28	13,15	13,38	5,28
b. Pertambangan tanpa Migas	(2,25)	(13,99)	(23,47)	(24,40)	7,87	(19,31)	(13,35)
c. Penggalian	8,47	3,89	5,50	2,72	9,14	15,59	7,47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,14	5,46	5,49	6,41	4,80	4,52	5,13
a. Industri Migas	5,54	12,59	8,49	8,67	10,42	5,53	8,51
b. Industri Tanpa Migas	3,85	3,97	4,82	5,87	3,44	4,26	4,37
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	4,48	4,84	4,69	7,08	2,71	5,26	4,84
(i) Makanan & Minuman	4,83	8,03	6,39	8,60	2,87	8,78	6,56
(ii) Tembakau	3,99	0,23	2,04	4,62	2,43	(0,70)	2,09
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	2,88	1,79	4,16	4,01	4,90	2,86	3,43
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	3,32	4,07	4,32	4,52	4,50	3,68	4,07
4. Kertas & Brg. Cetakan	1,22	(0,14)	5,32	6,69	2,75	2,86	3,09
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	3,20	(0,30)	7,89	4,61	3,28	3,87	3,73
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	2,99	7,86	5,86	3,76	4,50	(2,62)	3,67
7. Logam Dasar Besi & Baja	2,75	7,51	1,71	1,54	7,48	4,56	4,23
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	3,85	5,25	6,48	5,02	3,46	5,05	4,85
9. Barang lainnya	3,02	6,59	8,88	4,37	3,13	5,74	5,27
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,55	11,83	0,45	8,65	10,78	6,49	6,36
a. Listrik	2,03	10,87	(0,07)	9,36	10,83	6,11	6,43
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	(10,74)	20,19	4,69	3,24	10,33	9,57	5,79
5. BANGUNAN	5,13	10,56	12,92	7,84	6,88	6,10	8,21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	(0,97)	1,85	5,24	2,45	6,05	5,85	3,38
b. Hotel	(2,54)	1,33	5,80	1,14	5,53	5,76	2,79
c. Restoran		4,86	3,92	6,40	5,25	5,11	4,65
		4,64	2,06	10,04	9,10	6,46	6,92
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	7,63	5,30	5,91	4,67	7,34	6,63	6,24
1. Angkutan Rel	7,02	4,82	5,06	3,85	7,12	4,82	5,44
	(15,58)	(9,59)	(0,26)	8,51	(7,50)	8,90	(3,02)
2. Angkutan Jalan Raya	8,24	4,85	5,18	3,70	7,69	5,06	5,77
3. Angkutan Laut	4,79	7,16	4,01	3,20	2,92	2,82	4,14
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	(0,97)	0,50	0,03	0,50	6,19	3,25	1,55
5. Angkutan Udara	16,36	17,89	22,26	18,90	24,78	7,10	17,75
6. Jasa penunjang Angkutan	5,28	3,40	3,86	1,98	8,32	3,09	4,30
b. Komunikasi	10,26	7,28	9,36	7,85	8,16	13,34	9,36
1. Pos dan Telekomunikasi	11,75	5,65	10,65	7,85	8,68	14,88	9,87
2. Jasa penunjang Komunikasi	4,07	14,54	4,06	7,82	5,89	6,45	7,08
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	1,84	2,35	2,80	3,78	5,00	6,55	3,71
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,41	3,66	5,90	16,44	15,51	9,89	8,47
c. Jasa Penunjang Keuangan	2,47	4,68	3,76	4,10	3,07	8,36	4,39
d. Sewa Bangunan	3,03	5,10	4,56	10,31	4,04	4,56	5,24
e. Jasa Perusahaan	0,59	2,76	2,14	1,87	3,83	5,81	2,82
	24,18	(13,77)	3,02	2,09	4,63	4,67	3,56
9. JASA-JASA	17,45	(6,05)	16,46	5,58	4,75	7,89	7,39
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	21,92	(8,56)	21,03	6,35	4,63	7,69	8,34
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	21,92	(8,56)	21,03	6,35	4,63	7,69	8,34
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	4,63	7,69	8,34
b. Swasta	3,38	3,28	1,39	2,53	5,25	8,73	4,07
1. Sosial Kemasyarakatan	2,89	1,43	2,10	3,02	6,16	7,16	3,77
2. Hiburan & Rekreasi	0,47	0,17	0,43	1,59	3,56	3,97	1,69
3. Perorangan & Rumah tangga	3,83	4,52	1,05	2,32	4,85	9,88	4,37
PDRB	3,59	3,55	4,98	5,13	5,35	5,33	4,65

Sumber : BPS diolah

Lampiran 9 : Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan
 Tembaku Provinsi Jawa Tengah (ADHK 2000 = 100)
 Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006.

LAPANGAN USAHA (1)	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004 (5)	2005 (6)	2006 (7)	RATA-RATA (8)
1. PERTANIAN							
a. Tanaman Bahan Makanan	1,12	4,95	(2,05)	5,33	4,61	3,60	2,89
b. Tanaman Perkebunan	0,36	5,67	(0,18)	5,64	4,00	2,85	3,03
c. Peternakan	1,48	(2,65)	(2,20)	7,06	4,28	3,90	1,92
d. Kchutanan	1,63	9,52	(5,98)	0,70	7,01	9,45	3,57
e. Perikanan	(3,32)	5,75	(40,84)	32,96	48,11	(16,36)	(0,06)
	10,09	0,50	(2,25)	1,96	(3,61)	9,46	2,56
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN							
a. Minyak & Gas Bumi	8,18	3,13	5,51	2,73	9,28	15,41	7,29
b. Pertambangan tanpa Migas	3,22	(12,80)	10,98	6,28	13,15	13,38	5,28
c. Penggalian	(2,25)	(13,99)	(23,47)	(24,40)	7,87	(19,31)	(13,35)
	8,47	3,89	5,50	2,72	9,14	15,59	7,47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN							
a. Industri Migas	4,17	6,67	6,25	6,78	5,28	5,56	5,78
b. Industri Tanpa Migas	5,54	12,59	8,49	8,67	10,42	5,53	8,51
1. Makanan & Minuman	3,81	5,07	5,59	6,21	3,71	5,57	4,99
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	4,83	8,03	6,39	8,60	2,87	8,78	6,56
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	2,88	1,79	4,16	4,01	4,90	2,86	3,43
4. Kertas & Brg. Cetakan	3,32	4,07	4,32	4,52	4,50	3,68	4,07
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	1,22	(0,14)	5,32	6,69	2,75	2,86	3,09
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	3,20	(0,30)	7,89	4,61	3,28	3,87	3,73
7. Logam Dasar Besi & Baja	2,99	7,86	5,86	3,76	4,50	(2,62)	3,67
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	2,75	7,51	1,71	1,54	7,48	4,56	4,23
9. Barang lainnya	3,85	5,25	6,48	5,02	3,46	5,05	4,85
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH							
a. Listrik	3,02	6,59	8,88	4,37	3,13	5,74	5,27
b. Gas	0,55	11,83	0,45	8,65	10,78	6,49	6,36
c. Air Bersih	2,03	10,87	(0,07)	9,36	10,83	6,11	6,43
	(10,74)	-	-	-	-	-	-
5. BANGUNAN							
	5,13	10,56	12,92	7,84	6,88	6,10	8,21
	20,19	4,69	10,33	9,57	5,79	5,79	5,79

(1)	lanjutan						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN							
a. Perdagangan Besar & Eceran	(0,97)	1,85	5,24	2,45	6,05	5,85	3,38
b. Hotel	(2,54)	1,33	5,80	1,14	5,53	5,76	2,79
c. Restoran	2,41	4,86	3,92	6,40	5,25	5,11	4,65
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI							
a. Pengangkutan	9,46	4,64	2,06	10,04	9,10	6,46	6,92
1. Angkutan Rel	7,63	5,30	5,91	4,67	7,34	6,63	6,24
2. Angkutan Jalan Raya	7,02	4,82	5,06	3,85	7,12	4,82	5,44
3. Angkutan Laut	(15,58)	(9,59)	(0,26)	8,51	(7,50)	8,90	(3,02)
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	8,24	4,85	5,18	3,70	7,69	5,06	5,77
5. Angkutan Udara	4,79	7,16	4,01	3,20	2,92	2,82	4,14
6. Jasa penunjang Angkutan	(0,97)	0,50	0,03	0,50	6,19	3,25	1,55
b. Komunikasi	16,36	17,89	22,26	18,90	24,78	7,10	17,75
1. Pos dan Telekomunikasi	5,28	3,40	3,86	1,98	8,32	3,09	4,30
2. Jasa penunjang Komunikasi	10,26	7,28	9,36	7,85	8,16	13,34	9,36
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN							
a. Bank	11,75	5,65	10,65	7,85	8,68	14,88	9,87
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4,07	14,54	4,06	7,82	5,89	6,45	7,08
c. Jasa Penunjang Keuangan	1,84	2,35	2,80	3,78	5,00	6,55	3,71
d. Sewa Bangunan	0,41	3,66	5,90	16,44	15,51	9,89	8,47
e. Jasa Perusahaan	2,47	4,68	3,76	4,10	3,07	8,36	4,39
9. JASA-JASA	3,03	5,10	4,56	10,31	4,04	4,56	5,24
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0,59	2,76	2,14	1,87	3,83	5,81	2,82
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	24,18	(13,77)	3,02	2,09	4,63	4,67	3,56
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	17,45	(6,05)	16,46	5,58	4,75	7,89	7,39
b. Swasta	21,92	(8,56)	21,03	6,35	4,63	7,69	8,34
1. Sosial Kemasyarakatan	21,92	(8,56)	21,03	6,35	4,63	7,69	8,34
2. Hiburan & Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
3. Perorangan & Rumah tangga	3,38	3,28	1,39	2,53	5,25	8,73	4,07
PDRB	2,89	1,43	2,10	3,02	6,16	7,16	3,77
	0,47	0,17	0,43	1,59	3,56	3,97	1,69
	3,83	4,52	1,05	2,32	4,85	9,88	4,37
Sumber : BPS diolah	3,56	3,76	5,16	5,16	5,52	5,68	4,80

Lampiran 10 : Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Kudus (ADHK :
2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)	RATA-RATA (9)
1. PERTANIAN	4,08	4,12	4,12	3,71	3,46	3,20	3,27	3,71
a. Tanaman Bahan Makanan	2,74	2,74	2,69	2,49	2,39	2,19	2,28	2,50
b. Tanaman Perkebunan	0,39	0,39	0,40	0,40	0,37	0,33	0,30	0,37
c. Peternakan	0,91	0,95	1,00	0,79	0,67	0,66	0,66	0,81
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	60,58	60,65	60,84	60,92	61,05	61,59	61,35	61,00
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	60,58	60,65	60,84	60,92	61,05	61,59	61,35	61,00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	51,77	51,95	52,27	52,30	52,83	53,48	52,84	52,49
(i) Makanan & Minuman	11,41	11,96	13,49	13,90	14,63	15,80	16,76	13,99
(ii) Tembakau	40,37	39,99	38,78	38,40	38,19	37,68	36,08	38,50
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	1,48	1,39	1,37	1,36	1,28	1,26	1,35	1,36
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	0,37	0,35	0,35	0,35	0,33	0,32	0,35	0,35
4. Kertas & Brg. Cetakan	4,39	4,14	4,01	4,00	3,87	3,82	3,98	4,03
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	0,47	0,50	0,48	0,50	0,47	0,46	0,49	0,48
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,19
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	1,48	1,61	1,64	1,66	1,58	1,56	1,63	1,60
9. Barang lainnya	0,42	0,51	0,51	0,54	0,50	0,49	0,52	0,50
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,30	0,31	0,33	0,32	0,33	0,31	0,32	0,32
a. Listrik	0,29	0,30	0,32	0,31	0,32	0,30	0,30	0,31
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. BANGUNAN	0,80	0,93	0,98	1,22	1,39	1,53	1,53	1,20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN								
a. Perdagangan Besar & Eceran	28,05	27,85	27,58	27,62	27,76	27,39	27,40	27,67
b. Hotel	26,57	26,40	26,18	26,28	26,51	26,13	26,12	26,31
c. Restoran	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI								
a. Pengangkutan	1,47	1,43	1,39	1,33	1,24	1,25	1,27	1,34
1. Angkutan Rel	1,68	1,71	1,75	1,79	1,77	1,79	1,85	1,76
2. Angkutan Jalan Raya	1,25	1,25	1,25	1,29	1,22	1,20	1,17	1,23
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,23	1,23	1,23	1,27	1,20	1,18	1,15	1,21
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Komunikasi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1. Pos dan Telekomunikasi	0,43	0,46	0,50	0,50	0,55	0,59	0,68	0,53
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN								
a. Bank	2,19	2,19	2,21	2,19	2,14	2,16	2,18	2,18
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,04	1,06	1,07	1,07	1,05	1,09	1,12	1,07
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	0,25	0,26	0,26
d. Sewa Bangunan	0,85	0,84	0,87	0,86	0,84	0,81	0,80	0,84
e. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9. JASA-JASA								
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	2,29	2,22	2,15	2,19	2,06	2,00	2,05	2,14
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	1,03	0,98	0,93	0,90	0,84	0,82	0,80	0,90
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	1,03	0,98	0,93	0,90	0,84	0,82	0,80	0,90
b. Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sosial Kemasyarakatan	1,27	1,24	1,22	1,29	1,22	1,18	1,25	1,24
2. Hiburan & Rekreasi	1,03	1,01	1,01	1,08	1,01	0,98	1,04	1,02
3. Perorangan & Rumah tangga	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS diolah

Lampiran 11 : Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok /
Pengolahan Tembako Kabupaten Kudus (ADHK :
2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)	RATA-RATA (9)
1. PERTANIAN	6,84	6,86	6,73	6,01	5,59	5,13	5,11	6,04
a. Tanaman Bahan Makanan	4,60	4,57	4,40	4,04	3,87	3,51	3,57	4,08
b. Tanaman Perkebunan	0,65	0,65	0,66	0,64	0,60	0,52	0,47	0,60
c. Peternakan	1,53	1,59	1,63	1,29	1,09	1,06	1,03	1,32
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	33,89	34,43	36,04	36,55	36,99	38,36	39,54	36,54
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	33,89	34,43	36,04	36,55	36,99	38,36	39,54	36,54
1. Makanan & Minuman	19,13	19,93	22,04	22,57	23,68	25,35	26,23	22,70
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	2,49	2,32	2,24	2,21	2,07	2,02	2,12	2,21
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	0,61	0,58	0,58	0,57	0,54	0,52	0,54	0,56
4. Kertas & Brg. Cetakan	7,36	6,91	6,55	6,50	6,26	6,13	6,22	6,56
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	0,79	0,84	0,79	0,81	0,76	0,75	0,76	0,78
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	0,32	0,32	0,33	0,33	0,31	0,30	0,30	0,31
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	2,48	2,69	2,68	2,70	2,56	2,50	2,56	2,60
9. Barang lainnya	0,71	0,85	0,84	0,87	0,81	0,79	0,81	0,81
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,50	0,52	0,54	0,52	0,53	0,50	0,50	0,52
a. Listrik	0,49	0,51	0,53	0,51	0,51	0,48	0,48	0,50
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5. BANGUNAN	1,35	1,54	1,60	1,98	2,25	2,45	2,40	1,94

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN								
a. Perdagangan Besar & Eceran	47,04	46,40	45,06	44,84	44,92	43,94	42,87	45,01
b. Hotel	44,55	43,99	42,75	42,67	42,90	41,93	40,86	42,81
c. Restoran	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI								
a. Pengangkutan	2,46	2,38	2,28	2,15	2,00	2,00	1,99	2,18
1. Angkutan Rel	2,81	2,85	2,85	2,91	2,87	2,88	2,89	2,87
2. Angkutan Jalan Raya	2,09	2,08	2,04	2,09	1,97	1,93	1,84	2,01
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	2,06	2,05	2,00	2,06	1,94	1,89	1,80	1,97
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Komunikasi	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1. Pos dan Telekomunikasi	0,72	0,77	0,81	0,82	0,89	0,95	1,06	0,86
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN								
a. Bank	3,67	3,65	3,62	3,56	3,46	3,46	3,42	3,55
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,74	1,77	1,75	1,73	1,70	1,75	1,75	1,74
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,49	0,45	0,43	0,41	0,39	0,40	0,41	0,43
d. Sewa Bangunan	1,42	1,41	1,42	1,40	1,36	1,29	1,24	1,36
e. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9. JASA-JASA								
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	3,84	3,69	3,51	3,56	3,34	3,21	3,21	3,48
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	1,72	1,63	1,51	1,46	1,36	1,31	1,26	1,46
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	1,72	1,63	1,51	1,46	1,36	1,31	1,26	1,46
b. Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sosial Kemasyarakatan	2,12	2,07	2,00	2,10	1,98	1,90	1,95	2,02
2. Hiburan & Rekreasi	1,73	1,68	1,64	1,75	1,64	1,57	1,63	1,66
3. Perorangan & Rumah tangga	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
JUMLAH	0,39	0,38	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,35
Sumber : BPS diolah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

lanjutan

Lampiran 12 : Persentase Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK :
2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)	RATA-RATA (9)
1. PERTANIAN	22,78	22,23	22,53	21,03	21,07	20,92	20,57	21,59
a. Tanaman Bahan Makanan	16,12	15,62	15,94	15,16	15,23	15,03	14,68	15,40
b. Tanaman Perkebunan	2,22	2,18	2,04	1,91	1,94	1,92	1,89	2,01
c. Peternakan	2,55	2,50	2,64	2,37	2,27	2,30	2,39	2,43
d. Kehutanan	0,51	0,47	0,48	0,27	0,34	0,49	0,39	0,42
e. Perikanan	1,38	1,47	1,42	1,33	1,29	1,18	1,22	1,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,96	1,00	1,00	1,00	0,98	1,02	1,11	1,01
a. Minyak & Gas Bumi	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
b. Pertambangan tanpa Migas	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,91	0,96	0,96	0,96	0,94	0,98	1,07	0,97
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	31,11	31,28	31,85	32,01	32,40	32,23	31,98	31,84
a. Industri Migas	5,31	5,41	5,88	6,08	6,28	6,59	6,60	6,02
b. Industri Tanpa Migas	25,80	25,87	25,97	25,93	26,12	25,65	25,38	25,82
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	14,25	14,37	14,55	14,51	14,78	14,41	14,40	14,47
(i) Makanan & Minuman	8,40	8,50	8,86	8,98	9,28	9,06	9,36	8,92
(ii) Tembakau	5,85	5,87	5,69	5,53	5,50	5,35	5,04	5,55
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	4,69	4,66	4,58	4,54	4,50	4,48	4,37	4,55
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	3,40	3,40	3,41	3,39	3,37	3,34	3,29	3,37
4. Kertas & Brg. Cetakan	0,34	0,34	0,32	0,33	0,33	0,32	0,31	0,33
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	1,41	1,40	1,35	1,39	1,38	1,35	1,33	1,37
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	0,85	0,84	0,88	0,89	0,87	0,87	0,80	0,86
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68
9. Barang lainnya	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,76	0,73	0,79	0,76	0,78	0,82	0,83	0,78
a. Listrik	0,67	0,66	0,71	0,67	0,70	0,73	0,74	0,70
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5. BANGUNAN	4,59	4,66	4,97	5,35	5,49	5,57	5,61	5,17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	22,72	21,73	21,37	21,42	20,87	21,01	21,11	21,46
a. Perdagangan Besar & Eceran	19,52	18,37	17,97	18,11	17,43	17,46	17,53	18,06
b. Hotel	0,38	0,37	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38
c. Restoran	2,82	2,98	3,01	2,93	3,07	3,18	3,21	3,03
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,52	4,69	4,77	4,82	4,79	4,89	4,95	4,78
a. Pengangkutan	3,66	3,78	3,83	3,83	3,78	3,85	3,83	3,79
1. Angkutan Rel	0,11	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
2. Angkutan Jalan Raya	2,88	3,01	3,05	3,05	3,01	3,08	3,07	3,02
3. Angkutan Laut	0,43	0,44	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,44
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,05
6. Jasa penunjang Angkutan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20
b. Komunikasi	0,86	0,91	0,95	0,99	1,01	1,04	1,12	0,98
1. Pos dan Telekomunikasi	0,69	0,75	0,76	0,80	0,82	0,85	0,93	0,80
2. Jasa penunjang Komunikasi	0,17	0,17	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3,78	3,72	3,68	3,60	3,55	3,54	3,58	3,64
a. Bank	0,35	0,34	0,34	0,34	0,38	0,41	0,43	0,37
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
d. Sewa Bangunan	2,69	2,61	2,59	2,52	2,44	2,41	2,42	2,52
e. Jasa Perusahaan	0,15	0,18	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15
9. JASA-JASA	8,78	9,95	9,03	10,02	10,06	10,01	10,25	9,73
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	6,67	7,85	6,93	7,99	8,08	8,03	8,20	7,68
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	6,67	7,85	6,93	7,99	8,08	8,03	8,20	7,68
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Swasta	2,11	2,11	2,10	2,03	1,98	1,98	2,04	2,05
1. Sosial Kemasyarakatan	0,73	0,73	0,71	0,70	0,68	0,69	0,70	0,71
2. Hiburan & Rekreasi	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3. Perorangan & Rumah tangga	1,30	1,30	1,31	1,26	1,23	1,22	1,28	1,27
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS diolah

Lampiran 13 : Persentase Distribusi PDRB Tanpa Industri Rokok /
Pengolahan Tembakau Provinsi Jawa Tengah (ADHK:
2000=100) Menurut Lapangan Usaha 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 (6)	2005 (7)	2006 (8)	RATA-RATA (9)
1. PERTANIAN	24,19	23,62	23,89	22,26	22,29	22,10	21,67	22,86
a. Tanaman Bahan Makanan	17,12	16,59	16,90	16,04	16,12	15,88	15,46	16,30
b. Tanaman Perkebunan	2,36	2,31	2,17	2,02	2,05	2,03	1,99	2,13
c. Peternakan	2,70	2,65	2,80	2,50	2,40	2,43	2,52	2,57
d. Kehutanan	0,54	0,50	0,51	0,29	0,37	0,51	0,41	0,45
e. Perikanan	1,47	1,56	1,51	1,40	1,36	1,24	1,29	1,40
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,02	1,06	1,06	1,06	1,04	1,07	1,17	1,07
a. Minyak & Gas Bumi	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
b. Pertambangan tanpa Migas	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,97	1,02	1,02	1,02	1,00	1,03	1,13	1,03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	26,83	26,99	27,75	28,03	28,47	28,40	28,37	27,83
a. Industri Migas	5,64	5,75	6,24	6,43	6,65	6,96	6,95	6,37
b. Industri Tanpa Migas	21,19	21,24	21,51	21,60	21,82	21,44	21,42	21,46
1. Makanan & Minuman	8,92	9,03	9,40	9,51	9,82	9,57	9,85	9,44
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	4,98	4,95	4,86	4,81	4,76	4,73	4,60	4,81
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	3,62	3,61	3,62	3,59	3,57	3,53	3,47	3,57
4. Kertas & Brg. Cetakan	0,37	0,36	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,35
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	1,49	1,49	1,43	1,47	1,46	1,43	1,40	1,45
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	0,90	0,90	0,93	0,94	0,93	0,92	0,84	0,91
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	0,71	0,71	0,72	0,73	0,73	0,72	0,71	0,72
9. Barang lainnya	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,80	0,78	0,84	0,80	0,83	0,87	0,88	0,83
a. Listrik	0,71	0,70	0,75	0,71	0,74	0,78	0,78	0,74
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09
5. BANGUNAN	4,87	4,95	5,27	5,66	5,80	5,88	5,90	5,48

lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN								
a. Perdagangan Besar & Eceran	24,14	23,08	22,66	22,67	22,09	22,20	22,24	22,72
b. Hotel	20,74	19,52	19,06	19,17	18,44	18,44	18,46	19,12
c. Restoran	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI								
a. Pengangkutan	3,00	3,17	3,20	3,10	3,25	3,36	3,38	3,21
1. Angkutan Rel	4,80	4,99	5,06	5,10	5,07	5,16	5,21	5,06
2. Angkutan Jalan Raya	3,89	4,02	4,06	4,05	4,00	4,06	4,03	4,02
3. Angkutan Laut	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,09
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	3,06	3,20	3,23	3,23	3,19	3,25	3,23	3,20
5. Angkutan Udara	0,46	0,46	0,48	0,47	0,47	0,45	0,44	0,46
6. Jasa penunjang Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Komunikasi	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
1. Pos dan Telekomunikasi	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2. Jasa penunjang Komunikasi	0,91	0,97	1,00	1,04	1,07	1,10	1,18	1,04
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN								
a. Bank	0,73	0,79	0,81	0,85	0,87	0,90	0,97	0,85
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,18	0,18	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19
c. Jasa Penunjang Keuangan	4,02	3,95	3,90	3,81	3,76	3,74	3,77	3,85
d. Sewa Bangunan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,40	0,43	0,45	0,39
e. Jasa Perusahaan	0,54	0,53	0,54	0,53	0,52	0,51	0,53	0,53
9. JASA-JASA								
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	2,85	2,77	2,74	2,67	2,58	2,54	2,54	2,67
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	0,16	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16
b. Swasta	9,33	10,58	9,58	10,61	10,65	10,57	10,79	10,30
1. Sosial Kemasyarakatan	7,08	8,34	7,35	8,45	8,55	8,48	8,64	8,13
2. Hiburan & Rekreasi	7,08	8,34	7,35	8,45	8,55	8,48	8,64	8,13
3. Perorangan & Rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS diolah

Lampiran 14 : Tipologi Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006
 (Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB
 Tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau) Menurut
 Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA (1)	RATA-RATA PERTUMBUHAN			KONTRIBUSI TERHADAP JATENG TH. 2006 (JUTA RUPIAH)			KETERANGAN (8)
	KUDUS (2)	JATENG (3)	$\Gamma_k \geq \Gamma_{ip}$ (4)	KUDUS (5)	RATA-RATA KAB/KOTA SE JATENG (6)	$Y_k \geq Y_{ip}$ (7)	
1. PERTANIAN							
a. Tanaman Bahan Makanan	1,58	2,89	-	356.087,48	885.777,12	-	(-) Terbelakang
b. Tanaman Perkebunan	2,25	3,03	-	249.105,53	632.027,74	-	(-) Terbelakang
c. Peternakan	0,74	1,92	-	32.438,37	81.550,58	-	(-) Terbelakang
d. Kehutanan	(0,20)	3,57	-	71.814,74	102.951,50	-	(-) Terbelakang
e. Perikanan	(4,36)	(0,06)	-	160,76	16.580,60	-	(-) Terbelakang
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN							
a. Minyak & Gas Bumi	3,45	2,56	+	2.568,08	52.666,70	-	(+) Berkembang
b. Pertambangan tanpa Migas	10,98	7,29	+	4.443,31	47.951,42	-	(+) Berkembang
c. Penggalian	-	5,28	-	-	1.720,19	-	(-) Terbelakang
3. INDUSTRI PENGOLAHAN							
a. Industri Migas	10,98	(13,35)	-	-	97,23	-	(-) Terbelakang
b. Industri Tanpa Migas	9,41	7,47	+	4.443,31	46.134,00	-	(+) Berkembang
1. Makanan & Minuman	9,41	5,50	+	2.785.774,39	1.159.789,09	+	(+) Prima
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	12,40	8,51	-	-	284.028,77	-	(-) Terbelakang
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	3,82	4,62	+	2.755.774,39	875.760,33	+	(+) Prima
4. Kertas & Brg. Cetakan	4,49	5,73	+	1.827.791,75	402.799,86	+	(+) Prima
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	3,70	3,43	+	147.595,32	188.216,52	-	(+) Berkembang
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	5,98	4,07	+	37.910,85	141.737,69	-	(+) Berkembang
7. Logam Dasar Besi & Baja	5,58	3,09	+	433.652,77	13.539,53	+	(+) Prima
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	7,16	3,73	+	53.119,16	57.395,62	-	(+) Berkembang
9. Barang lainnya	8,97	3,67	+	21.141,77	34.533,21	-	(+) Berkembang
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH							
a. Listrik	6,41	4,23	-	-	3.455,55	-	(-) Terbelakang
b. Gas	6,14	4,85	+	178.172,16	29.208,78	+	(+) Prima
c. Air Bersih	14,50	5,27	+	56.390,61	4.873,57	+	(+) Prima
		6,36	+	34.548,41	35.898,01	-	(+) Berkembang
		6,43	-	33.152,65	31.859,02	+	(-) Potensial
		5,79	+	1.395,76	4.038,99	-	(+) Berkembang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. BANGUNAN	17,38	8,21	+	167.298,67	241.330,47	(+)	Berkembang
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	5,00	3,38	+	2.987.781,04	909.041,20	(+)	Prima
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,11	2,79	+	2.847.876,71	754.565,33	(+)	Prima
b. Hotel	(3,95)	4,65	-	1.212,24	16.253,22	(-)	Terbelakang
c. Restoran	2,95	6,92	-	138.692,09	138.222,65	(-)	Potensial
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,14	6,24	+	201.682,93	212.900,18	(+)	Berkembang
a. Pengangkutan	4,32	5,44	-	127.906,55	164.819,92	(-)	Terbelakang
1. Angkutan Rel	-	(3,02)	-	-	3.051,75	(-)	Terbelakang
2. Angkutan Jalan Raya	4,32	5,77	-	125.539,64	132.240,67	(-)	Terbelakang
3. Angkutan Laut	-	4,14	-	-	18.059,17	(-)	Terbelakang
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	1,55	-	-	4,56	(-)	Terbelakang
5. Angkutan Udara	-	17,75	-	-	3.054,44	(-)	Terbelakang
6. Jasa penunjang Angkutan	4,40	4,30	+	2.366,91	8.409,33	(-)	Terbelakang
b. Komunikasi	13,71	9,36	+	73.776,38	48.080,26	(+)	Berkembang
1. Pos dan Telekomunikasi	-	9,87	-	-	39.847,20	(+)	Prima
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	7,08	-	-	8.233,06	(+)	Prima
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,39	3,71	+	238.231,77	154.274,53	(+)	Prima
a. Bank	6,74	8,47	-	122.099,35	18.476,66	(-)	Potensial
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	3,55	4,39	-	28.545,22	21.490,85	(-)	Potensial
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	5,24	-	-	4.093,66	(-)	Terbelakang
d. Sewa Bangunan	4,29	2,82	+	86.720,38	104.029,83	(+)	Berkembang
e. Jasa Perusahaan	1,78	3,56	-	866,82	6.183,53	(-)	Terbelakang
9. JASA-JASA	3,48	7,39	-	223.751,62	441.213,36	(-)	Terbelakang
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	1,19	8,34	-	87.563,83	353.215,44	(-)	Terbelakang
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	1,19	8,34	-	87.563,83	353.215,44	(-)	Terbelakang
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	-	(-)	Terbelakang
b. Swasta	5,17	4,07	+	136.187,79	87.997,93	(+)	Prima
1. Sosial Kemasyarakatan	5,58	3,77	+	113.550,28	30.061,91	(+)	Prima
2. Hiburan & Rekreasi	3,75	1,69	+	510,85	2.930,44	(+)	Berkembang
3. Peromangan & Rumah tangga	3,25	4,37	-	22.126,66	55.005,58	(-)	Terbelakang
JUMLAH	6,64	4,72	+	6.969.599,62	4.088.175,38	(+)	Prima

Sumber : Lampiran 2,4 dan 5 diolah

Lampiran 15 : Hasil Analisis Shift-Share atas PDRB
Tanpa Industri Rokok / Tembakau
Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

LAPANGAN USAHA (1)	(dalam jutaan rupiah)			
	Nik (2)	Mik (3)	Cik (4)	Dik (5)
1. PERTANIAN	105.315,47	(44.808,37)	(28.466,79)	32.040,31
a. Tanaman Bahan Makanan	70.857,23	(28.057,49)	(11.716,17)	31.083,57
b. Tanaman Perkebunan	10.086,98	(6.340,31)	(2.345,12)	1.401,55
c. Peternakan	23.622,04	(6.597,22)	(17.893,18)	(868,36)
d. Kehutanan	68,25	(69,06)	(48,43)	(49,24)
e. Perikanan	680,97	(338,45)	130,27	472,79
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	772,75	476,18	816,68	2.065,61
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
c. Penggalian	772,75	512,64	780,21	2.065,61
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	522.050,46	121.891,10	505.525,89	1.149.467,45
a. Industri Migas	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	522.050,46	22.917,13	604.499,86	1.149.467,45
1. Makanan & Minuman	294.615,00	125.926,37	500.743,91	921.285,28
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	38.297,23	(11.880,20)	3.340,82	29.757,85
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	9.468,27	(1.595,41)	904,88	8.777,74
4. Kertas & Brg. Cetakan	113.349,09	(43.444,76)	14.982,48	84.886,81
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet	12.180,98	(2.968,78)	6.427,08	15.639,28
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	4.961,95	(1.270,85)	2.183,16	5.874,26
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	38.232,95	402,15	21.897,35	60.532,46
9. Barang lainnya	10.944,99	1.201,98	10.566,80	22.713,77
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.735,25	2.920,73	91,67	10.747,66
a. Listrik	7.533,99	2.984,56	(547,40)	9.971,16
b. Gas	-	-	-	-
c. Air Bersih	201,26	47,58	527,66	776,50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. BANGUNAN	20.782,99	17.908,57	64.659,53	103.351,09
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	724.564,90	(232.652,94)	266.441,61	758.353,58
a. Perdagangan Besar & Eceran	686.202,40	(307.610,44)	357.895,61	736.487,57
b. Hotel	501,70	(17,71)	(815,43)	(331,44)
c. Restoran	37.860,81	19.700,34	(35.363,70)	22.197,45
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	43.342,99	15.075,36	9.901,69	68.320,05
a. Pengangkutan	32.250,53	4.887,11	(8.463,36)	28.674,28
1. Angkutan Rel	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	31.656,44	7.350,22	(10.871,32)	28.135,34
3. Angkutan Laut	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	594,09	(68,74)	13,58	538,94
b. Komunikasi	11.092,46	13.146,08	15.407,22	39.645,77
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	56.511,14	(14.089,58)	21.930,01	64.351,57
a. Bank	26.824,64	25.104,23	(12.366,76)	39.562,11
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	7.526,28	(718,83)	(1.419,98)	5.387,47
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	21.906,88	(9.666,33)	7.074,15	19.314,69
e. Jasa Perusahaan	253,34	(71,38)	(94,67)	87,30
9. JASA-JASA	59.222,94	37.980,49	(55.675,98)	41.527,45
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	26.511,57	23.809,30	(44.331,01)	5.989,87
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	26.511,57	23.809,30	(44.331,01)	5.989,87
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-
b. Swasta	32.711,36	(5.507,57)	8.333,79	35.537,58
1. Sosial Kemasyarakatan	26.643,97	(6.257,23)	11.182,20	31.568,94
2. Hiburan & Rekreasi	133,10	(89,83)	58,04	101,31
3. Perorangan & Rumah tangga	5.934,29	(588,69)	(1.478,27)	3.867,33
JUMLAH	1.540.298,91	-	689.925,86	2.230.224,77

Sumber : Lampiran 2 dan 4 diolah.

Lampiran 16 : Hasil Analisis Location Quotient (LQ) atas PDRB Tanpa Industri Rokok / Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (ADHK: 2000=100) Menurut Lapangan Usaha, 2000-2006

LAPANGAN USAHA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1. PERTANIAN		0,28	0,29	0,28	0,27	0,25	0,23	0,24	0,26
a. Tanaman Bahan Makanan		0,27	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,23	0,25
b. Tanaman Perkebunan		0,28	0,28	0,30	0,32	0,29	0,26	0,23	0,28
c. Peternakan		0,57	0,60	0,58	0,51	0,45	0,44	0,41	0,51
d. Kehutanan		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
e. Perikanan		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
a. Minyak & Gas Bumi		-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas		-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penggalian		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3. INDUSTRI PENGOLAHAN		1,26	1,28	1,30	1,30	1,30	1,35	1,39	1,31
a. Industri Migas		-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas		1,60	1,62	1,68	1,69	1,70	1,79	1,85	1,70
1. Makanan & Minuman		2,14	2,21	2,35	2,37	2,41	2,65	2,66	2,40
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki		0,50	0,47	0,46	0,46	0,44	0,43	0,46	0,46
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain		0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
4. Kertas & Brg. Cetakan		20,13	19,33	19,04	18,87	17,90	18,02	18,79	18,87
5. Pupuk Kimia & Brg. dari Karet		0,53	0,56	0,55	0,55	0,52	0,52	0,54	0,54
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam		0,36	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,36	0,35
7. Logam Dasar Besi & Baja		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan		3,48	3,76	3,70	3,68	3,49	3,48	3,58	3,60
9. Barang lainnya		6,12	7,37	7,07	7,10	6,68	6,64	6,79	6,82
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH		0,62	0,67	0,64	0,65	0,64	0,57	0,56	0,62
a. Listrik		0,69	0,72	0,70	0,71	0,69	0,62	0,61	0,68
b. Gas		-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih		0,14	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,18
5. BANGUNAN		0,28	0,31	0,30	0,35	0,39	0,42	0,41	0,35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN								
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,95	2,01	1,99	1,98	2,03	1,98	1,93	1,98
b. Hotel	2,15	2,25	2,24	2,23	2,33	2,27	2,21	2,24
c. Restoran	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,06
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0,82	0,75	0,71	0,69	0,62	0,60	0,59	0,68
a. Pengangkutan	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57
1. Angkutan Rel	0,54	0,52	0,50	0,52	0,49	0,47	0,46	0,50
2. Angkutan Jalan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Angkutan Laut	0,67	0,64	0,62	0,64	0,61	0,58	0,56	0,62
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Jasa penunjang Angkutan	0,18	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17
b. Komunikasi	0,79	0,79	0,81	0,79	0,84	0,87	0,90	0,83
1. Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	0,91	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92
a. Bank	4,74	4,97	4,93	4,83	4,28	4,03	3,88	4,52
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,91	0,85	0,79	0,78	0,75	0,78	0,78	0,81
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	0,51	0,49	0,51
e. Jasa Perusahaan	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
9. JASA-JASA	0,41	0,35	0,37	0,34	0,31	0,30	0,30	0,34
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0,24	0,20	0,21	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	0,24	0,20	0,21	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Swasta	0,95	0,92	0,90	0,98	0,94	0,91	0,91	0,93
1. Sosial Kemasyarakatan	2,22	2,17	2,17	2,38	2,28	2,16	2,22	2,23
2. Hiburan & Rekreasi	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
3. Perorangan & Rumah tangga	0,28	0,27	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,26
JUMLAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Lampiran 2 dan 4 diolah.

Lampiran 17 : *Overlay* Analisis Tipologi Daerah, *Shift-Share*, dan *LQ* atas PDRB tanpa Industri Rokok/Pengolahan Tembakau Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 2000-2006

LAPANGAN USAHA	Tipologi Daerah		Shift-Share	$LQ > 1$	Rangkuman	Keterangan
	$\Gamma_{ik} \geq \Gamma_{ip}$	$Y_{ik} \geq Y_{ip}$				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN						
a. Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	-	Terbelakang
b. Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	Terbelakang
c. Peternakan	-	-	-	-	-	Terbelakang
d. Kehutanan	-	-	-	-	-	Terbelakang
e. Perikanan	+	-	+	-	+ -	Tumbuh
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN						
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	Tumbuh
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-	Terbelakang
c. Penggalian	+	-	+	-	+ -	Terbelakang
3. INDUSTRI PENGOLAHAN						
a. Industri Migas	+	+	+	+	+++	Tumbuh
b. Industri Tanpa Migas	-	-	-	-	-	Unggulan
1. Makanan & Minuman	+	+	+	+	+++	Terbelakang
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	+	+	+	+	+++	Unggulan
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lain	+	-	+	-	+ -	Unggulan
4. Kertas & Brg. Cetakan	+	+	+	+	+ -	Tumbuh
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	+	+	+	+	+++	Tumbuh
6. Semen & Brg. Lain Bukan Logam	+	-	+	-	+ -	Unggulan
7. Logam Dasar Besi & Baja	+	+	+	+	+ -	Tumbuh
8. Alat Angk., Mesin & Peralatan	-	+	-	+	-	Terbelakang
9. Barang lainnya	+	+	+	+	+++	Unggulan
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH						
a. Listrik	+	+	+	+	+++	Unggulan
b. Gas	-	+	-	-	+ -	Unggulan
c. Air Bersih	+	-	-	-	-	Tumbuh
5. BANGUNAN						
	+	-	+	-	+ -	Tertekan
	+	-	+	-	+ -	Tumbuh
	+	-	+	-	+ -	Tumbuh

	lanjutan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	+	+	+	+	+++	Unggulan
a. Perdagangan Besar & Eceran	+	+	+	+	+++	Unggulan
b. Hotel	-	-	-	-	---	Terbelakang
c. Restoran	-	+	-	-	-+-	Tertekan
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	+	-	+	-	+--	Tumbuh
a. Pengangkutan	-	-	-	-	---	Terbelakang
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	---	Terbelakang
2. Angkutan Jalan Raya	-	-	-	-	---	Terbelakang
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	---	Terbelakang
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	---	Terbelakang
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	---	Terbelakang
6. Jasa penunjang Angkutan	-	-	-	-	---	Terbelakang
b. Komunikasi	+	-	+	-	+--	Tumbuh
1. Pos dan Telekomunikasi	+	+	+	-	+++	Berkembang
2. Jasa penunjang Komunikasi	-	-	-	-	---	
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	+	+	+	-	+++	Berkembang
a. Bank	-	+	-	+	-+-	Potensial
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-	-	-	-	-+-	Tertekan
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	---	Terbelakang
d. Sewa Bangunan	+	-	+	-	+--	Tumbuh
e. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	---	Terbelakang
9. JASA-JASA	-	-	-	-	---	Terbelakang
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
1. Administrasi, Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-	---	Terbelakang
2. Jasa Pemerintahan Lainnya	+	+	+	-	---	Terbelakang
b. Swasta	+	+	+	-	+++	Berkembang
1. Sosial Kemasyarakatan	+	+	+	-	+++	Unggulan
2. Hiburan & Rekreasi	+	-	-	-	+--	Tumbuh
3. Perorangan & Rumah tangga	-	-	-	-	---	Terbelakang
PDRB	+	+	+	+	+++	